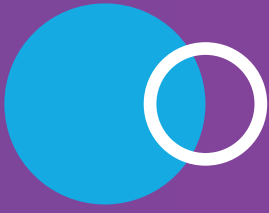


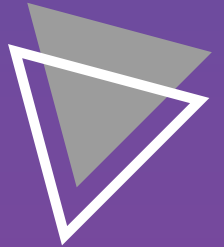
Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance





x x x x
x x x x



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

the Company is committed to continuing to improve the Good Corporate Governance implementation principles in accordance with applicable laws



Dasar-dasar Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* atau *GCG* di Perseroan didasarkan pada standar penerapan pada industri keuangan, dengan mengacu pada berbagai ketentuan baik ketentuan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan dan *best practice* yang berlaku di industri keuangan.

Ketentuan internal maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud meliputi antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain:
 - i. POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

GCG Implementation References

The Good Corporate Governance or GCG implementation in the Company is based on the standards of application in the financial industry, with reference to various provisions both internal and legal, and best practices that apply in the financial industry.

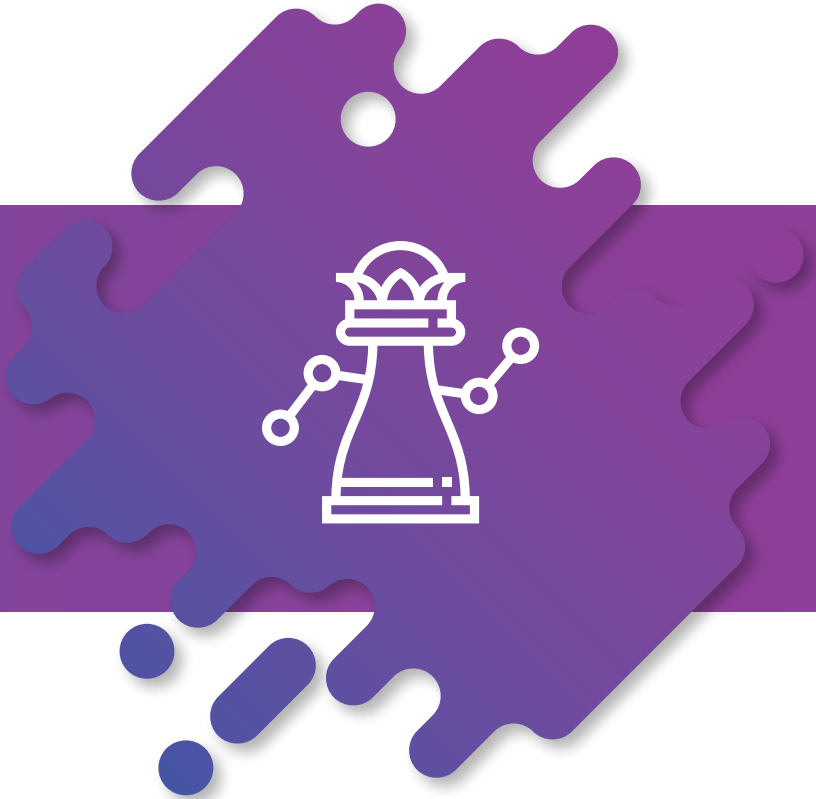
The internal rules and the laws and regulations referred to include, among others:

1. Law No. 40 of 2007 regarding the Limited Liability Company.
2. Law No. 8 of 1995 regarding the Capital Market
3. Financial Services Authority Regulations ("POJK") and Financial Services Authority Circular Letters ("SEOJK"), among others:
 - i. POJK No. 18/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates.



Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



- ii. POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- iii. POJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
- iv. POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- v. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- vi. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- vii. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- viii. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- ix. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- x. POJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- ii. POJK No. 17/POJK.03/2014 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomerates.
- iii. POJK No. 28/POJK.05/2014 on Financing Companies' Business Licenses and Institutional.
- iv. POJK No. 35/POJK.05/2018 on the Financing Companies Business Implementation.
- v. POJK No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Financing Companies.
- vi. POJK No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.
- vii. POJK No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of Governance Guidelines for Public Companies.
- viii. POJK No. 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions.
- ix. POJK No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Firm Services in the Financial Services Activities.
- x. POJK No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

- xi. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
 - xii. POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
 - xiii. POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
 - xiv. SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
 - xv. SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 - xvi. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Anggaran Dasar Perseroan.
 5. Peraturan Internal Perseroan (Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Piagam Direksi, Piagam Dewan Komisaris, dan Piagam-Piagam Komite yang berada di bawah Direksi dan Dewan Komisaris).
- xi. POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Development of Internal Audit Unit Charter.
 - xii. POJK No. 11/POJK.04/2017 on Ownership Report or Every Share Ownership Change of a Public Company.
 - xiii. POJK No. 10/POJK.05/2019 on Sharia Financing Company Business Implementation and Financing Company Sharia Business Unit.
 - xiv. SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 on Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Companies
 - xv. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 on the Procedures of the Public Accountant and Public Accountant Firm Services Use in the Financial Services Activities.
 - xvi. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Good Corporate Governance Public Company.
4. Company's Articles of Association.
 5. Internal Company Regulations (Code of Ethics and Code of Conduct, Guidelines for Good Corporate Governance, Board of Directors 'Charter, Board of Commissioners' Charter, and Committee Charter under the Directors and Board of Commissioners).

Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi pedoman praktik penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ada di Perseroan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut dan untuk mendukung visi Perseroan sebagai salah satu Perusahaan Pembiayaan terbaik di Indonesia dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan *best practices* dalam tata kelola perusahaan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Berdasarkan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan SEOJK Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, penerapan tata kelola bagi perusahaan pembiayaan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu keterbukaan *transparency*, akuntabilitas *accountability*, pertanggungjawaban *responsibility*, kemandirian *independency*, dan kesetaraan dan kewajaran *fairness*.

GCG Principles

The principles of Good Corporate Governance contained in the prevailing laws and regulations in Indonesia serve as guidelines for the practice of Good Corporate Governance implementation in the Company. Based on this principle and to support the Company's Vision as one of the best Financing Companies in Indonesia by Good Corporate Governance implementation, the Company is committed to continuing to improve the Good Corporate Governance implementation principles in accordance with applicable laws and regulations and the development of best practices in corporate governance.

Principles of Good Corporate Governance

Based on POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and SEOJK Number 15/SEOJK.05/2016 concerning Reports on the Implementation of Good Corporate Governance for Financing Companies, the application of governance for finance companies must always be based on 5 (five) basic principles: transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Principles	Pemenuhan Terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Good Corporate Governance Principles Fullfilment
<p>Keterbukaan Transparency</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan Perseroan telah menerapkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan pada rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan. Hal dimaksud tercermin dalam risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan. • Keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan telah mencantumkan informasi yang dibutuhkan oleh debitur/konsumen didalam perjanjian pembiayaan/akad pembiayaan; - Perseroan telah menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan; - Perseroan mengungkapkan informasi dengan jelas dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dengan cara mengungkapkan informasi penting dengan memperhatikan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara antara lain pemanfaatan <i>website</i> Perseroan untuk menyediakan pengungkapan informasi termasuk berupa Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan-laporan atau pengungkapan-pengungkapan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparency in the decision making process The Company has implemented transparency in the decision making process at Directors' meetings, Board of Commissioners meetings, and committee meetings under the Board of Commissioners and Directors of the Company. This is reflected in the minutes of the Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings and meetings of the committees under the Board of Commissioners and Directors of the Company. • Transparency in disclosing and providing relevant information <ul style="list-style-type: none"> - The Company has included the information needed by the debtor/ consumer in the financing agreement; - The Company has submitted reports to the Financial Services Authority in accordance with the provisions; - The Company discloses information in a clear way and is easily accessed by stakeholders by disclosing important information by taking into account the procedures set out in the applicable laws and regulations, by means of, among others, utilizing the Company's website to provide information disclosure including Annual Reports, Financial Statements, and other reports or disclosures that are required in accordance with applicable laws and regulations.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Principles	Pemenuhan Terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Good Corporate Governance Principles Fulfilment
Akuntabilitas Accountability	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Fungsi, Kegiatan, dan Tugas Perseroan telah memiliki uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab atas seluruh fungsi dalam struktur organisasi Perseroan sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar Perseroan. • Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi kepada Pemegang Saham Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Dewan Komisaris dan Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pemegang Saham. • Kode Etik Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang menjadi acuan dalam berperilaku bagi seluruh karyawan. • Sistem Pendeteksian Dini Perseroan telah memiliki kebijakan terkait sistem <i>early warning system</i> (sistem pendeteksian dini) yang tertuang dalam <i>Corporate Business Continuity Management (BCM) Framework</i>. • Sistem Penghargaan dan Hukuman Perseroan telah memiliki kebijakan terkait sistem penghargaan dan hukuman <i>reward and punishment system</i> antara lain Peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai pengupahan, tunjangan, bantuan, dan fasilitas; jaminan sosial dan kesejahteraan; ketentuan cuti; sanksi; tingkatan pelanggaran dan pengenaan sanksi; dan pemutusan hubungan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Determination of Functions, Activities and Tasks The Company has a description of the duties, authority and responsibility for all functions in the Company's organizational structure in accordance with the vision, mission, and basic values of the Company. • Accountability of the Board of Commissioners and Directors to Shareholders Through the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors are accountable for their performance to the Shareholders. • Code of Ethics The Company has Company Regulations, Code of Ethics and Code of Conduct that serve as a reference for behavior for all employees. • Early Detection System The Company has a policy related to the early warning system / early detection system contained in the Corporate Business Continuity Management (BCM) Framework. • Reward and Punishment Systems The Company has policies related to the reward and punishment system, such as the Company Regulations which regulate wages, benefits, assistance and facilities; social security and welfare; leave provisions; penalty; degree of violation and imposition of sanctions; and termination of employment.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Principles	Pemenuhan Terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik	Good Corporate Governance Principles Fullfilment
Pertanggungjawaban Responsibility	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung Jawab Direksi atas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko serta telah membentuk Komite Pemantau Risiko <i>Risk Oversight Committee</i> dan Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>. Tanggung Jawab kepada Debitur Perseroan telah menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui oleh calon konsumen/debitur ketika akan menandatangani perjanjian. Selain itu, dalam penanganan pengaduan, Perseroan telah memiliki kebijakan terkait penanganan pengaduan. Tanggung Jawab Sosial Perseroan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial untuk periode 2019. Perseroan selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 	<ul style="list-style-type: none"> Responsibilities of the Board of Directors for the Implementation of Risk Management The Company already has Risk Management Guidelines and has established a Risk Oversight Committee and Risk Management Committee. Responsibility to Debtors The Company has explained things that potential customers/debtors need to know when signing an agreement. In addition, in the case of complaints that needs handling, the Company has a policy related to complaint handling. Social Responsibility The Company has carried out social responsibility activities for the period 2019. The Company always adheres to the prudential principles and regulations that apply in carrying out its business activities.
Kemandirian Independency	<p>Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari segala tekanan dan intervensi dari pihak lain. Perseroan senantiasa menghindari segala bentuk benturan kepentingan.</p>	<p>The Company is independently and professionally managed, and is free from all pressures and interventions from other parties. The Company always avoids all forms of conflict of interest.</p>
Kesetaraan dan kewajaran Fairness	<p>Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh <i>Stakeholders</i> berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran <i>equal treatment</i>. Seluruh <i>Stakeholders</i> mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.</p>	<p>The Company always pays attention to the interests of all Stakeholders based on the principle of equal treatment. All stakeholders have access to information in accordance with the principle of transparency.</p>

Penerapan Pedoman GCG

Berdasarkan Pasal 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang pada intinya menyatakan bahwa Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

GCG Guidelines Application

Based on Article 3 POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for Public Company Governance which in essence states that the Public Company must disclose information regarding the implementation of recommendations written in the Governance Guidelines as referred to in SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Good Corporate Governance Public Company, the implementation is as follows:

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
A.	Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspects of Public Company's relations with Shareholders in Guaranteeing the Rights of Shareholders	
	Prinsip 1 Principle 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Increase the Value of Organizing a General Meeting of Shareholders (GMS).	
1.1	<p>Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara <i>voting</i> baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Public companies have methods or procedures for voting both publicly and privately that prioritize the independence and interests of shareholders.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Teknis pengumpulan suara dalam RUPS Perseroan diatur dalam Tata Tertib RUPS (disampaikan kepada pemegang saham yang hadir sebelum penyelenggaraan RUPS) dan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2019 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2019, teknis pengumpulan suara terkait setiap usul yang diajukan dalam setiap mata acara RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham, dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan <i>abstain</i>, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selanjutnya, suara pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju dan <i>abstain</i> akan dihitung oleh notaris.</p> <p>Terhadap suara <i>abstain</i> dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pada pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The vote collection technique in the Company's GMS is regulated in the GMS Rules (submitted to shareholders who were present before the holding of the GMS) and in the Company's Articles of Association to prioritize the independence and interests of shareholders.</p> <p>In the Annual GMS and Extraordinary GMS held on March 12, 2019 and the Extraordinary GMS held on October 10, 2019, the technical vote collection related to each proposal submitted in each GMS agenda was conducted verbally by requesting to shareholders, and / or their attorney to raise their hands for those who vote disagree and <i>abstain</i>, while those who vote agree are not asked to raise their hands. Furthermore, the votes of shareholders and / or their attorneys who disagree and <i>abstain</i> will be counted by a notary.</p> <p>Abstention is considered to issue the same votes as the majority vote for voting shareholders.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
1.2	<p>Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS.</p>	<p>Implementasi: Jelaskan</p> <p>Seluruh anggota Direksi dan Dewan Perseroan hadir pada saat RUPS Tahunan tanggal 12 Maret 2019, kecuali 2 (dua) orang Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.</p> <p>Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dapat mewakili Perseroan untuk memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas setiap agenda RUPS Tahunan sehingga RUPS Tahunan dapat dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Implementation: Explain</p> <p>All members of the Board of Directors and the Board of the Company were present at the Annual GMS on March 12, 2019, except for 2 (two) Board of Commissioners who were unable to attend.</p> <p>Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present can represent the Company to provide an explanation to shareholders on each Annual GMS Agenda so that the Annual GMS can be carried out properly.</p>
1.3	<p>Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah mempublikasikan ringkasan risalah RUPS pada halaman <i>website</i> Perseroan dan tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun. Ringkasan risalah RUPS Tahunan dapat diunduh pada www.wom.co.id.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has published the Summary of the GMS minutes at the Company's website page, and will be available for more than 1 (one) year. The summary of the GMS minutes can be downloaded at www.wom.co.id.</p>
<p>Prinsip 2 Principle 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor. Improving the Public Company's Quality of Communication with the Shareholders or Investor</p>		
2.1	<p>Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Public Companies have a policy of communication with the shareholders or investors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah menyusun dan menerbitkan kebijakan yang mengatur mengenai komunikasi dengan publik termasuk kepada pemegang saham maupun investor.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has compiled and issued a policy governing communication with the public including shareholders and investors.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
2.2	<p>Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>The Public Company discloses its communication policy with shareholders or investors on the Website.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah mengungkapkan kebijakan yang mengatur mengenai komunikasi dengan publik termasuk kepada pemegang saham maupun investor pada website Perseroan (www.wom.co.id).</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has disclosed policies governing communication with the public including shareholders and investors on the Company's website (www.wom.co.id).</p>
<p>B. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspects of Board of Commissioners' Functions and Roles</p>		
<p>Prinsip 3 Principle 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Board of Commissioners' Membership and Composition</p>		
3.1	<p>Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>The Board of Commissioners' number of members determination takes into account the Public Company's conditions.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan.</p> <p>Per Desember 2019, Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 5 (lima) orang, dimana 40% merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The number of members of the Board of Commissioners of the Company is in accordance with the provisions and has considered the needs, conditions and abilities of the Company.</p> <p>As of December 2019, the Company's Board of Commissioners numbered 5 (five) people, of which 40% were Independent Commissioners. The number of members of the Board of Commissioners does not exceed the number of members of the Board of Directors.</p>

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
3.2	<p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>The Board of Commissioners member composition determination takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Board of Commissioners member composition determination is done by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience needed to support the implementation of its duties as a member of the Board of Commissioners. The composition of the Company's Board of Commissioners reflects the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, and age, which can be seen from the profile of each member of the Company's Board of Commissioners.</p>

Prinsip 4 | Principle 4
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Improving the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities Implementation Quality

4.1	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri <i>self-assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan penilaian Dewan Komisaris diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang dapat diakses melalui website Perseroan www.wom.co.id.</p> <p>Dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mengatur bahwa penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta berdasarkan pada tolak ukur yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Board of Commissioners assessment policy is regulated in the Board of Commissioners Charter which can be accessed through the Company's website www.wom.co.id.</p> <p>The Charter of the Board of Commissioners regulates that the performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out regularly in order to improve the quality of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and is based on benchmarks prepared by the Nomination and Remuneration Committee.</p>
-----	--	--

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
4.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy to evaluate the performance of the Board of Commissioners is disclosed through the Annual Report of the Public Company.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan penilaian Dewan Komisaris telah diatur dalam Piagam Dewan Komisaris, dan hasil penilaian Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Board of Commissioners assessment policy has been set in the Board of Commissioners Charter, and the Board of Commissioners assessment results are disclosed in the Company's Annual Report.</p>
4.3	<p>Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Dalam Piagam Dewan Komisaris Perseroan terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir jika anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Dewan Komisaris tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>In the Company's Board of Commissioners' Charter there is a provision that the position of member of the Board of Commissioners may end if the relevant member of the Board of Commissioners no longer meets the requirements of the applicable laws and regulations.</p> <p>The prevailing statutory requirements referred to in the Board of Commissioners' Charter also include the requirements stipulated in POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which states that members of the Board of Commissioners during their tenure must fulfill the requirements of never having been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.</p>

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
4.4	<p>Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions formulates a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggungjawab terkait dengan fungsi nominasi diantaranya menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities related to the nomination function including drafting and providing recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding the succession policy on the nomination of members of the Board of Directors.</p>
<p>C. Aspek Fungsi dan Peran Direksi Aspects of Board of Directors Functions and Roles</p> <p>Prinsip 5 Principle 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Boards of Directors Membership and Compositions</p>		
5.1	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Determination of the Board of Directors member numbers takes into account the condition of the Public Company and its effectiveness in decision making.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Jumlah anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan telah mempertimbangkan kebutuhan, kondisi dan kemampuan Perseroan.</p> <p>Per Desember 2019, Direksi berjumlah 5 (lima) orang.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company's Board of Director's member number is in accordance with the provisions and has taken into account the needs, conditions and abilities of the Company.</p> <p>As of December 2019, there were 5 (five) Directors.</p>
5.2	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Determination of the Board of Directors' member composition pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience required.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Direksi Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>Determination of the Board of Directors member composition is done by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience needed to support the implementation of its duties as a member of the Board of Directors. The composition of members of the Board of Directors of the Company has reflected the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age which can be seen from the profile of each member of the Company's Board of Directors.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
5.3	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Board of Directors's members who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki pengalaman di bidang keuangan dan akuntansi.</p> <p>Informasi lebih lanjut, mohon melihat profil Bapak Zacharia Susantadiredja (Direktur dan Corporate Secretary Perseroan).</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>Board of Directors' members who are in charge of accounting and finance have experience in finance and accounting.</p> <p>For further information, please see the profile of Mr. Zacharia Susantadiredja (Director and Corporate Secretary of the Company).</p>

Prinsip 6 | Principle 6

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Improving the Board of Directors' Duties and Responsibilities Implementation Quality

6.1	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>The Board of Directors has a self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan penilaian Direksi diatur dalam Piagam Direksi yang dapat diakses melalui website Perseroan www.wom.co.id.</p> <p>Dalam Piagam Direksi tersebut mengatur bahwa penilaian kinerja Direksi ditetapkan dalam <i>Key Performance Indicator</i> (KPI), serta evaluasi kinerja Direksi dilakukan secara mandiri <i>self assessment</i> untuk disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>Directors' assessment policies are regulated in the Directors' Charter which can be accessed through the Company's website www.wom.co.id.</p> <p>The Charter of the Directors stipulates that the assessment of the performance of the Directors is stipulated in the Key Performance Indicator (KPI), and the performance evaluation of the Directors is carried out independently (self assessment) to be submitted to the Nomination and Remuneration Committee for evaluation. The evaluation results of the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.</p>
-----	--	---

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
6.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>The self-assessment policy to assess the performance of the Directors is disclosed through the annual report of the Public Company.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan penilaian Direksi telah diatur dalam Piagam Direksi dan penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Directors' appraisal policy has been regulated in the Directors' Charter, and the Directors' performance appraisal is disclosed in the Company's Annual Report.</p>
6.3	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors when involved in financial crimes .</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Dalam Piagam Direksi terdapat ketentuan bahwa jabatan anggota Direksi dapat berakhir jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksud dalam Piagam Direksi tersebut mencakup juga persyaratan yang diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyebutkan bahwa anggota Direksi selama menjabat harus memenuhi persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>In the Board of Directors' Charter there is a provision that the position of a member of the Board of Directors may end if the member of the Board of Directors concerned no longer meets the requirements of the applicable laws and regulations.</p> <p>The applicable statutory requirements referred to in the Board of Directors' Charter also include the requirements stipulated in POJK No. 33 / POJK.04 / 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies which states that members of the Board of Directors during their tenure must meet the requirements of never having been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and / or related to the financial sector.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
D.	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDERS PARTICIPATION	
	<p>Prinsip 7 Principle 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Increasing the Aspect of Corporate Governance through Stakeholders Participation</p>	
7.1	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Public Company has a policy to prevent insider trading</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah mengatur ketentuan tentang pencegahan terjadinya perdagangan orang dalam <i>insider trading</i> dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan yang telah diunggah ke <i>website</i> Perseroan www.wom.co.id.</p> <p>Dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku menetapkan bahwa personil Perseroan tidak diperkenankan melakukan transaksi dengan menggunakan informasi orang dalam <i>insider information</i> yaitu informasi material atau penting yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum; serta apabila memiliki informasi orang dalam, maka Personil Perseroan tersebut wajib untuk tidak melakukan transaksi baik untuk diri sendiri maupun mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi, serta tidak meneruskan atau memberikan informasi tersebut kepada pihak lain.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has regulated the provisions on preventing insider trading in the Code of Ethics and the Company's Code of Conduct which has been uploaded to the Company's website (www.wom.co.id).</p> <p>The Code of Ethics and Code of Conduct stipulate that Company personnel are not permitted to conduct transactions using insider information that is material or important information that is owned by an insider that is not yet available to the public; and if they have inside information, the Company Personnel must not conduct transactions for themselves or influence other parties to carry out transactions, and not forward or provide such information to other parties.</p>
7.2	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i>.</p> <p>Public Company has anti-corruption and anti-fraud policies.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki <i>Zero Tolerance Policy</i>, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, dan Kebijakan Penanganan Kasus <i>Fraud</i> yang memuat ketentuan yang mengandung hal-hal untuk mencegah praktik <i>fraud</i>, korupsi, suap, dan/atau gratifikasi.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has a Zero Tolerance Policy, a Code of Ethics and Code of Conduct, and a Fraud Case Handling Policy that contains provisions containing matters to prevent the practice of fraud, corruption, bribery, and/or gratification.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
7.3	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i>.</p> <p>Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait kerjasama dealer yang tertuang pada Kebijakan No.005/SKB-WISe/MKT/10-18 versi 01 dan kebijakan terkait ketentuan dan mekanisme prosedur <i>vendor management</i> dan pengadaan barang dan jasa yang tertuang pada Kebijakan No. 231/SKB/OPRS/09-17 sebagaimana diubah dengan Addendum SK Ketentuan dan Mekanisme Proses <i>Vendor Management</i> dan Pengadaan Barang Jasa No. 048/SKB/FPIR/04-19 versi 01.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has policies related to dealer cooperation as set out in Policy No. 005/SKB-WISe/MKT/10-18 version 01 and policies related to the provisions and mechanism of vendor management and procurement of goods and services procedures contained in Policy No. 231/SKB/OPRS/09-17 as amended by Addendum SK Provisions and Mechanisms of Vendor Management Process and Procurement of Services Goods No. 048/SKB/FPIR/04-19 version 01.</p>
7.4	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak kreditur tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>Policies related to the protection of creditor rights are contained in the Guidelines for Good Corporate Governance.</p>
7.5	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Public Company has a whistleblowing system policy.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran sebagaimana tertuang pada <i>Zero Tolerance Policy</i>, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has a violation reporting system policy as set out in the Zero Tolerance Policy, the Code of Ethics and the Code of Conduct of the Company.</p>

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

No.	Rekomendasi Recommendations	Pelaksanaan Implementations
7.6	<p>Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Public Company has a policy of providing long-term incentives to Directors and employees.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Kebijakan terkait pertimbangan penetapan struktur dan besaran remunerasi termasuk didalamnya insentif kepada Direksi tercakup pada kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> <p>Kebijakan pemberian insentif kepada karyawan diatur dalam kebijakan internal Perseroan.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>Policies related to the consideration of determining the structure and amount of remuneration including incentives to the Directors are covered by the Company's Nomination and Remuneration Committee policy.</p> <p>The policy of providing incentives to employees is governed by the Company's internal policies.</p>
E. KETERBUKAAN INFORMASI INFORMATION TRANSPARENCY		
Prinsip 8 Principle 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Improving The Information Disclosure Implementation		
8.1	<p>Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan Teknologi Informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Public Company utilizes the use of broader information technology than the Website as a medium of information disclosure.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, baik situs <i>website</i> Perseroan, media internal, dan media komunikasi massa, untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i>.</p> <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company has utilized information technology, both the Company's website, internal media, and mass communication media, to carry out information disclosure to stakeholders.</p>
8.2	<p>Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali</p> <p>The Public Company Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the ownership of a Public Company share of at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the ultimate beneficial owner in the ownership of the public company through the major and controlling shareholders.</p>	<p>Implementasi: Sesuai</p> <p>Laporan Tahunan Perseroan telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar pemegang saham Perseroan yang memiliki saham Perseroan 5% atau lebih. • Pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan. • Pemegang saham utama/pengendali Perseroan. <p>Implementation: Appropriate</p> <p>The Company's Annual Report has revealed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • List of the Company's shareholders who own 5% or more of the Company's shares. • The ultimate beneficial owner in the ownership of the Company's shares. • Major / controlling shareholders of the Company.

Pelaksanaan GCG 2019

Perseroan telah melaksanakan berbagai hal dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi GCG. Peningkatan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan terlihat dari penyempurnaan yang dilakukan Perseroan sepanjang tahun 2019 yang mencakup berbagai hal:

1. Pembentukan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah serta penerbitan Piagam Komite tersebut.
2. Perubahan struktur organisasi Perseroan terkait dengan penambahan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah, perubahan nama Quality Assurance & Litigation Division menjadi Anti Fraud Division serta perubahan *reporting lines* dari *Division* tersebut menjadi di bawah Presiden Direktur.
3. Memperbaharui Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
4. Memperbaharui *website* Perseroan yang bertujuan untuk mempermudah pemberian informasi bagi *stakeholders* dan masyarakat.
5. Melakukan sosialisasi tata kelola seperti *anti fraud awareness* dan sosialisasi nilai-nilai dasar Perseroan dengan menyampaikan *quotes* terkait dengan nilai-nilai tersebut melalui *email blast family*.
6. Melakukan *online Compliance Culture Assessment* yang dilakukan untuk memahami kondisi budaya kepatuhan.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Indikator pencapaian sasaran diukur dari penilaian tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan baik secara internal maupun eksternal.

1. Penilaian Internal

Merujuk pada POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan SEOJK No.15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, pengukuran penerapan tata kelola dilakukan melalui penilaian sendiri *self assessment* tata kelola perusahaan yang baik.

GCG Implementation in 2019

The Company has implemented various things in order to improve the GCG implementation quality. The improvement in GCG implementation quality in the Company's environment can be seen from the improvements made by the Company throughout 2019 which included various matters:

1. Establishment of Sharia Product and Business Activity Development Committee and issuance of the Committee Charter.
2. Changes in the Company's organizational structure related to the addition of the Sharia Business Product and Business Development Committee, the Quality Assurance & Litigation Division name change to the Anti Fraud Division and the reporting lines change from that Division to under the President Director.
3. Updated the Guidelines for Good Corporate Governance.
4. Updated the Company's website which aims to facilitate the provision of information for stakeholders and the public.
5. To socialize governance such as anti-fraud awareness and the socialization of the Company's basic values by submitting quotes related to these values through an email blast family.
6. Conduct an online Compliance Culture Assessment conducted to understand the compliance culture conditions.

GCG Implementation Assessments

Indicators of achievement of targets are measured from assessments of good corporate governance at the Company both internally and externally.

1. Internal Assessment

Referring to POJK No. 30 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies and SEOJK No.15 / SEOJK.05 / 2016 concerning Reports on the Implementation of Good Governance for Financing Companies, measuring the implementation of governance is done through self-assessment good corporate governance.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Prosedur dan Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri *self assessment* tata kelola perusahaan yang baik dilakukan pada setiap akhir tahun dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan sebagai bagian dari Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilaporkan paling lambat 30 April pada tahun berikutnya.

Sesuai SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Penilaian tersebut meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.
- d. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian *intern*.
- e. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan.
- g. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
- h. Pengungkapan kepemilikan saham.
- i. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi.
- j. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Dewan Komisaris.
- k. Pengungkapan hal-hal penting lainnya.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Perseroan melakukan penilaian sendiri *self assessment* atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit Division, Unit Usaha Syariah, serta fungsi atau unit kerja lainnya yang terkait di Perseroan untuk menghasilkan penilaian yang komprehensif dan terstruktur atas efektivitas penerapan tata kelola Perseroan.

Assessment Procedures and Criteria

Self-assessment of good corporate governance is carried out at the end of each year and reported to the Financial Services Authority as part of the Report on the Implementation of Good Corporate Governance which is reported no later than April 30 the following year.

In accordance with SEOJK No. 15/SEOJK.05/2016 concerning Report on the Implementation of Good Governance for Financing Companies, the Company conducts its own assessment of the implementation of good corporate governance. The assessment includes the following:

- a. Implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board.
- b. Completeness and implementation of audit committee duties or functions that assist the Board of Commissioners.
- c. Implementation of the compliance, internal auditor and external auditor functions.
- d. Implementation of risk management and internal control systems.
- e. Implementation of remuneration policies and other facilities.
- f. Transparency of the company's financial and non-financial conditions.
- g. Long-term plans and annual work plans and budgets.
- h. Disclosure of share ownership.
- i. Financial and family relations for the Board of Directors.
- j. Financial and family relations for the Board of Commissioners.
- k. Disclosure of other important matters.

The party conducting the assessment

The Company conducts a self-assessment of the implementation of good corporate governance by involving members of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Internal Audit Division, Sharia Business Unit, and other related functions or work units in the Company to produce a comprehensive assessment and structured on the effectiveness of the implementation of corporate governance.

2. Penilaian pelaksanaan penerapan GCG oleh pihak eksternal

Pada tahun 2019, Perseroan mengikuti penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Perseroan yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu majalah *Top Business* yang bekerjasama dengan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), Asia Business Research Center dan Economic Review.

Top Governance, Risk, Compliance Award

Penghargaan diberikan kepada Perseroan yang dinilai berkinerja baik dan telah menerapkan *Governance, Risk, Compliance* dalam pengelolaan usaha bisnisnya.

a. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah Tim Penilai dan Dewan Juri yang ditunjuk oleh majalah *Top Business* yang bekerjasama dengan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), dan Asia Business Research Center.

b. Kriteria Penilaian

Aspek penilaian meliputi antara lain infrastruktur, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan di Perseroan.

c. Hasil Penilaian

Perseroan berhasil meraih penghargaan TOP GRC 2019 #4 Stars dengan rincian sebagai berikut:

Kategori : All Company
Sektor : Multifinance
Nilai : 8.11 (dari total nilai 10)
Tingkat : *Very Good*
Penilaian Kembali: Top GRC 2019 #Star 4
(Sistem, infrastruktur, implementasi tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan di Perseroan).

2. Assessment of the implementation of GCG implementation by external parties

In 2019, the Company participated in an evaluation of the implementation of good corporate governance in the Company conducted by external parties, namely the *Top Business* magazine in collaboration with KNKG (National Committee on Governance Policy), IRMAPA (Indonesian Risk Management Professional Association), ICoPI (Indonesian Institute of Professional Compliance), Asia Business Research Center and Economic Review.

Top Governance, Risk, Compliance Award

The award given to the Company that is considered to be performing well and has implemented *Governance, Risk, and Compliance* in managing its business ventures.

a. The party conducting the assessment

The parties conducting the assessment are the Assessment Team and the Judges appointed by *Top Business* magazine in collaboration with KNKG (National Committee on Governance Policy), IRMAPA (Indonesian Risk Management Professional Association), ICoPI (Indonesian Compliance Professional Institute), and Asia Business Research Center.

b. Assessment Criteria

The assessment aspects include infrastructure, implementation of good corporate governance, risk management and compliance management in the Company.

c. Rating results

The Company won the TOP GRC 2019 # 4 Stars award with the following details:

Category : All Company
Sector : Multifinance
Rating : 8.11 (dari total nilai 10)
Level : *Very Good*
Reappraisal : Top GRC 2019 #Star 4
(Systems, infrastructure, implementation of good corporate governance, risk management and compliance management in the Company).

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

3. Indonesia Good Corporate Governance Award 2019

Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi penghargaan tertinggi yang diberikan kepada perusahaan di bidang GCG di Indonesia.

a. Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian adalah Dewan Juri dari antara lain IPMI International Business School, PQI Consultant, Perbanas Institute, Indonesia – Asia Institute, dan Majalah Economic Review.

b. Kriteria Penilaian

Aspek penilaian meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

c. Hasil Penilaian

Perseroan berhasil meraih penghargaan 2nd – The Best Indonesia GCG Implementation – 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Kategori	: Public Company
Sektor	: Multifinance
Nilai	: 85
Tingkat	: 1 (Kelompok Tbk)
Penghargaan	: Platinum
Penilaian Kembali	: Very Excellent

3. Indonesia Good Corporate Governance Award 2019

The award was given as a form of appreciation for the highest award given to companies in the field of GCG in Indonesia.

a. The party conducting the assessment

The parties conducting the evaluation were the Jury from among others IPMI International Business School, PQI Consultant, Perbanas Institute, Indonesia - Asia Institute, and Economic Review Magazine.

b. Assessment criteria

The assessment aspects include the application of good corporate governance.

c. Rating results

The Company won the 2nd award - The Best Indonesia GCG Implementation - 2019 with details as follows:

Category	: Public Company
Sector	: Multifinance
Score	: 85
Level	: 1 (Public Company Group)
Award	: Platinum
Reappraisal	: Very Excellent

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, maka Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan setiap tahun minimum 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan dengan metode penilaian kinerja secara *self assessment*.

Board of Commissioners and Board of Directors' Performance Assessment

In order to comply with the provisions of POJK No. 21/POJK.04/2015 concerning the Implementation of the Guidelines for Public Company Governance and SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Good Corporate Governance Public Company, the Company has a policy of evaluating Directors and Board of Commissioners.

1. Performance Evaluation of the Board of Commissioners

Procedures and Criteria for Appraisal of the Board of Commissioners' Performance

The performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out every year a minimum of 1 (one) time a year which is carried out using the performance assessment method by self assessment.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Penilaian kinerja kolegal Dewan Komisaris

Kriteria penilaian kinerja kolegal Dewan Komisaris meliputi:

1. Tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Komposisi Dewan Komisaris.
3. Remunerasi Dewan Komisaris.
4. Tingkah Laku Dewan Komisaris.
5. Interaksi dan komunikasi Dewan Komisaris.
6. Presiden Komisaris.
7. Administrasi dan Proses Dewan Komisaris.
8. Training anggota Dewan Komisaris pada tahun ini.
9. Training anggota Dewan Komisaris pada tahun yang akan datang.
10. BOC *retreat session*.

b. Penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan penilaian kinerja dari masing-masing Dewan Komisaris terhadap Dewan Komisaris lainnya

Kriteria penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris dan penilaian kinerja dari masing-masing Dewan Komisaris terhadap Dewan Komisaris lainnya meliputi:

1. Mengidentifikasi dari *key skills*, pengalaman, dan pengalaman bekerja yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. *Rating* kinerja anggota Dewan Komisaris Untuk menilai kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris itu sendiri dengan menggunakan sistem *grading* yang telah disediakan dan untuk mengevaluasi kinerja dari anggota Dewan Komisaris lainnya *peer evaluation*.
3. Penilaian Komisaris Independen Untuk menilai mengenai apakah Komisaris Independen menunjukkan nilai dan prinsip yang terkait dengan independensi selama diskusi Dewan Komisaris.

The criteria used in evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:

a. Board of Commissioners collegial performance evaluation

The Board of Commissioners collegial performance appraisal criteria includes:

1. Responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Composition of the Board of Commissioners.
3. Remuneration of the Board of Commissioners.
4. Board of Commissioners Conduct.
5. Interaction and communication of the Board of Commissioners.
6. President Commissioner.
7. Administration and Process of the Board of Commissioners.
8. Training for members of the Board of Commissioners this year.
9. Training of members of the Board of Commissioners in the coming year.
10. BOC *retreat session*.

b. Individual performance evaluation of each member of the Board of Commissioners and performance evaluation of each Board of Commissioners for the other Board of Commissioners

The criteria for evaluating the individual performance of each member of the Board of Commissioners and the performance evaluation of each Board of Commissioners towards the other Board of Commissioners includes:

1. Identifying the key skills, experience, and work experience possessed by each member of the Board of Commissioners.
2. Performance rating of members of the Board of Commissioners To assess the performance of each member of the Board of Commissioners themselves using the grading system that has been provided and to evaluate the performance of other members of the Board of Commissioners (*peer evaluation*).
3. Rating of Independent Commissioners To assess whether an Independent Commissioner shows values and principles related to independence during the Board of Commissioners' discussion.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris secara Kolegial.
Penilaian dilakukan oleh masing-masing Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.
- b. Penilaian Kinerja Individu Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris.
Masing-masing Komisaris memberikan penilaian atas kinerjanya sendiri.
- c. Penilaian Kinerja dari Masing-Masing Dewan Komisaris terhadap Dewan Komisaris lainnya.
Masing-masing Komisaris memberikan penilaian kinerja kepada setiap anggota Dewan Komisaris lainnya.

Untuk evaluasi akan dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi yang hasil evaluasinya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yang berlaku di Perseroan.

Kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi antara lain:

- a. *Maximized shareholder value.*
- b. *Optimized Network.*
- c. *Increased Business Growth.*
- d. *Optimized Portfolio Quality.*
- e. *Optimized OPEX.*
- f. *Improve Corporate Event/Program.*
- g. *Customer Satisfaction.*
- h. *Optimize technology as a business enabler.*
- i. *Improve Compliance Management.*
- j. *Increase employee satisfaction & engagement.*
- k. *Improve Readiness Talent pool.*

Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja Direksi

Direksi akan melakukan evaluasi kinerja Direksi secara mandiri untuk kemudian disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Komite Nominasi dan Remunerasi akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Struktur Tata Kelola

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Struktur Tata Kelola Perusahaan di Perseroan disusun dengan tujuan untuk menetapkan kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, mekanisme dan

The Party Conducting the Performance Evaluation of the Board of Commissioners

The parties evaluating the performance of the Board of Commissioners are as follows:

- a. Collegial Performance Evaluation of the Board of Commissioners.
The assessment is carried out by each Commissioner on the overall performance of the Board of Commissioners.
- b. Individual Performance Assessment of Each Member of the Board of Commissioners.
Each Commissioner provides an assessment of its own performance.
- c. Performance Appraisal of Each Board of Commissioners towards other Board of Commissioners.
Each Commissioner provides a performance appraisal to every other member of the Board of Commissioners.

The evaluation will be conducted by the Nomination and Remuneration Committee whose evaluation results will be submitted to the Board of Commissioners.

2. Assessment of Board of Directors' Performance

Board of Directors' Performance Evaluation Criteria and Procedures

The performance evaluation of the Directors is carried out annually based on the Key Performance Indicator (KPI) in force in the Company.

The criteria used to assess the performance of the Board of Directors include:

- a. Maximized shareholder value.
- b. Optimized Network.
- c. Increased Business Growth.
- d. Optimized Portfolio Quality.
- e. Optimized OPEX.
- f. Improve Corporate Events / Programs.
- g. Customer Satisfaction.
- h. Optimize technology as a business enabler.
- i. Improve Compliance Management.
- j. Increase employee satisfaction & engagement.
- k. Improve Readiness Talent pool.

The party conducting the Performance Evaluation of the Board of Directors

The Board of Directors will evaluate the performance of the Board of Directors independently and then submit it to the Nomination and Remuneration Committee for evaluation. The evaluation results of the Nomination and Remuneration Committee will be submitted to the Board of Commissioners.

Governance Structure

Referring to the applicable rules and regulations, the Company's Governance Structure was established to determine clarity in duties and responsibility distribution, decision making and reporting mechanism and flow.

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

alur pelaksanaan pengambilan keputusan serta pelaporan. Struktur Tata Kelola Perusahaan di Perseroan adalah berupa skema organ Tata Kelola yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Organ tertinggi hingga Unit Kerja Pendukung Tata Kelola yang ada di Perseroan.

The Company's Governance Structure is in the form of Governance Organ Scheme consisting of General Meeting of Shareholders as the highest Organ to the Governance Supporting Work Unit in the Company.



Struktur tata kelola perusahaan di Perseroan terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Komite dibawah Direksi yaitu: Komite Manajemen Risiko.
7. Sekretaris Perusahaan.
8. Risk Management Division, Legal Corporate Litigation & Compliance Division, Internal Audit Division.

The Company's governance structure consists of:

1. General Meeting of Shareholders (GMS).
2. Board of Commissioners.
3. Board of Directors.
4. Sharia Supervisory Board.
5. BOC Committees, namely: Audit Committee, Risk Oversight Committee, Nomination and Remuneration Committee.
6. BOD Committees, namely: Risk Management Committee.
7. Corporate Secretary.
8. Risk Management Division, Legal Corporate Litigation & Compliance Division, Internal Audit Division.

Rencana Penerapan GCG Tahun 2020

Aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka menerapkan GCG di Perseroan pada tahun 2020 sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Perseroan telah dilakukan peningkatan secara berkelanjutan.
2. Penyelarasan visi dan/atau misi Perseroan dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha Perseroan.
3. Melengkapi dan/atau menyempurnakan kebijakan internal terkait GCG dalam rangka penyesuaian kebijakan dengan adanya penyelarasan visi dan/atau misi Perseroan.
4. Melaksanakan penilaian sendiri atas pelaksanaan GCG di Perseroan untuk mengukur efektivitas penerapan GCG yang dilakukan Perseroan dan melakukan tindaklanjut yang diperlukan terhadap hasil penilaian sendiri tersebut.

GCG Key Plans in 2020

The activities that will be carried out to implement GCG in the Company in 2020 are as follows:

1. The implementation of GCG principles in the Company has been continuously improved.
2. Aligning the Company's vision and/or mission in the context of implementing sustainable finance in the Company's business activities.
3. Completing and/or refining the internal policies related to GCG in the context of policy adjustments by aligning the Company's vision and/or mission
4. Conduct self-assessment of GCG implementation in the Company to measure its effectiveness and carry out the necessary actions on the self-assessment results.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

- RUPS Tahunan ("RUPST") yang diselenggarakan tiap tahun dengan ketentuan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Rapat.

RUPS Perseroan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

Dalam mengambil keputusan, RUPS Perseroan harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur dan kepentingan pemegang saham minoritas.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham Dalam RUPS

RUPS merupakan wadah bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk keperluan pemeriksaan tahun buku berjalan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Company's organ that has the untransferrable authorities to the Board of Commissioners or Board of Directors, within the limits as set out in the Company Law and/or the Company's Articles of Association.

The Company's GMS consists of:

- The Annual GMS ("AGMS") that shall be held annually at the latest 6 (six) month following the closing of the Company's fiscal year.
- Other GMS, namely the Extraordinary GMS ("EGMS") as stated in the Company's Articles of Association that shall be held at anytime based on Meeting requirements.

The Company's GMS shall be convened according to prevailing laws and regulatories as well as the Company's articles of association.

In the decision making, the Company's GMS shall maintain all parties' interests, specifically the interest of Debtors, Creditors and minority shareholders' interest.

Shareholders Rights and Authorities in the GMS

The GMS is a forum for the shareholders' to take decision with due observance to and abiding to the rules of the articles of association, Company Law as well as relevant regulatories.

The shareholders' authorities in the GMS among others include:

1. To approve the amendment of the Company's Articles of Association;
2. To appoint and terminate members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and members of Sharia Supervisory Board ;
3. To appoint the public accountant firm for the audit of relevant fiscal year;
4. Other matters that are proposed accordingly in the GMS in accordance with the rules of the Articles of Association.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS.
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukan bagi pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

The shareholders' rights in the GMS are:

1. The rights to attend and vote in the GMS.
2. In the GMS, the shareholders have the right to attain meeting agenda and relevant material on the meeting agenda to the extent that it is not against the interests of Company.
3. To accept part of the Company's profit intended for the shareholders in a form of dividend and other profitability distribution according to the prevailing regulatory.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS

Pada tahun 2019, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 12 Maret 2019 dan 2 (dua) kali RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 12 Maret 2019 dan 10 Oktober 2019.

GMS Convention Mechanisms

In 2019, the Company has convened 1 (one) AGMS on March 12, 2019, and 2 (two) EGMS which convened on March 12, 2019 and October 10, 2019.

Mekanisme penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The 2019 AGMS and EGMS convention mechanisms have been implemented in accordance with the Company's Articles of Association, POJK No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Companies and POJK No.10/POJK.04/2017 dated 14 March 2017 on the Amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 on the Plan and Convention of the General Meeting of Shareholders for Public Companies.

Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 12 Maret 2019

Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated March 12, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatory
Pemberitahuan RUPST & RUPSLB kepada Regulator	Surat pemberitahuan rencana RUPST & RUPSLB kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia (<i>e-Reporting</i>) pada tanggal 24 Januari 2019.	Pemberitahuan mengenai mata acara RUPST & RUPSLB yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPST & RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPST & RUPSLB.
AGMS & EGMS Notification to the Regulators	Notification letter of the AGMS & EGMS plan to OJK and Bursa Efek Indonesia e-Reporting on January 24, 2019.	Notification on the AGMS & EGMS agenda in clarity and detailed as well as submitted at the latest 5 (five) working-days prior to the AGMS & EGMS announcement, excluding the announcement date.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 12 Maret 2019

Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated March 12, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulations
<p>Pengumuman RUPST & RUPSLB AGMS & EGMS Announcement Date</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 01 Februari 2019; • Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 01 Februari 2019; • Diunggah pada situs web bursa efek pada tanggal 01 Februari 2019; • Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK pada tanggal 01 Februari 2019 dan Bursa Efek Indonesia <i>e-Reporting</i> pada tanggal 01 Februari 2019. • Announced in Investor daily newspaper on February 1, 2019; • Uploaded in the Company's website on February 1, 2019; • Uploaded in the stock exchange website on February 1, 2019; • Announcement proof was submitted to OJK on February 1, 2019 and Indonesia Stock Exchange <i>e-Reporting</i> on February 1, 2019. 	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPST & RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan.</p> <p>Bukti pengumuman RUPST& RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPST & RUPSLB.</p> <p>Submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 14 (fourteen) days prior to the AGMS & EGMS invitation date, excluding the notification and invitation dates.</p> <p>The AGMS & EGMS announcement proof is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days following the announcement.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 12 Maret 2019

Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated March 12, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the AGMS & EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulations
<p>Panggilan RUPST & RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPST & RUPSLB</p> <p>AGMS & EGMS Invitation including the agenda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 18 Februari 2019; • Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 18 Februari 2019; • Diunggah pada situs web bursa efek pada tanggal 18 Februari 2019; • Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK pada tanggal 18 Februari 2019 dan Bursa Efek Indonesia <i>e-Reporting</i> pada tanggal 18 Februari 2019. • Announced in Kontan daily newspaper on February 18, 2019; • Uploaded in the Company's website on February 18, 2019; • Uploaded in the stock exchange website on February 18, 2019; • Announcement proof was submitted to OJK on 18 February 2019 and Indonesia Stock Exchange e-Reporting on February 18, 2019. 	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPST & RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPST & RUPSLB.</p> <p>Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.</p> <p>Submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 21 (twenty one) days prior to the AGMS & EGMS convention date, excluding the invitation and the AGMS & EGMS dates.</p> <p>The AGMS & EGMS invitation proof is submitted to OJK at the latest 2 (two) working days following the invitation.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPST dan RUPSLB Tanggal 12 Maret 2019

Stages of the AGMS and EGMS Convention Dated March 12, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS
<p>Penyelenggaraan RUPST & RUPSLB AGMS & EGMS Convention</p>		
<p>Tanggal 12 Maret 2019 Dated March 12, 2019</p>		
<p>Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB</p> <p>AGMS & EGMS Minutes of Meeting Summary</p>	<p>Pengumuman Ringkasan risalah rapat</p> <p>Minutes of Meeting Announcement</p> <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 14 Maret 2019; Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB diunggah pada situs web Perseroan dan situs bursa efek pada tanggal 14 Maret 2019. The AGMS & EGMS meeting minutes summary was announced in Investor daily newspaper on March 14, 2019; The AGMS & EGMS meeting minutes summary was uploaded in the Company's and stock exchange's websites on March 14, 2019. 	<p>Ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.</p> <p>The AGMS & EGMS meeting minutes summary is submitted at least through 1 (one) national daily newspaper of Indonesian language, Stock Exchange and the Company's websites in Indonesian and English languages at the latest 2 (two) working days following the AGMS & EGMS convention.</p>
<p>Laporan ke Regulator</p> <p>Report to the Regulators</p>	<p>Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 Maret 2019.</p> <p>The announcement proof of the AGMS & EGMS meeting minutes summary was submitted to OJK on March 14, 2019.</p>	<p>Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPST & RUPSLB disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.</p> <p>The announcement proof of the AGMS & EGMS meeting minutes summary is submitted at least 2 (two) working days after the announcement.</p>
<p>Risalah RUPST & RUPSLB</p> <p>AGMS & EGMS Minutes of Meeting</p>	<p>Akta Risalah RUPST & RUPSLB dari Notaris disampaikan ke OJK pada tanggal 10 April 2019.</p> <p>The AGMS & EGMS Minutes of Meeting Deed was submitted to OJK on April 10, 2019.</p>	<p>Akta Risalah RUPST & RUPSLB disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPST & RUPSLB.</p> <p>The AGMS & EGMS Minutes of Meeting Deed is submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days following the AGMS & EGMS convention.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Pelaksanaan RUPST & RUPSLB

AGMS & EGMS Convention

Tanggal dan Waktu Date and Time	: 12 Maret 2019 / 10.17 – 11.31 WIB March 12, 2019 / 10.17 – 11.31 Western Indonesian Time
Tempat Venue	: Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Kuorum Quorum	: RUPST dihadiri oleh 2.387.382.067 saham (68,57%) dari total 3.481.481.480 saham. RUPSLB dihadiri oleh 3.220.734.167 saham (92,51%) dari total 3.481.481.480 saham
Pimpinan RUPS GMS Chairman	: I Nyoman Tjager Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including President Commissioner	: a. I Nyoman Tjager b. Thilagavaty Nadason c. Myrnie Zachraini Tamin
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including President Director	: a. Djaja Suryanto Sutandar b. Simon Tan Kian Bing c. Zacharia Susantadiredja d. Anthony Y Panggabean e. Njauw Vido Onadi
Notaris Notary	: Leolin Jayayanti, SH, M.Kn,
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Total shareholders submitting questions and/or providing opinions	: Nihil / Nil
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST AGMS decision making mechanisms	: Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham, dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pada pemegang saham yang mengeluarkan suara. The decision making mechanisms is orally conducted by requesting the shareholders and/or its proxies to raise hand for dis-approved voting and abstain, whereas the approved voting are not requested to raise hand. Abstain voting is considered as the same voting with majority voting from the shareholders.

Agenda, Hasil & Realisasi RUPST

AGMS Agenda, Resolutions & Realizations

Agenda 1

Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2018.

The Company's Activity Report Fiscal Year 2018.

Hasil

Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2018.

Resolutions

Approved and accepted the Company's Activity Report Fiscal Year 2018.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Agenda 2

Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Ratification of the Company's Annual Calculation for the Fiscal Year ending on December 31, 2018.

Hasil

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, Firma anggota dari *Ernst & Young Global Limited* sebagaimana ternyata dari laporan Auditor Independen tertanggal 13 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya *acquit et de charge* kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2018 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2018. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2018, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Resolutions

- Approved and accepted ratified the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018, which were audited by the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, a Member Firm of Ernst & Young Global Limited as stated in the Auditor's report dated 13 February 2019 with "Fair in all materials" opinion.
- Granted release and discharge (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company who were in office during the year 2018 for any management and supervisory actions undertaken during the Financial Year of 2018. Provided that the management and supervisory actions referred to above have been reflected in the Company's books and accounts during the financial year 2018, and such actions did not count as criminal acts.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Determination of the Use of the Company's Profit for the Fiscal Year ending on December 31, 2018.

- Penetapan pembagian dividen final tunai.
- Penetapan dana untuk disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan.
- Penetapan penggunaan laba bersih setelah pembagian dividen dan dana cadangan perseroan

- Determination of the distribution of cash final dividends
- Determination of funds to be set aside as a reserve fund of the Company.
- Determination of the net profit use after the distribution of dividends and reserve funds of the company

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Agenda 3

Hasil

- Sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan;
- Sebesar Rp 64.554.702.879,9 (enam puluh empat miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan Rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) lembar saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp 18,5 (delapan belas koma lima Rupiah) per saham;
- Sisa dari laba bersih sebesar Rp 149.627.640.053,- (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima puluh tiga Rupiah) akan dicatat sebagai Laba ditahan.

Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2018 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2018 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Maret 2019.
- Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 12 April 2019 dengan cara membayar dividen tunai *cash dividen* sekitar sebesar Rp 18,5 (delapan belas koma lima Rupiah) setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Realisasi

Telah direalisasikan

Resolutions

- Appropriated a balance of Rp1,000,000,000.- (one billion Rupiah from the Company's net income to be allocated as general reserve in order to comply with the provisions of Article 70 paragraph (1) of Law No. 4 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- Amounted to Rp 64.554.702.879,9, - (sixty four billion five hundred fifty four million seven hundred two thousand eight hundred seventy nine point nine rupiah) or 30 (thirty percent) Net Profit company to pay the dividend in cash of the fiscal year 2018 which will be distributed to 3,481,481,480 (three billion four hundred eighty one million four hundred and eighty one thousand four hundred and eighty) shares and each share receives a dividend of Rp.18.5 (eighteen point five rupiah) per share;
- The remaining net income of Rp 149.627.640.053, - (one hundred forty nine billion six hundred twenty seven million six hundred and forty thousand fifty three rupiah) to be recorded as Retained Earnings.

Approve the distribution of cash dividends for the fiscal year 2018, subject to the following conditions:

- Cash Dividend will be distributed to the shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Registration as per recording date on March 22,2019.
- Cash dividend will be pain on April 12, 2019 of Rp.18.5 (eighteen point five rupiah) per share. The cash dividend shall be subjected to taxes in accordance with the prevailing Tax Regulations.
- Provided the power of attorney with the right of substitution to the Company's Board of Directors to implement all matters related to such dividend.

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Agenda 4

Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Appointment of Public Accountant to audit the Company's Financial Statements ended 31 December 2019.

Hasil

- Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, Firma anggota dari Ernst & Young Global Limited dalam rangka pelaksanaan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp 608.000.000,- (enam ratus delapan juta Rupiah) dengan syarat syarat yang dianggap baik.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).

Resolutions

- Appoint Purwanto, Sungkoro & Surja a Member Firm of Ernst & Young Global Limited in the implementation of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2019. With the implementation service fee of Rp 608.000.000 (six hundred eight million rupiah) with good requirements.
- For the purpose stated above, the GMS further granted the power and authority with the power to delegate to the Company's Board of Directors to undertake all actions required with regard to the appointment of the Public Accountant Firm mentioned, including to inform and announce such appointment to the public (if deemed necessary).

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Agenda 5

Penetapan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Determination of the division of duties and authority of the members of the Company's Directors for Fiscal Year 2019.

Hasil

Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun buku 2019 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat 6 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.

Resolutions

The right to determine the duties and authorities of the members of the Company's Board of the Directors for the Financial Year 2019 was proposed to be entrusted to the Company's Board of Directors, with due consideration to the provisions of Article 92 paragraph 6 (six) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, by firstly obtaining the approval from the Company's Board of Commissioners.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Agenda 6

Penetapan besarnya uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

Stipulation of service fees amount and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board, as well as the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018.

Hasil

- Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019.
- Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019.

Resolutions

- Whereas the right to determine the remuneration and other benefits for the members of the Company's Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board was proposed to be entrusted to the Company's President Commissioner, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Board of Commissioners and members Sharia Supervisory referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2019.
- Further granted the power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other benefits for the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2019, with due consideration to the proposal and recommendations from the Company's Remuneration and Nomination Committee and the amount of remuneration and/or benefits in any other form that have been determined for the members of the Company's Board of Directors referred to above shall be disclosed in the Annual Report for the financial year of 2019.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Agenda 7

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama 2018:

- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap I Tahun 2018.

Realization Report on the Use of Funds from the Company's Public Offering during 2018:

- Sustainable Bonds II of WOM Finance Phase IV Year 2018;
- Sustainable Bonds II of WOM Finance Phase V Year 2018;
- Sustainable Bonds III of WOM Finance Phase I Year 2018

Hasil

Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV dan V Tahun 2018 serta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2018.

Resolutions

Approved and accepted the Realization Report, Public Offering of Sustainable Bonds II of WOM Finance, Phase IV and V of 2018 and the Public Offering of Sustainable Bonds III of WOM Finance, Phase I as contained in the Company's Activities Report of 2017 Fiscal Year. The report had been submitted to the Financial Services Authority and its summary had been presented in the Meeting.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Agenda, Hasil & Realisasi RUPSLB

EGMS Agenda, Resolutions & Realizations

Agenda 1

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3

Amendment to the Company's Articles of Association especially Article 3

Hasil

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3.
- Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resolutions

- Approve changes of Articles of Association, especially article 3.
- Delegating authority and power to the Board of Director to determine the remaining and/or reaffirmed in a Notarial Deed (including changes and / or additions) related to change provisions of Articles of Association and also provided authority and power of attorney with substitution right to the Notary to submit the notification/registration to related institution and therefore also submit applications for other documents; in short to perform any other necessary actions in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Agenda 2

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syariah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2019.

Approval of the Company's plan to transfer rights or guarantee most or all of the Company's receivables in the context of obtaining loans and / or funding (including sharia) from bank financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) or non-banks both domestic and foreign countries are included in the framework of the Public Offering of Sustainable Bonds in Fiscal Year 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Agenda 2

Hasil

- Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank DBS Indonesia serta atas rencana Perseroan untuk mengalihkan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syari'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2019 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB III sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp4.429.500.000.000,- (empat triliun empat ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) dalam beberapa tahap pada tahun buku 2019.
- Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas.

Resolutions

- Approving the action of the Board of Directors to utilize majority or all of the assets of the Company, in the form of receivables from the financing granted by the Company in connection with loans and/or financing from PT Bank DBS Indonesia, as well as the Company's plan to divert, release or to place as collateral the majority or entire receivables of the Company, in an effort to obtain loans and/or funding (including sharia) from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as non banks, locally or overseas in Fiscal Year 2019, including to place as collateral due to the issuance of public offering of sustainable Bonds III to the highest amount of Rp 4.429.500.000.000,- (four trillion four hundred twenty nine billion five hundred million rupiah) in several phases in fiscal year 2019.
- Granting authority and power with the right of substitution to the Board of Directors to take any necessary actions the issuance including providing guarantee majority or all receivables of the Company as mentioned point 1 (one) above.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Oktober 2019

Stages of the EGMS Convention Dated October 10, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatory
Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator EGMS Notification to the Regulators	Surat pemberitahuan rencana RUPSLB kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia e-Reporting pada tanggal 27 Agustus 2019. Notification letter of the EGMS plan to OJK and Indonesia Stock Exchange e-Reporting on August 27, 2019.	Pemberitahuan mengenai mata acara RUPSLB yang diungkapkan secara jelas dan rinci serta disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPSLB. Notification on the EGMS agenda in clarity and detailed as well as submitted at the latest 5 (five) working-days prior to the EGMS announcement, excluding the announcement date.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Oktober 2019

Stages of the EGMS Convention Dated October 10, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatories
Pengumuman RUPSLB EGMS Announcement Date	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 03 September 2019; • Announced on Daily Investor daily newspaper on September 03, 2019. • Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 03 September 2019; • Uploaded to the Company Website on September 03, 2019. • Diunggah pada situs web bursa efek pada tanggal 03 September 2019; • Uploaded to the Stock Exchange on September 03, 2019. • Bukti pengumuman disampaikan kepada OJK pada tanggal 03 September 2019 dan Bursa Efek Indonesia <i>e-Reporting</i> pada tanggal 03 September 2019. • Proof of announcement submitted to the OJK on September 03, 2019, and Indonesia Stock Exchange e-Reporting on September 03, 2019. 	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal panggilan.</p> <p>Submitted minimally through 1 (one) Indonesian language National daily newspaper, Stock Exchange website and Company official website in Indonesian and English at the latest 14 (fourteen) days before EGMS, without counting the notifying day and the summoning day.</p> <p>Bukti pengumuman RUPSLB disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPSLB.</p> <p>Proof of EGMS announcement submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after EGMS announcement.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Oktober 2019 Stages of the EGMS Convention Dated October 10, 2019

Tahapan Stages	Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatories
<p>Panggilan RUPSLB beserta penjelasan mata acara RUPSLB</p> <p>AGMS & EGMS Invitation including the agenda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 18 September 2019; • Announced on Daily Investor daily newspaper on September 18, 2019. • Diunggah pada situs web Perseroan tanggal 18 September 2019; • Uploaded to the Company Website on September 18, 2019. • Diunggah pada situs web bursa efek pada tanggal 18 September 2019; • Uploaded to the Stock Exchange on September 18, 2019. • Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK pada tanggal 18 September 2019 dan Bursa Efek Indonesia <i>e-Reporting</i> pada tanggal 18 September 2019. • Proof of summoning submitted to the OJK on September 18, 2019, and Indonesia Stock Exchange <i>e-Reporting</i> on September 18, 2019. 	<p>Disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perusahaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPSLB.</p> <p>Submitted minimally through 1 (one) Indonesian language National daily newspaper, Stock Exchange website and Company official website in Indonesian and English at the latest 21 (twenty one) days before EGMS, without counting the summoning day and EGMS day.</p> <p>Bukti pemanggilan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. Proof of summoning submitted to OJK at the latest 2 (two) working days after GMS summoning.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Tahapan Pelaksanaan RUPSLB Tanggal 10 Oktober 2019

Stages of the EGMS Convention Dated October 10, 2019

Tahapan Stages		Pelaksanaan Convention	Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Terkait Penyelenggaraan RUPSLB Perseroan Berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait RUPS Mandatory Rules on the EGMS Based on the Articles of Association and Prevailing GMS Regulatories
Penyelenggaraan RUPSLB EGMS Convention		Tanggal 10 Oktober 2019 Dated October 10, 2019	
Ringkasan Risalah RUPSLB EGMS Minutes of Meeting Summary	Pengumuman Ringkasan risalah rapat Minutes of Meeting Announcement	Ringkasan risalah RUPSLB diumumkan pada surat kabar Harian Investor Daily tanggal 14 Oktober 2019; EGMS Minutes of Meeting Summary announced on Daily Investor daily newspaper on October 14, 2019; Ringkasan risalah RUPSLB diunggah pada situs web Perseroan dan situs bursa efek pada tanggal 14 Oktober 2019. EGMS Minutes of Meeting Summary uploaded to the Company Website and the Stock Exchange website on October 14, 2019;	Ringkasan risalah RUPSLB disampaikan minimal melalui 1 (satu) Surat Kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs Bursa Efek dan situs resmi Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPSLB. EGMS Minutes of Meeting Summary was submitted minimally through 1 (one) Indonesian language national daily newspaper, the Stock Exchange website, and the Company website in Indonesian and English at the latest 2 (two) working days after EGMS.
	Laporan ke Regulator Report to the Regulators	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan kepada OJK pada tanggal 14 Oktober 2019. Proof of EGMS Minutes of Meeting Summary announcement submitted to the OJK on October 14, 2019;	Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPSLB disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Proof of EGMS Minutes of Meeting Summary announcement submitted at the latest 2 (two) working days after being announced.
Risalah RUPSLB EGMS Minutes of Meeting		Akta Risalah RUPSLB dari Notaris disampaikan ke OJK pada tanggal 7 November 2019. Notarial Deed of EGMS minutes submitted to OJK on November 7, 2019.	Akta Risalah RUPSLB disampaikan ke OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPSLB. Notarial Deed of EGMS minutes submitted to OJK at the latest 30 (thirty) working days after EGMS

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Pelaksanaan RUPSLB

EGMS Convention

Tanggal dan Waktu Date and Time	:	10 Oktober 2019 / 10.24 – 10.54 October 10, 2019/ 10.24 - 10.54
Tempat Venue	:	Function Room, Sentral Senayan III Lantai 28, Jl. Asia Afrika No. 8 Kelurahan Gelora Bung Karno - Senayan, Jakarta Pusat 10270
Kuorum Quorum	:	RUPSLB dihadiri oleh 3.220.415.399 saham (92,50%) dari total 3.481.481.480 saham. The EGMS was attended by 3.220.415.399 shares (92.50%) from the total shares of 3,481,481,480
Pimpinan RUPS GMS Chairman	:	I Nyoman Tjager Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner
Kehadiran anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris Attendance of members of the Board of Commissioners including President Commissioner	:	a. I Nyoman Tjager b. Myrnie Zachraini Tamin
Kehadiran anggota Direksi termasuk Presiden Direktur Attendance of members of the Board of Directors including President Director	:	a. Djaja Suryanto Sutandar b. Zacharia Susantadiredja c. Anthony Y Panggabean d. Njauw Vido Onadi
Notaris Notary	:	Leolin Jayayanti, SH, M.Kn,
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Total shareholders submitting questions and/or providing opinions	:	Nihil / Nil
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST AGMS decision making mechanisms	:	Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham, dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pada pemegang saham yang mengeluarkan suara. The decision making mechanisms is orally conducted by requesting the shareholders and/or its proxies to raise hand for dis-approved voting and abstain, whereas the approved voting are not requested to raise hand. Abstain voting is considered as the same voting with majority voting from the shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

Agenda, Hasil & Realisasi RUPSLB

EGMS Agenda, Resolutions & Realizations

Agenda 1

Penggantian Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

The replacement of the Public Accountant who will conduct the audit on The Company's Financial Report which ends on December 31, 2019.

Hasil

- Menunjuk Tuan Muhammad Kurniawan menggantikan tuan Yasir dan tetap menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dengan biaya jasa audit sesuai yang telah diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) pada tanggal 12-03-2019 (dua belas Maret dua ribu sembilan belas) sebesar Rp 608.000.000,00 (enam ratus delapan juta Rupiah) dan dengan syarat-syarat yang dianggap baik.
- Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Tuan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) sebagai Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas), termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan).
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan hal-hal dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik Tuan Muhammad Kurniawan dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) termasuk penetapan syarat-syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Resolutions

- Appointed Mr. Muhammad Kurniawan replaced Mr. Yasir and continued to appoint Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) of each as Public Accountants and Public Accountant Firm in the implementation of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty-one of December two thousand and nineteen) with audit service fees as determined by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2019 (two thousand nineteen) on 12-03-2019 (twelve March two thousand nineteen) of Rp 608.000.000, - (six hundred eight million rupiah) with good requirements.
- Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in relations with the appointment of, Mr. Muhammad Kurniawan as a Public Accountant and Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) as Public Accountants Firm in the implementation of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty one of December two thousand and nineteen), including to notify and announce to the public (if necessary).
- Granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to undertake all actions required in relations with the appointment of substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm in terms of Public Accountant Muhammad Kurniawan and/or Public Accountant Firm Purwanto, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) because any cause can't finished audit of the Company's Financial Audit for the year ended December 31, 2019 (thirty one of December two thousand and nineteen), including the establishment of other requirements on appointment of substitute Public Accountant and/or Public Accountant Firm with regard to the recommendation of the Audit Committee and the prevailing regulatories.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting Of Shareholders

Agenda 2

Perubahan susunan Direksi Perseroan.

The change in the Board of Directors composition.

Hasil

- Memberhentikan Tuan Simon Tan Kian Bing dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 15-07-2019 (lima belas Juli dua ribu sembilan belas).
- Menyetujui untuk mengangkat Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ketentuan bahwa pengangkatan Tuan Wibowo sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar;
 Direktur : Tuan Zacharia Susantadiredja;
 Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean;
 Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi;
 Direktur : Tuan Wibowo;
- Pengangkatan Tuan WIBOWO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang.

Resolutions

- Approve the termination of Mr Simon Tan Kian Bing from his position as Independent Director of the Company effective as of the date of 15-07-2019 (fifteenth of July two thousand and nineteen)
- Approved to appoint Mr. Wibowo as Director of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 (two thousand and twenty), provided that the appointment of Mr. Wibowo as Director of the Company will be effective after obtaining approval from the Service Authority Finance.
- Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the Company's Directors is as follows:
 President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar;
 Director : Mr. Zacharia Susantadiredja;
 Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean;
 Director : Mr. Njauw Vido Onadi;
 Director : Mr. Wibowo;
- The appointment of Mr. Wibowo as Director of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020 (two thousand and twenty), provided that the appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority.
- Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in relations with the changed of composition of members of the Company's Board of Directors to restate and/ or reaffirm in the Notary deed in relations with the changed of composition of members of the Company's Board of Directors including to notify and announce to the public (if necessary), and to apply for registration, obtain notification of receipt or submit approval from the authorized institutions.

Realisasi

Telah direalisasikan

Realizations

Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPST DAN RUPSLB TAHUN SEBELUMNYA RESOLUTION AND REALIZATION OF PREVIOUS YEAR AGMT AND EGMS

AGENDA	KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 ANNUAL GMS RESOLUTIONS 2018	TELAH DIREALISASIKAN HAS BEEN REALIZED
Pertama First	Menyetujui dan menerima Laporan Kegiatan Perseroan Tahun Buku 2018. Approve and receive the 2018 Company Activity Report.	Telah direalisasikan Has been realized
Kedua Second	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) sebagaimana ternyata dari laporan Auditor tertanggal 15 Februari 2018 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya <i>acquit et de charge</i> kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun 2017 atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017. Sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasannya dimaksud tercermin dalam buku dan catatan Perseroan sepanjang tahun buku 2017, selama tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Approved and ratified the Company's Annual Financial Statements for Fiscal Year ended December 31, 2017 that has been audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) as stated in the Auditor report dated February 15, 2018 with the opinion "Fair in all material respects". Provided full release and discharge (<i>acquit et de charge</i>) to members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company that served in 2017 over the management and oversight of the Company carried out throughout the Financial Year 2017. To the extent that such management actions and supervisory were reflected in the Company's books and notes throughout 2017, and are not a criminal offense. 	Telah direalisasikan Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

AGENDA	KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 ANNUAL GMS RESOLUTIONS 2018	TELAH DIREALISASIKAN HAS BEEN REALIZED
Ketiga Third	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar Rp1.000.000.000 dari laba bersih Perseroan untuk digunakan sebagai dana cadangan umum guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; • Maksimal sebesar Rp54.199.516.202,1 atau 30% dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 yang akan dibagikan kepada 3.481.481.480 saham, sehingga setiap saham memperoleh dividen atau sekitar sebesar Rp15,5 per saham; • Sisa dari laba bersih sebesar Rp125.465.537.805 akan dicatat sebagai Laba ditahan; dan • Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2017 adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2018. - Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 18 April 2018 dengan cara membayar dividen tunai <i>cash dividend</i> sejumlah Rp15,5 setiap saham. Untuk pembagian dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib dipotong Perseroan. - Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. • Amounted to Rp1,000,000,000 from the Company's net profit to be used as reserve fund to fulfill the provision of Article 70 paragraph (1) Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company and article 24 of the Company's Articles of Association; • Maximum at Rp54,199,516,202, 1 or 30% from the Company's net profit shall be distributed as cash dividend for fiscal year 2017 that shall be distributed to 3,481,481,480 shares, thereby every share will receive a dividend or approximately at Rp15.5 per share; • The rest of net profit amounted to Rp125,465,537,805 will be posted as Retained Earnings; and • Approved the cash dividend payout for fiscal year 2017 with the following rules: <ul style="list-style-type: none"> - The shareholders that have the right to accept the cash dividend of fiscal year 2017 are the Company's shareholders recorded in the Company's Shareholders Registry dated 27 March 2018. - Cash dividend will be paid on 18 April 2018 by paying cash dividend totaling Rp15.5 for every share. Taxes are applicable for the dividend payout in accordance with the prevailing rules that shall be deducted by the Company. - Granted power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all matters in relations with the dividend payout as well as to announce it with due observance to the prevailing regulatories. 	Telah direalisasikan Has been realized

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting Of Shareholders

AGENDA	KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 ANNUAL GMS RESOLUTIONS 2018	TELAH DIREALISASIKAN HAS BEEN REALIZED
Keempat Fourth	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Firma anggota <i>Ernst & Young Global Limited</i>) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp579.400.000 dengan syarat-syarat yang dianggap baik. • Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik tersebut, termasuk untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan). • Appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro dan Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) to carry out the Company's Financial Audit for fiscal year ended 31 December 2018. The service fee was at Rp579,400,000 with reasonable terms. • Granted authority and power with substitution rights to the Company's Board of Directors to undertake all actions required in relations with the appointment of such Public Accountant, including to notify and announce to the public (if necessary). 	Telah direalisasikan Has been realized
Kelima Fifth	<p>Pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 diusulkan untuk diserahkan kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 92 ayat 6 (enam) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>The division of duties and authorities of members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018 was proposed to be delegated to the Company's Board of Directors with due observance to the Article 92 paragraph 6 (six) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, with prior approval from the Company's Board of Commissioners.</p>	Telah direalisasikan Has been realized

AGENDA	KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN 2018 ANNUAL GMS RESOLUTIONS 2018	TELAH DIREALISASIKAN HAS BEEN REALIZED
Keenam Sixth	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan uang jasa dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan dan para anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan diusulkan untuk dilimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya uang jasa dan atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018. • Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/ atau tunjangan lain bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan besarnya gaji dan/atau tunjangan dalam bentuk apapun lainnya yang telah ditetapkan bagi para anggota Direksi Perseroan dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018. • The determination of service fees amount and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Sharia Supervisory Board is proposed to be delegated the authority to the Company's President Commissioner by taking into account the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and such amount of service fees and or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Board of Commissioners and members of Sharia Supervisory Board will be stated in the Annual Report fiscal year 2018. • Granted the authority and power to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Directors for Fiscal Year 2018 with due observance to the proposal and recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, and such salary and/or other benefits in any forms that has been stipulated for members of the Company's Board of Directors will be stated in the Annual Report fiscal year 2018. 	Telah direalisasikan Has been realized
Ketujuh Seventh	<p>Menyetujui dan menerima Laporan Realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II dan III Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Laporan Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta yang uraian singkatnya telah disampaikan dalam Rapat.</p> <p>Approved and accepted the Realization Report of the Sustainable Bonds II Public Offering of WOM Finance Phase II and III Year 2017 as stated in the Company's Report that has been submitted to the Financial Services Authority, of which the brief descriptions has been submitted to the Meeting.</p>	Telah direalisasikan Has been realized

AGENDA	KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 2018 EXTRAORDINARY GMS RESOLUTIONS 2018	TELAH DIREALISASIKAN HAS BEEN REALIZED
Pertama First	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan, termasuk didalamnya menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 1 ayat 1. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk perubahan dan/atau penambahan) sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk memohon persetujuan kepada instansi yang berwenang dan karenanya pula mengajukan permohonan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya; singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Approved the changed of the Company's premises, including to approve the amendment of the Company's Articles of Association specifically Article 1 paragraph 1. Delegated the authority and power to the Company's Board of Directors to restate and/or reaffirm in the Notary deed (including the amendment and/or addition) in relations with the amendment of rules in the Company's Articles of Association, as well as granted authority and power to the Company's Board of Directors with substitution rights for the Notary to request the approval to the authorized institutions and as such to also propose other documentations; in brief to undertake all other actions as required in accordance with the rules of the Company's Articles of Association and prevailing regulatories. 	Telah direalisasikan Has been realized
Kedua Second	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar aset Perseroan berupa piutang Perseroan yang timbul dari pembiayaan yang disalurkan Perseroan sehubungan dengan perolehan pinjaman dan/atau pendanaan dari PT Bank Permata Tbk serta atas rencana Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan (termasuk syaria'ah) dari lembaga keuangan bank (termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk) maupun bukan bank baik dalam negeri maupun luar negeri pada Tahun Buku 2018 termasuk pemberian jaminan dalam rangka penerbitan lanjutan PUB II sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.247.000.000.000 dalam beberapa tahap pada tahun buku 2018. Menyetujui atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh piutang milik perseroan yang timbul karena pemberian pembiayaan terkait penerbitan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000.000.000. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan penerbitan obligasi dan pelaksanaannya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diperolehnya pernyataan efektifitas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance dari Otoritas Jasa Keuangan serta pemberian jaminan hutang sebagian besar atau seluruh piutang milik Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas dengan pelaksanaannya sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Approved the Board of Directors action to place as collateral the majority of the Company's assets, i.e. its receivables arising from the financing from the Company in relations with the loans and/or funding from PT Bank Permata Tbk as well as the Company's plan to divert, release or to place as collateral the majority or entire receivables of the Company, in an effort to obtain loans and/or funding (including sharia) from banking financial institutions (including PT Bank Maybank Indonesia Tbk) as well as non banks, locally or overseas in Fiscal Year 2018, including to place as collateral due to the issuance of shelf Bonds public offering II to the highest amount of Rp2,247,000,000,000 in several phases in fiscal year 2018. Approved the Company's plan to place as collateral the majority or entire receivables of the Company arising from the financing related to the Shelf Bonds III WOM Finance up to the highest amount of Rp5,000,000,000,000. Granted power and authority with substitution rights to the Board of Directors to undertake all actions required in regards to the issuance of bonds and its implementations within 2 (two) years effective as of the attainment of Issuance Effectiveness of Shelf Bonds III WOM Finance from the Financial Services Authority, as well as to place as debt collateral for the majority or entire receivables of the Company as stated in point 1 (one) above implemented within a period of 1 (one) year or until the next Annual General Meeting of Shareholders. 	Telah direalisasikan Has been realized

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS

Salah satu organ tata kelola perusahaan di Perseroan yaitu Dewan Komisaris yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi hukum pembentukan dan penunjukan Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perseroan No. 30 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Susunan Dan Komposisi Dewan Komisaris

Susunan dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

No.	Ketentuan di POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Provisions in POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Companies that have more than Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiahs) of assets must have at least 2 (two) members of the Board of Commissioners.	Perseroan memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris. The Company has 5 (five) members of the Board of Commissioners.
2.	Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. The company must have at least 1 (one) member of the Board of Commissioners domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. All members of the Board of Commissioners are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia.

BOARD OF COMMISSIONERS

One of the Good Corporate Governance organs in the Company is the Board of Commissioners which is in accordance with Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, the Board of Commissioners is an organ of the Company whose duties and responsibilities are overseeing management policies, general management of the Company, and provides advice to the Directors.

Legal Basis

The legal basis that becomes the legal reference for the formation and appointment of the Company's Board of Commissioners refers to several provisions including:

1. Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. The Company's Articles of Association.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions.
4. Deed of Decree of the Annual Meeting of the Company No. 30 dated May 31, 2017 made before Rini Yulianti, S.H., Notary in the City of East Jakarta.

Board of Commissioners Composition

The composition the Board of Commissioners members have fulfilled the applicable provisions, as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners

No	Ketentuan di POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komsaris Emiten atau Perusahaan Publik Provisions in POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	<p>Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members of the Board of Commissioners, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners.</p>	<p>2 (dua) orang dari 5 (lima) orang atau 40% dari anggota Dewan Komisaris Perseroan merupakan Komisaris Independen.</p> <p>2 (two) out of 5 (five) members or 40% of the members of the Company's Board of Commissioners are Independent Commissioners.</p>
2.	<p>1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.</p> <p>1 (one) member of the Board of Commissioners shall be appointed as the main commissioner or president commissioner.</p>	<p>Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Komisaris.</p> <p>The Company has 1 (one) President Commissioner.</p>
3.	<p>Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari komite yang menjalankan fungsi nominasi</p> <p>Proposed appointments, terminations and/or replacements of the Board of Commissioners members to the GMS must consider the recommendations of the committee that carries out the nomination function.</p>	<p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>The appointment of the Company's Board of Commissioners' member has taken into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and has obtained approval from the GMS.</p>

Merujuk POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya. Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan).

Pada tahun 2019, tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perseroan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.

Referring to POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions, that prospective members of the Board of Commissioners must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions. All members of the Company's Board of Commissioners have obtained approval from the Financial Services Authority (passed the fit and proper test of the Financial Services Authority).

In 2019, there was no change in the composition of the Board of Commissioners. The composition of the Board of Commissioners of the Company in 2019 has been stated in the Deed of Decree of the Annual Meeting of the Company Number 30 dated May 31, 2017 made before Rini Yulianti, S.H., Notary in the City of East Jakarta.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2019:
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2019:

Jabatan Position	Nama Name	Periode Jabatan Term of Office
Presiden Komisaris/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	I Nyoman Tjager	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner	Robbyanto Budiman	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Komisaris Commissioner	Garibaldi Thohir	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Komisaris Commissioner	Thilagavathy Nadason	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Komisaris Independen Independent Commissioner	Myrnie Zachraini Tamin	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah dihitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020 dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Bagi Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Mengacu pada POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris. Piagam Dewan Komisaris mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris.
4. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Term of Office of the Board of Commissioners

A member of the Board of Commissioners' Term of Office is from the date of the GMS that appointed him/her to the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the date of his/her appointment. The current term of office for members of the Board of Commissioners will end at the close of the Company's Annual GMS in 2020 without prejudice to the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before their term ends. For an Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive periods, he/she may be reappointed in the next period as an Independent Commissioner in terms of stating at the GMS regarding the independence concerned.

Board of Commissioners Charter

Referring to POJK No.33/POJK.04/ 2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Board of Commissioners of the Company has a Board of Commissioners' Charter. The Charter of the Board of Commissioners regulates among others are:

1. Charter Legal basis.
2. Structure and Composition of the Board of Commissioners.
3. Dual Limitation on the Position of Members of the Board of Commissioners.
4. Appointment of Members of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- | | |
|--|---|
| 5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris. | 5. Term of Office of Members of the Board of Commissioners. |
| 6. Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris. | 6. Resignation of Members of the Board of Commissioners. |
| 7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris Berakhir. | 7. Position of Member of the Board of Commissioners ends. |
| 8. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. | 8. Description of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners. |
| 9. Kewenangan Anggota Dewan Komisaris. | 9. Authority of Members of the Board of Commissioners. |
| 10. Waktu Kerja. | 10. Working Time. |
| 11. Keanggotaan dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi. | 11. Membership in the Integrated Governance Committee. |
| 12. Nilai-nilai Dasar (CORE VALUES) dan Etika Kerja. | 12. Basic Values (CORE VALUES) and Work Ethics. |
| 13. Transparansi Kepemilikan Saham dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga. | 13. Transparency in Share Ownership and Disclosure of Financial and Family Relations. |
| 14. Rapat Dewan Komisaris. | 14. Board of Commissioners Meeting. |
| 15. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris. | 15. Performance Evaluation of the Board of Commissioners. |
| 16. Remunerasi. | 16. Remuneration. |
| 17. Sertifikasi dan Syarat Keberlanjutan. | 17. Sustainability Certification and Requirements. |
| 18. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. | 18. Reporting and Accountability. |

Pengungkapan pedoman atau piagam Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang isi Laporan Tahunan yang antara lain menyatakan bahwa uraian Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan mencakup pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam *charter* Dewan Komisaris.

Perseroan telah memiliki Piagam Dewan Komisaris yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 18 April 2018 untuk menjadi rujukan/pedoman bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maupun untuk pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Untuk memastikan Piagam Dewan Komisaris tetap relevan bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Dewan Komisaris diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Piagam Dewan Komisaris dapat dilihat pada *website* Perseroan www.wom.co.id.

Board of Commissioners Guidelines or Charter Disclosure in the Annual Report is based on the SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of the Issuer or Public Company in Chapter III concerning the contents of the Annual Report which among others states that the description of Governance Issuers or Public Companies in the Annual Report include statements that the Board of Commissioners has guidelines or charter of the Board of Commissioners.

The Company has a Charter of the Board of Commissioners which was approved by the Board of Commissioners on 18 April 2018 to be a reference / guideline for members of the Board of Commissioners of the Company in carrying out their duties effectively and efficiently as well as for other parties related to the implementation of the Board of Commissioners' duties.

To ensure the Charter of the Board of Commissioners remains relevant for each member of the Board of Commissioners of the Company, the Board of Commissioners Charter is updated from time to time following the development of laws and best practices.

The Board of Commissioners' charter can be seen on the Company's website www.wom.co.id.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi guna kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
4. Memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris.
5. Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha di semua tingkatan organisasi.
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-Komite. Setiap Komite akan dipandu oleh Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris. Komite-Komite tersebut adalah:
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - iii. Komite Pemantau Risiko.
8. Mengevaluasi kinerja komite terkait pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud angka (7) diatas.
9. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah Perseroan memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
10. Mengkaji visi dan misi Perseroan.
11. Mereview dan menyetujui laporan tahunan Perseroan.
12. Menyusun/memiliki Piagam Dewan Komisaris untuk digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya Perseroan.

Board of Commissioners Duties & Responsibilities

The Board of Commissioners duties and responsibilities among others are:

1. Responsibility in oversight on the Board of Directors' policy in the management of the Company, general management, both on the Company and its businesses, and provide advisory to the Board of Directors for the interest of the Company and in accordance with the Company's purpose and objectives.
2. To direct, monitor and evaluate the implementation of the Company's strategic policy.
3. Oversight on the Board of Directors' responsibility implementation toward the anti money laundering and terrorism financing prevention implementation.
4. To ensure discussion on anti money laundering and terrorism financing prevention in the meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners.
5. Oversight on GCG implementation in every business activity in all levels of organization.
6. To ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendations from the Company's Internal Audit, external auditors, supervisory results of OJK and/or other regulators.
7. To enhance the effectiveness of its duties implementation and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish the Committees. The Committee shall be guided by the Charter stipulated and/or approved by the Board of Commissioners. The Committees are:
 - i. Audit Committee;
 - ii. Nomination and Remuneration Committee;
 - iii. Risk Oversight Committee.
8. To evaluate the committees' performance related to the duties implementation and responsibilities as stated in the above point 7.
9. Provide approval in the event that the Company's Sharia Supervisory Board requires the assistance of committees' members which organization structure is under the Board of Commissioners.
10. To review the Company's vision and mission.
11. To review and approve the Company's annual reports.
12. To develop/to establish the BOC Charter as the guidance for the Board of Commissioners in implementing its function, duties and responsibilities for the oversight of the Company's management.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

13. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Piagam Dewan Komisaris yang berlaku di Perseroan.
 14. Menerima pengaduan/pelaporan secara tertulis dari karyawan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga terkait temuan dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan.
 15. Melakukan tindak lanjut penyelesaian pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran terkait laporan keuangan Perseroan dengan mempertimbangkan hasil telahannya yang telah dilakukan Komite Audit Perseroan terkait pengaduan/pelaporan tersebut.
 16. Khusus Komisaris Independen, Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
 17. Melakukan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar, peraturan internal Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dewan Komisaris.
13. To held the Board of Commissioners' meeting that at least covering the frequencies, attendance, and decision making procedures as stated in the BOC Charter applicable in the Company.
 14. To accept written reporting/complaint from the Company's employees, shareholders or third parties related to the finding of violations allegation in relations with the Company's financial reporting.
 15. To follow up the settlement for the reporting/complaint of violations allegation related to the Company's financial report by considering the analysis results carried out by the Company's Audit Committee on such reporting/complaint.
 16. Specifically for the Independent Commissioner, the Independent Commissioner shall report to OJK at the latest 10 (ten) calendar days since the findings of:
 - i. Violation of regulatories in financing; and/or
 - ii. Situation or reckoning of situation that can be detrimental to the Company's business continuity.
 17. To conduct duties and responsibilities of other Board of Commissioners that stipulated in the Articles of Association, the Company internal rules, and prevailing regulatories for the Board of Commissioners.

Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki wewenang antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak memeriksa dan mencocokkan pembukuan Perseroan dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Authority of the Board of Commissioners

The Company's Board of Commissioners has the authority to:

1. Board of Commissioners' members both collectively and individually at any time during office hours the Company has the right to enter buildings and yards and other places that are used or controlled by the Company.
2. Board of Commissioners' members both collectively and individually have the right to examine and match the books of the Company and others and have the right to know all actions taken by the Board of Directors.
3. The Board of Directors and each member of the Board of Directors must provide an explanation of everything asked by the Board of Commissioners' members.
4. The Board of Commissioners is authorized to give approval to the Directors in carrying out certain legal actions as determined in the Articles of Association.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

5. Dewan Komisaris dengan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorompokun anggota Direksi, maka para anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya keadaan tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi yang baru. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan mereka bersama untuk melakukan pengurusan Perseroan sampai para anggota Direksi yang baru terpilih.
7. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara:

1. Memiliki komitmen untuk mengawasi tindakan Perseroan dengan mengedepankan profesionalismenya.
2. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris harus obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun juga, khususnya dari pemegang saham pengendali.
3. Menghindari terjadinya campur tangan/dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun juga serta tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan bebas dari benturan kepentingan.
4. Tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

5. The Board of Commissioners with the decision of the Board of Commissioners meeting with the most votes at any time has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from his position, if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association and / or legislation in force or detrimental to the purposes and objectives of the Company or he neglects his obligations.
6. If all members of the Board of Directors are temporarily dismissed and the Company does not have a single member of the Board of Directors, then the members of the Board of Commissioners are required to take care of the Company for a while and must call a GMS within 90 (ninety) days after the occurrence of such conditions to appoint the new one members of the Board of Directors. In such circumstances, the Board of Commissioners has the right to authorize one or more members of the Board of Commissioners on their joint responsibility to take care of the Company until the new members of the Board of Directors are elected.
7. If deemed necessary, the Board of Commissioners has the right to ask for assistance from experts in carrying out their duties for a limited period at the Company's expense.

Independence of the Board of Commissioners

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners acts independently among others by:

1. Having a commitment to oversee the Company's actions by prioritizing its professionalism.
2. Decision making in the Board of Commissioners Meeting must be objective and free from pressure from any party, especially from the controlling shareholder.
3. Avoiding interference/domination that is not fair from any party and is not influenced by unilateral interests and free from conflicts of interest.
4. Not doing other things that can affect the ability to act independently as regulated in applicable regulations.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

5. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
6. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
5. Never use the Company for personal, family and/or other parties' interests that can harm or reduce the Company's profits.
6. Never take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined based on the GMS.

Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Kriteria anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

Diversity of Members of the Board of Commissioners

Determination of the Board of Commissioners member composition is done by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience needed to support the implementation of its duties as a member of the Board of Commissioners.

The composition of the Company's Board of Commissioners reflects the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, and age, which can be seen from the profile of each member of the Company's Board of Commissioners.

Criteria for the Board of Commissioners' member

Which can be appointed as a member of the Board of Commissioners are individuals who meet the criteria and requirements in accordance with:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed and during their tenure:
 - a. Having good character, morals and integrity.
 - b. Competent in legal actions.
 - c. In the 5 (five) years prior to appointment and during his tenure:
 - i. Never declared bankrupt;
 - ii. Have never been a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - iii. Have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- | | |
|---|---|
| <p>iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; • Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan • Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. <p>d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.</p> <p>2. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyebutkan:</p> <p>a. Persyaratan integritas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Cakap melakukan perbuatan hukum. II. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. III. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. IV. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat. V. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama. <p>b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet. | <p>iv. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during his tenure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Never held an Annual GMS; • Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and • Has caused companies that obtained permits, approvals, or registrations from OJK to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK. <p>d. Have a commitment to obey the laws and regulations.</p> <p>e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.</p> <p>2. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions, which include:</p> <p>a. Integrity requirements include:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Competent in carrying out legal actions. II. Having good character and morals, at least shown by the attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a crime in a certain period before being nominated. III. Have a commitment to comply with laws and regulations and support the Financial Services Authority policy. IV. Have a commitment to the development of health Financial Services Institutions. V. Not included as a party that is prohibited from being a Main Party. <p>b. Financial reputation requirements, at least evidenced by:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Does not have bad credit and/or financing. |
|---|---|

Dewan Komisaris Board of Commissioners

- II. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - II. Have never been declared bankrupt and / or never been a shareholder, Controlling Insurance Company that is not a shareholder, member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.
- c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - I. Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.
 - II. Memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.
 - c. Financial eligibility requirements, at least evidenced by:
 - I. Having a financial reputation as described in the above financial reputation requirements.
 - II. Having the financial capacity to make the necessary efforts if the Financial Services Institution faces financial difficulties.
- d. Persyaratan kompetensi, meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan dimana dicalonkan.
 - d. Competency requirements, including knowledge and/or experience that support the management of the Financial Services Institution where it is nominated.
- 3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 3. Meet the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Prosedur dan Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun minimum 1 (satu) kali dalam setahun yang dilakukan dengan metode penilaian kinerja secara *self assessment*.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja Komite oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kriteria penilaian kinerja oleh seluruh anggota Dewan Komisaris meliputi:
 - a. Kejelasan tugas dan tanggung jawab Komite.
 - b. Efektivitas dari Komite untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Dewan Komisaris.

Committee Performance Evaluation Under the Board of Commissioners

Procedures and Criteria for Evaluating Committee Performance Under the Board of Commissioners

The performance evaluation of committees under the Board of Commissioners is done every year a minimum of 1 (one) time a year which is carried out using the performance assessment method by self assessment.

The criteria used in evaluating the performance of committees under the Board of Commissioners are as follows:

1. Evaluation of the Committee's performance by all members of the Board of Commissioners.
The criteria for performance evaluation by all members of the Board of Commissioners include:
 - a. Clarity of duties and responsibilities of the Committee.
 - b. The effectiveness of the Committee to carry out its duties and responsibilities in assisting the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

2. Penilaian kinerja Komite oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite.

Kriteria penilaian kinerja oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite meliputi:

- a. Kejelasan *key objectives* dan peran Komite dan setiap anggota Komite.
- b. Wewenang, sumber daya, dan akses atas informasi.
- c. Keproaktifan Komite dalam penyelesaian isu-isu.
- d. Kompetensi teknis (termasuk pengetahuan tentang hukum dan peraturan terkait).
- e. Frekuensi pertemuan Komite untuk membahas isu-isu.
- f. Dukungan dari Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas Komite.
- g. Efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Komite berdasarkan Pedoman atau Piagam Komite.
- h. Efektivitas komposisi Komite dalam menjalankan tugasnya.
- i. Efektivitas kepemimpinan ketua Komite.

Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja Komite oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
Penilaian kinerja dilakukan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kinerja Komite oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite.
Penilaian kinerja dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang menjadi anggota Komite.

2. Assessment of the performance of the Committee by members of the Board of Commissioners who are members of the Committee.

Criteria for performance evaluation by members of the Board of Commissioners who are members of the Committee include:

- a. Clarity of key objectives and the role of the Committee and each Committee member.
- b. Authority, resources and access to information.
- c. Proactiveness of the Committee in resolving issues.
- d. Technical competence (including knowledge of relevant laws and regulations).
- e. Frequency of Committee meetings to discuss issues.
- f. Support from the Board of Commissioners regarding the implementation of the Committee's duties.
- g. The effectiveness of the implementation of Committee responsibilities based on the Committee Charter or Guidelines.
- h. Effectiveness of the composition of the Committee in carrying out its duties.
- i. The effectiveness of the leadership of the Committee Chair.

The Assessors

The parties evaluating the performance of the Committees under the Board of Commissioners are as follows:

1. Evaluation of the Committee's performance by all members of the Board of Commissioners.
Performance evaluation is carried out by all members of the Board of Commissioners.
2. Assessment of the performance of the Committee by members of the Board of Commissioners who are members of the Committee.
Performance appraisals are carried out by members of the Board of Commissioners who are members of the Committee.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Jumlah Komisaris Independen

Pada tahun 2019, Perseroan memiliki 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen dari total 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan adalah 40% (empat puluh) persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria Komisaris Independen

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan bahwa pengangkatan kembali Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode wajib menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan independensinya tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
 - e. Memenuhi persyaratan bagi calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Number of Independent Commissioners

In 2019, the Company has 2 (two) Independent Commissioners from a total of 5 (five) members of the Company's Board of Commissioners. Therefore, the number of members of the Company's Independent Commissioners is 40% (forty) percent of the total members of the Company's Board of Commissioners and is in accordance with the applicable laws and regulations.

Criteria for Independent Commissioners

Those who can be appointed as Independent Commissioners must meet the following criteria and requirements:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Independent Commissioner shall meet the following criteria:
 - a. Not the person who work or have authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise over the activities of the Company within the last 6 (six) months, unless for reappointment as an Independent Commissioner of the Company for the next period, by taking into account that the reappointment as an Independent Commissioner that has been served during 2 (two) periods shall provide the statement to the GMS that he/she remain independent and the statement shall be disclosed in the annual report.
 - b. Do not have direct or indirect shares of the Company.
 - c. Do not have any affiliation with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or majoring shareholders of the Company; and
 - d. Do not have any direct or indirect business relationship with the Company's activities.
 - e. Fulfill the requirements for candidate member of the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners as stated in the POJK No.33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Komisaris Independen Independent Commissioner

2. POJK No.30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Komisaris Independen Perseroan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham Perseroan.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
 - d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perseroan.
 - e. Memiliki kewarganegaraan Indonesia.
 - f. Berdomisili di Indonesia.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
2. POJK 30/POJK.05/2014 concerning the Good Corporate Governance for Financing Companies, the Company's Independent Commissioner shall meet the following criteria:
 - a. Do not have any affiliation with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board or shareholders of the Company.
 - b. Never served as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of Sharia Supervisory Board, or served 1 (one) level under the Company's Board of Directors or other companies affiliated with the Company within the last 2 (two) years.
 - c. Understanding on the financing regulatories and other relevant regulations.
 - d. Having good knowledge on the Company's financial conditions.
 - e. Holding Indonesian citizenship.
 - f. Domiciled in Indonesia.
3. An Independent Commissioner who has served for 2 (two) consecutive terms of office may be appointed in the subsequent period as an Independent Commissioner in terms of stating at the GMS regarding the independence concerned.

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin telah menyatakan Pernyataan Independensi beliau pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Mei 2017 dan masing-masing Bapak I Nyoman Tjager dan Ibu Myrnie Zachraini Tamin telah membuat Surat Pernyataan Independen yang di dalamnya menyatakan sebagai berikut:

Statement of Independence of Independent Commissioners

In accordance POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Mr. I Nyoman Tjager and Ms. Myrnie Zachraini Tamin have stated their Independence Statement at the Annual General Meeting of Shareholders on 31 May 2017 and respectively Mr. I Nyoman Tjager and Ms. Myrnie Zachraini Tamin has made an Independent Declaration Letter which states as follows:

Komisaris Independen Independent Commissioner

No.	Pernyataan Statement
1.	<p>Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya, Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Perusahaan Pembiayaan dan dalam ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Does not have a financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Company's Board of Commissioners, the Company's Directors, members of the Company's Sharia Supervisory Board and/or the Company's Controlling Shareholders or relationships with the Company, which can affect its ability to act independently as regulated in provisions for implementing Good Corporate Governance for Financing Companies and in provisions for implementing Good Corporate Governance for Issuers or Public Companies.</p>
2.	<p>Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.</p> <p>Does not have shares either directly or indirectly in the Company.</p>
3.	<p>Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan.</p> <p>Has no affiliation with the Company, members of the Company's Board of Commissioners, members of the Company's Board of Directors, members of the Company's Sharia Supervisory Board , or majoring shareholders of the Company.</p>
4.	<p>Tidak mempunyai usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>Do not have a business either directly or indirectly related to the Company's business activities.</p>
<p>Apabila dikemudian hari, ditemukan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1-4 di atas, maka Komisaris Independen yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan sebagai Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.</p> <p>If in the future, is found to have a relationship as referred to in points 1-4 above, the Independent Commissioner concerned is willing to relinquish his/her position as Independent Commissioner and is willing to be replaced.</p>	

Direksi

Board Of Directors

Salah satu organ tata kelola perusahaan di Perseroan yaitu Direksi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya dengan tujuan mencapai efektivitas pelaksanaan pekerjaannya.

One of the corporate governance organs in the Company is the Board of Directors which is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Directors are the Company's organs that have the duties and responsibilities of carrying out the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. Each member of the Board of Directors carries out his duties in accordance with the division of duties and authority with the aim of achieving the effectiveness of the performance of his work.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi referensi hukum pembentukan dan penunjukan Direksi Perseroan mengacu pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komsaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perseroan No. 30 tanggal 31 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Kota Jakarta Timur.
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perseroan No. 50 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Legal Basis

The legal basis that becomes the legal reference for the formation and appointment of the Company's Directors refers to several provisions, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. The Company's Articles of Association.
3. POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies, POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions.
4. Deed of Decree of the Annual Meeting of the Company No. 30 dated May 31, 2017 made before Rini Yulianti, S.H., Notary in the City of East Jakarta.
5. Deed of Decree of the Annual Meeting of the Company No. 50 dated October 10, 2019 made before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in the City of South Jakarta.

Susunan dan Komposisi Direksi

Susunan dan komposisi anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Board of Directors Composition

The Company's Board of Directors member composition have complied with the applicable provisions, as follows:

No.	Ketentuan di POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Provisions in POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. Companies that have more than Rp200,000,000,000 (two hundred billion rupiah) of assets must have at least 3 (three) Board of Directors members.	Perseroan memiliki 5 (lima) anggota Direksi. The Company has 5 (five) Board of Director's members.

Direksi

Board Of Directors

No.	Ketentuan di POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Provisions in POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
2.	<p>Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.</p> <p>Companies that have foreign ownership, both directly and indirectly, must have at least 50% (fifty percent) members of the Board of Directors who are Indonesian citizens.</p>	<p>Kepemilikan saham Perseroan terdapat kepemilikan asing secara tidak langsung, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan yaitu memiliki anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia lebih dari 50%.</p> <p>In the share ownership of the Company, there is indirect ownership by foreigners, so the Company has fulfilled the provisions of having more than 50% members of the Directors who are Indonesian citizens.</p>
3.	<p>Anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>Members of the Board of Directors must reside in the territory of the Republic of Indonesia.</p>	<p>Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.</p> <p>All members of the Board of Directors reside in the territory of the Republic of Indonesia.</p>
4.	<p>Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.</p> <p>All members of the Company's Board of Directors must have relevant knowledge to their positions.</p>	<p>Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya, yang dapat dilihat pada profil masing-masing anggota Direksi.</p> <p>All members of the Company's Board of Directors have knowledge relevant to their positions, which can be seen in the profiles of each member of the Board of Directors.</p>

No.	Ketentuan di POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komsaris Emiten atau Perusahaan Publik Provisions in POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies	Implementasi di Perseroan Implementation in the Company
1.	<p>Direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.</p> <p>The Board of Directors consists of at least 2 (two) members of the Board of Directors.</p>	<p>Perseroan memiliki 5 (lima) orang anggota Direksi.</p> <p>The Company has 5 (five) members of the Board of Directors.</p>
2.	<p>1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.</p> <p>1 (one) of the members of the Board of Directors is appointed as main Director or President Director.</p>	<p>Perseroan memiliki 1 (satu) Presiden Direktur.</p> <p>The Company has 1 (one) President Director.</p>
3.	<p>Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p> <p>Proposed appointments, terminations and/or replacements of members of the Board of Directors to the GMS must consider the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.</p>	<p>Pengangkatan anggota Direksi Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>The appointment of members of the Board of Directors of the Company has taken into account the recommendations of the Company's Nomination and Remuneration Committee and has obtained approval from the GMS.</p>

Merujuk POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan bahwa calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya. 4 (empat) orang anggota Direksi telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan) dan terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2019 yang efektif pengangkatannya setelah diperolehnya persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Per posisi 31 Desember 2019, proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas 1 (satu) orang anggota Direksi tersebut masih dalam proses.

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan susunan Direksi. Susunan keanggotaan Direksi Perseroan tahun 2019 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Perseroan No. 50 tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Referring to POJK No. 27 POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions that prospective member of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions. 4 (four) members of the Board of Directors have obtained the approval of the Financial Services Authority (passed the fit and proper test of the Financial Services Authority) and 1 (one) member of the Board of Directors appointed at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 10, 2019 which will effectively be appointed after obtaining approval of the Financial Services Authority. As of December 31, 2019, the Financial Services Authority approval for 1 (one) member of the Board of Directors is still in process.

In 2019, there has been a change in the composition of the Directors. The composition of the Company's Board of Directors in 2019 has been stated in the Deed of Decree of the Annual Meeting of the Company No. 50 dated October 10, 2019 made before Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in the City of South Jakarta.

Susunan anggota Direksi per 31 Desember 2019:

Composition of the Board of Directors as of December 31, 2019:

Jabatan Position	Nama Name	Periode Jabatan Terms of Office
Presiden Direktur President Director	Djaja Suryanto Sutandar	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Direktur Director	Zacharia Susantadiredja	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Direktur Director	Anthony Y Panggabean	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Direktur Director	Njauw Vido Onadi	RUPS Tahunan 2017 – RUPS Tahunan 2020 2017 AGMS – 2020 AGMS
Direktur Director	Wibowo*)	RUPS Luar Biasa tanggal 10 Oktober 2019 – RUPS Tahunan 2020 October 10, 2019 EGMS – 2020 AGMS

*) Pengangkatan Wibowo akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Per posisi 31 Desember 2019, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut masih dalam proses dan beliau pada saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer.

*) Wibowo's appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. As of December 31, 2019, the approval of the Financial Services Authority is still in process and he currently serves as Chief Marketing Officer.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut. Masa jabatan anggota Direksi saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2020 dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

Board of Director's Term of Office

The Board of Directors' member's term of office is from the date of the GMS that appoints him until the closing of the 3rd (3rd) Annual GMS after the date of his appointment. The current term of office for members of the Board of Directors will end at the close of the Company's Annual GMS in 2020 without prejudice to the authority of the GMS to dismiss members of the Board of Directors at any time before their term ends.

Direksi

Board Of Directors

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Mengacu pada POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan telah memiliki Piagam Direksi. Piagam Direksi mengatur antara lain mengenai:

1. Landasan Hukum Piagam.
2. Struktur dan Komposisi Direksi.
3. Batasan Rangkap Jabatan Anggota Direksi.
4. Pengangkatan Anggota Direksi.
5. Masa Jabatan Anggota Direksi.
6. Pemberhentian Sementara Anggota Direksi.
7. Pengunduran Diri Anggota Direksi.
8. Jabatan Anggota Direksi Berakhir.
9. Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
10. Kewenangan Direksi.
11. Waktu Kerja.
12. Keanggotaan dalam Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
13. Nilai-Nilai Dasar (CORE VALUES) dan Etika Kerja.
14. Transparansi Kepemilikan Saham Dan Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga.
15. Rapat Direksi.
16. Penilaian Kinerja Direksi.
17. Remunerasi.
18. Sertifikasi dan Pelatihan.
19. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban.

Pengungkapan pedoman atau piagam Direksi dalam Laporan Tahunan dilakukan berdasarkan SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pada Bab III tentang isi Laporan Tahunan yang antara lain menyatakan bahwa uraian Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam Laporan Tahunan mencakup pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam *charter* Direksi.

Perseroan telah memiliki Piagam Direksi yang ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 4 September 2018 yang disusun sebagai rujukan/pedoman bagi Direksi Perseroan dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas Direksi.

Untuk memastikan Piagam Direksi tetap relevan bagi setiap anggota Direksi Perseroan, Piagam Direksi diperbaharui dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik.

Piagam Direksi dapat dilihat pada *website* Perseroan www.wom.co.id.

Directors' Guidelines and Rules of Work

Referring to POJK No.33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Directors of the Company already have a Directors' Charter. The Charter of the Board of Directors regulates among other things:

1. Legal Charter.
2. Structure and Composition of Directors.
3. Dual Limitation on the Position of Members of the Board of Directors.
4. Appointment of Members of the Board of Directors.
5. Term of Office of Directors.
6. Temporary Dismissal of Members of the Board of Directors.
7. Resignation of Members of the Board of Directors.
8. Position of Members of the Board of Directors Ends.
9. Description of Duties and Responsibilities of Directors.
10. Authority of the Board of Directors.
11. Working Time.
12. Membership in the Integrated Risk Management Committee.
13. Basic Values (CORE VALUES) and Work Ethics.
14. Transparency in Share Ownership and Disclosure of Financial Relations and Family Relations.
15. Directors' Meetings.
16. Directors' Performance Assessment.
17. Remuneration.
18. Certification and Training.
19. Reporting and Accountability.

Disclosure of Board of Directors' guidelines or charter in the Annual Report is based on the SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 concerning the Form and Content of the Annual Report of the Issuer or Public Company in Chapter III concerning the contents of the Annual Report which among others states that the description of Governance Issuers or Public Companies in the Annual Report includes a statement that the Board of Directors has the Board of Directors guidelines or charter.

The Company has a Board of Directors Charter stipulated by the Board of Directors on 4 September 2018 which was prepared as a reference / guideline for the Company's Directors in carrying out their duties effectively and efficiently as well as other parties related to the implementation of the Directors' duties.

To ensure the Board of Directors' Charter remains relevant for each member of the Company's Directors, it is updated from time to time following the development of laws and best practices.

The Charter of the Directors can be seen on the Company's website www.wom.co.id.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi mengenai Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019, Perseroan telah mengklasifikasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi berdasarkan fungsi jabatannya. Adapun rincian pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Based on the Directors' Decree regarding the Determination of the Division of Duties and Authorities of the Board of Directors Members for Fiscal Year 2019, the Company has classified the duties and responsibilities of each Directors based on the function of their position. The details of the distribution of duties and authorities of the Company's Directors are as follows:

Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur | President Director

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengelola Perseroan termasuk memberikan arahan strategis dalam hal kebijakan dan strategi di lingkup pengembangan bisnis, manajemen risiko, operasional, keuangan dan sumber daya manusia, agar sesuai dengan tujuan Perseroan. 2. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan berjalan sesuai target yang ditetapkan secara volume dan market share sehingga menunjang keuntungan Perseroan. 3. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan manajemen risiko Perseroan berjalan dengan baik sehingga tercapai kualitas portfolio yang sehat. 4. Memantau dan memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien dengan mengedepankan kualitas, <i>service excellence</i> serta berpedoman pada prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 5. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan sumber daya manusia berjalan efektif dan efisien dan fokus pada pemberdayaan, kualitas, produktivitas, dan pengembangan karyawan yang dapat menunjang pencapaian tujuan Perseroan. 6. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengelolaan fungsi bisnis di regional dan cabang sesuai dalam upaya menunjang pencapaian tujuan dan target perusahaan berupa ENR dan <i>profit</i>, pemantauan strategi perbaikan kinerja dari setiap kantor jaringan perusahaan dengan tetap berpedoman pada segala peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perusahaan dan peraturan Perusahaan serta sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 7. Menetapkan dan memantau penerapan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Perseroan, dan peraturan perundang-undangan. 8. Memantau dan memastikan kegiatan <i>Quality Assurance & Litigation (fraud)</i> untuk memastikan ketaatan terhadap aktivitas kritikal yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja di dalam Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelesaian kasus litigasi yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin timbul. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To lead and manage the Company including providing strategic directives in terms of policies and strategies in business development, risk management, operations, finance and human resources, in order to be in line with the Company's objectives. 2. To monitor and ensure all of the Company's business development activities are performing as the set target in terms of volume and market share thereby supporting the Company's profitability. 3. To monitor and ensure all of the Company's risk management activities are performing well thereby accomplishing health portfolio quality. 4. To monitor and ensure effective and efficient operations activities, by emphasizing on quality, service excellence and guided by Good Corporate Governance principles. 5. To monitor and ensure effective and efficient performance of human resources management activities and focusing on employees' empowerment, quality, productivity, and development that can support the achievement of the Company's objectives. 6. To monitor and ensure all business function management activities in regional and branches are appropriate in an effort to support the achievement of company goals and targets in the form of ENR and profit, monitoring the performance improvement strategies of each company network office while still guided by all laws and regulations, the company's articles of association and regulations Company and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. 7. To stipulate and monitor effective and efficient internal control application to provide adequate confidence that the business activities are performed in accordance with the Company's targets and business strategies as well as the articles of association, and regulatory. 8. Monitor and ensure Quality Assurance & Litigation (fraud) activities to ensure compliance with critical activities carried out by each work unit within the Company were in accordance with applicable laws and regulations as well as settlement of litigation cases carried out by prioritizing the principle of prudence and in accordance with applicable laws and regulations in order to minimize compliance risk, reputation risk or legal risk that may arise. |
|---|--|

Direksi

Board Of Directors

Djaja Suryanto Sutandar

Presiden Direktur | President Director

- | | |
|--|---|
| <p>9. Memantau dan memastikan kegiatan fungsi <i>Legal, Corporate Litigation dan Compliance</i> yang dijalankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meminimalisasi risiko kepatuhan, risiko reputasi maupun risiko hukum yang mungkin timbul.</p> <p>10. Memantau dan memastikan kegiatan fungsi pengembangan <i>digital initiative</i> Perseroan.</p> <p>11. Mengawasi secara aktif penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Perseroan.</p> <p>12. Mengevaluasi terhadap kinerja seluruh fungsi yang ada di Perseroan.</p> <p>13. Mengawasi dan membawahi anggota Direksi Perseroan lainnya.</p> <p>14. Mengawasi dan membawahi <i>Non Directorate</i> yang ada di Perseroan.</p> <p>15. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p> | <p>9. Monitor and ensure that the activities of the Legal, Corporate Litigation and Compliance functions are carried out by prioritizing prudential principles and in accordance with applicable laws and regulations in order to minimize compliance risk, reputation risk or legal risk that may arise.</p> <p>10. Monitor and ensure the activities of the Company's digital initiative development functions.</p> <p>11. Actively overseeing the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding programs in the Company.</p> <p>12. Evaluate the performance of all functions in the Company.</p> <p>13. Oversee and supervise other members of the Company's Directors.</p> <p>14. Supervise and supervise the Non Directorate in the Company.</p> <p>15. Performing other duties and authorities of the Directors determined by the Company's Articles of Association and internal regulations that apply to the Directors of the Company.</p> |
|--|---|

Simon Tan Kian Bing *)

Direktur Independen | Independent Director

- | | |
|--|--|
| <p>1. Mengawasi dan membawahi <i>Marketing Directorate</i> yang ada di Perseroan.</p> <p>2. Merencanakan dan menyusun <i>Marketing Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan budget operasional <i>Directorate</i> dibawahnya, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>.</p> <p>3. Bertanggung jawab atas pencapaian target marketing secara nasional.</p> <p>4. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan pengembangan bisnis Perseroan dan implementasi kebijakan marketing yang diterapkan di Perseroan berjalan sesuai yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>5. Membuka dan menjalin relasi kerjasama dengan <i>brand</i> utama di bisnis sepeda motor dalam rangka memperoleh <i>market share</i> dan portofolio yang baik.</p> <p>6. Mengembangkan strategi bisnis <i>Non Dealer Sales</i> dan memastikan implementasi strategi tersebut berjalan sesuai target yang ditetapkan Perseroan.</p> <p>7. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi marketing berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Marketing Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan target penjualan dan kualitas pembiayaan yang baik serta memperkuat <i>image</i> Perseroan di mata <i>stakeholders</i>, dealer dan konsumen Perseroan.</p> | <p>1. To supervise and in charge of the Company's Marketing Directorate.</p> <p>2. To plan and develop the Marketing Strategic Plan including its operations budget planning for the Directorates under its delegation, as well as communicating it to all executive managements.</p> <p>3. To be responsible on the achievement of marketing target nationally.</p> <p>4. To monitor and ensure that all of the Company's business development activities and marketing policy implementation set out by the Company are performing according to the Company's stipulations.</p> <p>5. To open and maintain cooperation relationships with principal brands of 2-wheels business in order to obtain good market share and portfolio.</p> <p>6. To develop Non Dealer Sales business strategy and ensure its implementation are according to the target set out by the Company.</p> <p>7. To evaluate the sustainable implementation of policy, marketing strategy including the performance of all functions under the Marketing Directorate in an effort to improve sales target and good financing quality, as well as to strengthen the Company's image to the stakeholders, dealers and consumers of the Company.</p> |
|--|--|

Simon Tan Kian Bing *)

Direktur Independen | Independent Director

- | | |
|--|--|
| <p>8. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p> <p>9. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</p> | <p>8. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</p> <p>9. Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</p> |
|--|--|

*) Diberhentikan sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2019. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bapak Simon Tan Kian Bing sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 10 Oktober 2019, dilaksanakan oleh Bapak Djaja Suryanto Sutandar sampai dengan pengangkatan Bapak Wibowo selaku Direktur Perseroan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK.

*) Dismissed since the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on October 10, 2019. The execution of the duties and authority of Mr. Simon Tan Kian Bing since the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on October 10, 2019, was held by Mr. Djaja Suryanto Sutandar until the appointment of Mr. Wibowo as Director of the Company is effective after obtaining approval from the OJK.

Zacharia Susantadiredja

Direktur | Director

- | | |
|--|--|
| <p>1. Mengawasi dan membawahi Finance Directorate yang ada di Perseroan dan merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan.</p> <p>2. Merencanakan dan menyusun <i>Corporate Financial Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan biaya operasional Direktorat dibawahnya, serta mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>.</p> <p>3. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan keuangan Perseroan serta memantau dan memastikan pengelolaan keuangan Perseroan sesuai dengan peraturan internal Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan prosedur serta standar akuntansi keuangan di Indonesia.</p> <p>4. Membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan investor yang tepat bagi Perseroan.</p> <p>5. Memantau aktivitas pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak dan laporan penutupan asuransi agar sesuai dengan peraturan internal Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Memantau pelaksanaan fungsi <i>corporate service & communication</i> di Perseroan dalam rangka menjaga dan memperkuat image Perseroan di mata publik.</p> <p>7. Mengevaluasi implementasi kebijakan, strategi pengelolaan keuangan berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Finance Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kapabilitas keuangan Perseroan.</p> <p>8. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p> <p>9. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</p> | <p>1. To supervise and in charge of the Company's Finance Directorate and also serves as the Corporate Secretary.</p> <p>2. To plan and develop the Corporate Financial Strategic Plan including its operations budget planning for the Directorates under its delegation, as well as communicating it to all executive managements.</p> <p>3. Responsible on all the Company's financial management as well as to monitor and ensure that the Company's financial management is in accordance with the Company's internal rules, and prevailing regulatory, policies and procedures as well as standard of financial accounting in Indonesia.</p> <p>4. To open and maintain cooperation relations with other parties in order to obtain appropriate investors for the Company.</p> <p>5. To monitor the reporting activities and taxes mandatory payments including insurance closing reports in order to be aligned with the Company's internal rules and prevailing regulatory.</p> <p>6. To monitor the corporate service & communication function implementation in the Company in order to maintain and strengthen the Company's image to the public.</p> <p>7. To evaluate the sustainable implementation of policies, financial management strategies including the performance of all functions under the Finance Directorate in order to improve the Company financial capabilities.</p> <p>8. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</p> <p>9. Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</p> |
|--|--|

Direksi

Board Of Directors

Anthony Y. Panggabean

Direktur | Director

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan membawahi <i>Operation Directorate</i> yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun <i>Operations Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan biaya operasional <i>Operations Directorate</i>, serta mengkomunikasikannya kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>. 3. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi pada penyusunan dan penetapan <i>policy</i> dan <i>procedure</i> yang berlaku pada internal Perseroan, penyelenggaraan fungsi <i>service</i>, <i>contact center</i>, dan <i>information technology</i> ("IT") Perseroan. 4. Mengarahkan dan memantau pengelolaan layanan kepada konsumen serta <i>contact center</i> secara nasional dalam rangka menjaga <i>brand image</i> Perseroan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen terhadap Perseroan. 5. Memastikan tersedianya dukungan sistem/ prosedur kerja berbasis IT di setiap proses kerja yang ada di Perseroan termasuk mengarahkan dan memastikan keamanan perangkat IT untuk mencapai stabilitas dan keamanan sistem IT yang optimum. 6. Mengevaluasi implementasi kebijakan internal terkait operasional, strategi operasional dan IT berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Operations Directorate</i> secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan proses operasional yang cepat, efektif dan efisien. 7. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan. 8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To supervise and in charge of the Company's Operation Directorate. 2. To plan and develop the Operations Strategic Plan including its operations budget planning of the Operations Directorate, as well as communicating it to all executive managements. 3. Responsible on all the operations activities management including the development and stipulation of policies and procedures applicable in the Company's internal, implementation of service, contact center, and Information Technology (IT) of the Company. 4. To direct and monitor service management to consumers as well as contact centers nationally in an effort to maintain the Company's brand image that aim to improve sales and customers' loyalty to the Company. 5. To ensure the availability of system support or work procedures of IT-based in every work process in the Company, including to direct and ensure the safety of IT tools for the achievement of optimum IT system stability and safety. 6. To evaluate the sustainable implementation of internal policies on operations, operations and IT strategy including the performance of all functions under the Operations Directorate for the improvement of fast, effective and efficient operations process. 7. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors. 8. Responsible to the Company's President Director in implementing its duties. |
|---|--|

Njauw Vido Onadi

Direktur | Director

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan membawahi <i>Risk Management Directorate</i> yang ada di Perseroan. 2. Merencanakan dan menyusun <i>Risk Management Strategic Plan</i> termasuk di dalamnya merencanakan budget operasional <i>Risk Management Directorate</i>, serta mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran <i>executive management</i>. 3. Memantau dan memastikan fungsi manajemen risiko di Perseroan berjalan efektif. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To supervise and in charge of the Company's Risk Management Directorate. 2. To plan and develop the Risk Management Strategic Plan including the operations budget of Risk Management Directorate, as well as to communicate it to all executive managements. 3. To monitor and ensure effective implementation of risk management function in the Company. |
|--|--|

Njauw Vido Onadi
Direktur | Director

- | | |
|--|--|
| <p>4. Mengarahkan dan memantau aktivitas <i>initiation credit</i> agar berjalan efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan bisnis Perseroan dengan kualitas portofolio yang baik.</p> <p>5. Mengarahkan dan memantau aktivitas penagihan dan pengelolaan aset unit kendaraan tarikan termasuk pengembangan sistemnya agar berjalan efektif dan dapat meminimalkan tingkat <i>Non Performing Loan</i>.</p> <p>6. Mengarahkan dan memantau aktivitas <i>project management</i> Perseroan agar seluruh <i>project</i> yang ditetapkan berjalan efektif dan mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan.</p> <p>7. Melakukan evaluasi implementasi kebijakan, strategi manajemen risiko berikut kinerja seluruh fungsi yang berada di <i>Risk Management Directorate</i>, secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio yang sehat.</p> <p>8. Melakukan tugas dan wewenang Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan yang berlaku bagi Direksi Perseroan.</p> <p>9. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Direktur Perseroan.</p> | <p>4. To direct and monitor effective credit initiation activities for the improvement of the Company's business growth with good portfolio quality.</p> <p>5. To direct and monitor effective billing activities and asset management of impounded vehicles unit including its system development in order to minimize the Non Performing Loan levels.</p> <p>6. To direct and monitor the Company project management activities for effective project performance and to achieve the targets as well as the set timing.</p> <p>7. To evaluate the sustainable implementation of risk management policies, strategies including the performance of all functions under the Risk Management Directorate for the improvement of sound portfolio quality.</p> <p>8. To perform other duties and authorities of the Board of Directors as set out in the Articles of Association and internal rules of the Company that is applicable for the Company's Board of Directors.</p> <p>9. Responsible to the Company's President Director in implementing its duties.</p> |
|--|--|

Pernyataan Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan independen, hal ini tercermin dari pernyataan masing-masing anggota Direksi mengenai hal-hal di bawah ini:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
2. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.
3. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
4. Tidak pernah memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Statement of Directors' Independence

All members of the Directors of the Company are independent, this is reflected in the statement of each member of the Board of Directors regarding the following matters:

1. Has no financial relationship, family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Company.
2. Never use the Company for personal, family and/or other parties' interests that can harm or reduce the Company's profits.
3. Never take and/or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined based on the GMS.
4. Never use the Company for personal, family and /or other parties' interests which can harm or reduce the Company's profits.

Direksi

Board Of Directors

Keberagaman Anggota Direksi

Penentuan komposisi anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya selaku anggota Direksi. Komposisi anggota Direksi Perseroan telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia yang dapat dilihat dari profil masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Anggota Direksi merupakan orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - Pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Diversity of Members of the Board of Directors

Determination of the Board of Directors member composition is done by taking into account the diversity of expertise, knowledge, and experience needed to support the implementation of its duties as a member of the Board of Directors. The composition of members of the Board of Directors of the Company has reflected the diversity of its members, both in terms of education (field of study), work experience, age, which can be seen from the profile of each member of the Company's Board of Directors.

Criteria for Members of the Board of Directors

Which can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who meet the criteria and requirements in accordance with:

1. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Members of the Board of Directors are individuals who meet the requirements when appointed and during their tenure:
 - a. Having good character, morals, and integrity.
 - b. Competent in legal actions.
 - c. In the 5 (five) years prior to appointment and during his tenure:
 - i. Never declared bankrupt;
 - ii. Have never been a member of a Board of Directors and/or a Board of Commissioners found guilty of causing a company to go bankrupt;
 - iii. Have never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances and/or related to the financial sector; and
 - iv. Never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who during his tenure:
 - Never held an Annual GMS;
 - Accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners has never been accepted by the GMS or has never provided accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS; and

- Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
2. POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang antara lain menyebutkan:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 1. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 2. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.
 3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Lembaga Jasa Keuangan yang sehat.
 5. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - c. Persyaratan kelayakan keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 1. Memiliki reputasi keuangan sebagaimana telah dijabarkan pada persyaratan reputasi keuangan di atas.
 2. Memiliki kemampuan keuangan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila Lembaga Jasa Keuangan menghadapi kesulitan keuangan.

- Has caused companies that obtained permits, approvals, or registrations from OJK to not fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to OJK.
- d. Have a commitment to obey the laws and regulations.
 - e. Having knowledge and/or expertise in the fields required by the Company.
2. POJK No. 27/POJK.03/2016 concerning the Fit and Proper Test for Main Parties of the Financial Services Institutions, which include:
 - a. Integrity requirements include:
 1. Competent in legal actions.
 2. Having good character and morals, at least shown by the attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a crime in a certain period before being nominated.
 3. Have a commitment to comply with laws and regulations and support the Financial Services Authority policy.
 4. Have a commitment to the development of health Financial Services Institutions.
 5. Not included as a party that is prohibited from being a Main Party.
 - b. Financial reputation requirements, at least evidenced by:
 1. Does not have bad credit and/or financing
 2. Have never been declared bankrupt and/or never been a shareholder, Controlling Insurance Company that is not a shareholder, member of the Board of Directors, or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within the last 5 (five) years before being nominated.
 - c. Financial eligibility requirements, at least evidenced by:
 1. Having a financial reputation as described in the above financial reputation requirements
 2. Having the financial capacity to make the necessary efforts if the Financial Services Institution faces financial difficulties.

Direksi Board Of Directors

- d. Persyaratan kompetensi, meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan dimana dicalonkan.
3. Memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program Orientasi diadakan oleh Perseroan yang di selenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Direksi yang baru guna memberikan pemahaman tentang antara lain:

1. Strategi Perseroan.
2. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan.
4. Fasilitas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Direksi.

Rencana Suksesi Anggota Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki peranan penting dalam nominasi kandidat calon anggota Direksi. Namun seorang Direktur dapat menunjuk karyawan internal Perseroan sebagai suksesornya termasuk karyawan internal yang masuk dalam *Talent Pool* Perseroan.

Kebijakan Suksesi Direktur Perseroan mengatur bahwa kandidat akan memperoleh serangkaian pengembangan diri yang terkait pekerjaannya serta pengembangan personal melalui pelatihan maupun melalui sistem kerja tim untuk memecahkan isu/ permasalahan tertentu.

- d. Competency requirements, including knowledge and / or experience that support the management of the Financial Services Institution where it is nominated.
3. Meet the requirements as a member of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association.

Orientation Programs for New Directors

The orientation Program is held by the Company which was held by the Corporate Secretary to new members of the Board of Directors in order to provide an understanding of amongst others:

1. The Company's strategies.
2. Duties, responsibilities and authority within the Company pursuant to the Articles of Association and the prevailing regulatories in Indonesia.
3. Policies related with Good Corporate Governance.
4. Facilities to support the duties implementation of the Board of Directors.

Board of Directors Succession Plans

The Company Nomination and Remuneration committee have an important role in nominating member of Directors candidate. However, a Director may appoint an internal employee as his/her successor including employee within the Company's Talent Pool.

The Director Succession Policy of the Company regulates that a candidate will receive series of development related with his/her field of work as well as personal development through workshops or team task force for solving certain issues.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah, maka berkewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dalam POJK No. 30/POJK/05/2014 Pasal 1 angka 14, dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, yaitu:

- Sebagai perwakilan Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Kepala Cabang Unit Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait prinsip syariah.
- Berfungsi sebagai mediator Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk, jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib:

- Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
- Melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Company, Company has Sharia Business Unit obliged to have Sharia Supervisory Board.

Duties and Authorities of Sharia Supervisory Board

Based on POJK No. 30/POJK/05/2014 Article 1 No. 14, the Sharia Supervisory Board, further abbreviated as DPS, is a part of the Company's organs having supervisory duties and functions to direct the implementation of the company's activities to be in accordance with the Sharia Principles. As such, the Sharia Supervisory Board has the duties and authorities as regulated in the Company's Articles of Association and with due observance to the applicable regulations, namely:

- Representing the Company at the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.
- Functioning as a supervisor for the sharia aspects of the Company's Sharia Business Unit operational activities to conform to sharia principles.
- Functioning as an advisor and providing advice to the Board of Directors, the Head of Sharia Business Unit and the Head of Sharia Branch Unit regarding matters related to sharia principles.
- Functioning as communications mediator between the Company and National Sharia Board concerning the proposals and suggestions of product and service development requiring reviews and fatwas from the National Sharia Board.

In carrying out its functions, the Sharia Supervisory Board shall:

- Follow the fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council; and
- Report the Company's Sharia business activity and its development to the Sharia Board of the Indonesian Ulema Council in accordance with the provisions established by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Pengawas Syariah Perseroan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana ditentukan dalam RUPS, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat mengundurkan diri kapan saja, dengan ketentuan anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan mengundurkan dirinya menyampaikan surat pengunduran diri kepada Perseroan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya efektif. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri oleh Perseroan.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Jika Dewan Pengawas Syariah tersusun oleh lebih dari satu orang, maka komposisinya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seorang Ketua Dewan Pengawas Syariah;
- Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah atau lebih.

Sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 30 tanggal 31 Mei 2017, dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti S.H, Notaris Kota Jakarta Timur, susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah dalam Perseroan ialah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	Ketua Chairman
Ir. H. Muhammad Nadratuzzaman Hosen.	Anggota Member
H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E	Anggota Member

Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Risalah Rapat

Berdasarkan ketentuannya, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam rapat, Dewan Pengawas Syariah memberikan nasihat dan saran terkait dengan pengembangan usaha pembiayaan syariah Perseroan. Dewan Pengawas Syariah juga secara berkala memberikan evaluasi terkait kesesuaian pengembangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip usaha syariah.

Appointment, Resignation and Term of Office of the Sharia Supervisory Board

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Sharia Supervisory Board comprises at least 1 (one) or more sharia expert(s) appointed by the GMS on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

The tenure of members of the Sharia Supervisory Board is based on the GMS resolution. Any Sharia Supervisory Board member may resign at any time, provided that the resigning member shall submit a resignation letter to the Company at the latest of 30 (thirty) days prior to his resignation effective date. The Company shall conduct a GMS within 90 (ninety) days upon the receipt of the resignation letter by the Company.

Total Members and Composition of the Sharia Supervisory Board

If the Sharia Supervisory Board consists of more than one person, the composition will be arranged with the following provisions:

- A Chairman of the Sharia Supervisory Board;
- A member of the Sharia Supervisory Board or more.

As stated in the Deed of Meeting Resolution No. 30 dated May 31, 2017, made before Rini Yulianti, S.H, Notary in East Jakarta the composition of the Sharia Supervisory Board is as follows:

Sharia Supervisory Board Meeting and Minutes of Meeting

Based on the provision, the Sharia Supervisory Board is required to periodically hold at least 6 (six) meetings in 1 (one) year. In the Meetings, the Sharia Supervisory Board gives advice and suggestions regarding the Company's sharia financing business development. The Sharia Supervisory Board also regularly evaluates the compliance of the Company's business development with sharia principles.

Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board

Sepanjang 2019, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Throughout 2019, the Sharia Supervisory Board had convened 6 (six) meetings with the following attendance:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Kehadiran Attendance
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	6	6	100 %
Ir. H. Muhammad Nadratuzaman Hosen	6	5	83,33%
H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E	6	5	83,33%

No.	Tanggal Rapat Date	Peserta Rapat Participants
1.	31 Januari January 2019	DPS, Kepala Unit Usaha Syariah & <i>Function</i> terkait <i>Sharia Supervisory Board, Head of Sharia Business Unit & relevant Functions</i>
2.	27 Februari February 2019	
3.	25 April 2019	
4.	8 Oktober October 2019	
5.	12 November 2019	
6.	10 Desember November 2019	

Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang 2019, Dewan Pengawas Syariah telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan, dengan rincian sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Training

Throughout 2019, the Sharia Supervisory Board has participated in several trainings, with the following details:

Nama Name	Sertifikat Certificates	Penyelenggara Organizers	Tanggal dan Tempat Date and Venue
Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA	Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian, dan Fintech Syariah. Workshop on Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2019 in Financing, Guarantee, Venture Capital, Pawnshop, and Sharia Fintech.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council	Jakarta, 19 September 2019
Dr. Ir. H.M. Nadratuzaman Hosen	Narasumber di Workshop Keuangan Syariah 2019 Speaker at the Sharia Finance Workshop 2019	IBFI Trisakti	Mataram, 20-21 Juni June 2019
	Narasumber di Pelatihan Manajemen Gadai Syariah Angkatan I/2019 Speaker at the Sharia Pawn Management Training Batch I / 2019	PT Pegadaian dan IBFI Trisakti	Surabaya, 29 Juni June 2019
	Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, Pergadaian, dan Fintech Syariah. Workshop on Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) Sharia Supervisory Board 2019 in Financing, Guarantee, Venture Capital, Pawnshop, and Sharia Fintech.	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia National Sharia Council - Indonesian Ulema Council	Jakarta, 19 September 2019
H. Muh. Taufik Darmansyah, SE, CPA	Seminar Nasional "Transformasi Perbankan Syariah dan Sosialisasi Implementasi Laporan Bulanan BPR Syariah" National Seminar of "Sharia Banking Transformation and Disseminating Sharia BPR Monthly Report Implementation"	Kompartemen BPR Syariah ASBISINDO	-

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Remuneration Policy Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Penentuan besarnya remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dilimpahkan wewenangnya oleh RUPS kepada Presiden Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The authority to determine the remuneration amount for Members of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board is delegated by the GMS to the President Commissioner by taking into account the proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Penentuan besarnya remunerasi Anggota Direksi dilimpahkan wewenangnya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

The authority to determine the remuneration amount for Members of the Board of Directors is delegated by the GMS to the Board of Commissioners with due observance to the proposal and recommendation of the Company's Nomination and Remuneration Committee.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Di bawah ini merupakan rincian paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi:

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structures

The remuneration policy package and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors is detailed below:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah Dewan Komisaris Total of Board of Commissioners
Di atas Rp2,5 miliar Above Rp2.5 billion	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	-
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	5
Di atas Rp500 juta Above Rp500 million	-
Direksi Board of Directors	
Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *) Total Remuneration per Person in 1 year	Jumlah Direksi Total of Board of Directors
Di atas Rp2,5 miliar Above Rp2.5 billion	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2,5 miliar Above Rp1 billion to Rp2.5 billion	4
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion	1
Di atas Rp500 juta Above Rp500 million	-

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Remuneration Policy Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration and Other Facilities	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun Total received in 1 year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Rupiah Million	Orang Person	Jutaan Rupiah Rupiah Million
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, bonus, routine allowance, tantiem, and other facilities)	5	3.480	5	12.714

Dengan demikian, jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp16,2 miliar.

Penetapan Remunerasi Direksi

Dalam menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Direksi, beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku di industri Multifinance
2. Kinerja keuangan Perseroan
3. Pencapaian kinerja masing-masing anggota Direksi dengan indikator utama seperti keuntungan Perseroan, pertumbuhan penjualan, portofolio risiko serta produktivitas
4. Kewajaran dengan memperhatikan peer group
5. Komposisi pendapatan tetap dan variable
6. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dan pendek perseroan.

As such, total remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2019 is Rp16,2 billion.

Board of Directors Remuneration Criteria

Several basis of considerations in developing the remuneration structure, policy and amount for the Board of Directors are as follows:

1. The remuneration applicable in the Multifinance industry
2. The Company's financial performance.
3. The performance achievements of each member of the Company's Board of Directors with key indicators such as profitability, sales growth, risk profiles, and productivity.
4. Fairness by considering peer group
5. Composition of fixed and variable revenues
6. Consideration of long term and short term targets and strategy.

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Meetings Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sebelum rapat dilaksanakan, Presiden Komisaris terlebih dahulu melakukan pemanggilan rapat terhadap anggota Dewan Komisaris. Jika Presiden Komisaris berhalangan, pemanggilan rapat dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya. Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat lainnya, sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dengan kondisi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Dalam pelaksanaannya, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, yang hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan 9 (sembilan) kali rapat, dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Board of Commissioners Meeting Convention Procedures

The President Commissioner shall announce the meeting to members of the Board of Commissioners prior to the meeting. In the event that the President Commissioner is unavailable, meeting announcement can be organized by the other 2 (two) Board of Commissioners members. Announce of meeting shall state the event, date, time and meeting location.

In the event that all Board of Commissioners members are present or represented, the announcement is not required and the Board of Commissioners Meeting can be conducted in the domicile or in the Company's main business activity location or other venues, as suggested by the Board of Commissioners. Legally binding decision may be generated from the Board of Commissioners Meeting in such a condition.

The Board of Commissioners Meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unavailable, which does not need to be proven to the third party, the Meeting will be chaired by a member of Board of Commissioners appointed by and from the Board of Commissioners members attending the meeting.

Throughout 2019, the Company's Board of Commissioners has convened 9 (nine) meetings, with the following attendance and Agenda:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
I Nyoman Tjager	9	9	100
Robbyanto Budiman	9	8	88,9
Garibaldi Thohir	9	8	88,9
Thilagavathy Nadason	9	7	77,8
Myrnie Zachrani Tamin	9	9	100

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Meetings Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	16 Januari 2019 January 16, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Desember 2018 December 2018 Performance
2	14 Februari 2019 February 14, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Januari 2019 January 2019 Performance
3	23 April 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Maret 2019 March 2019 Performance
4	16 Mei 2019 May 16, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja April 2019 April 2019 Performance
5	18 Juli 2019 July 18, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Juni 2019 June 2019 Performance
6	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Juli 2019 July 2019 Performance
7	12 September 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Agustus 2019 August 2019 Performance
8	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja September 2019 September 2019 Performance
9	21 November 2019	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kinerja Oktober 2019 October 2019 Performance

Rapat Gabungan

Berdasarkan peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan.

Selama tahun 2019 rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Joint Meetings

Pursuant to OJK regulation No.33/POJK.04/2014, the Board of Commissioners shall conduct joint meeting with the Board of Directors periodically at least once in 4 (four) months.

In 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings were held 9 (nine) times with the attendance and agenda as follows:

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Meetings Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Djaja Suryanto Sutandar	9	9	100
Simon Tan Kian Bing*)	4	4	100
Anthony Y Panggabean	9	9	100
Zacharia Susantadiredja	9	9	100
Njauw Vido Onadi	9	9	100
Wibowo**)	2	2	100
I Nyoman Tjager	9	9	100
Robbyanto Budiman	9	8	88,9
Garibaldi Thohir	9	8	88,9
Thilagavathy Nadason	9	7	77,8
Myrnie ZachraniTamin	9	9	100

Catatan:

*) Simon Tan Kian Bing diberhentikan sebagai Direktur Independen Perseroan efektif sejak tanggal 15 Juli 2019.

***) Pengangkatan Wibowo akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Per posisi 31 Desember 2019, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut masih dalam proses dan beliau pada saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer

*) Simon Tan Kian Bing was dismissed as the Independent Director of the Company effective as of July 15, 2019.

***) Wibowo's appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. As of December 31, 2019, the approval of the Financial Services Authority is still in process and he currently serves as Chief Marketing Officer

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Peserta Rapat Meeting Participants	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	16 Januari 2019 January 16, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Desember 2018 December 2018 Performance
2	14 Februari 2019 February 14, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Januari 2019 January 2019 Performance
3	23 April 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Maret 2019 March 2019 Performance
4	16 Mei 2019 May 16, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja April 2019 April 2019 Performance
5	18 Juli 2019 July 18, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Juni 2019 June 2019 Performance
6	20 Agustus 2019 August 20, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Juli 2019 July 2019 Performance
7	12 September 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Agustus 2019 August 2019 Performance
8	17 Oktober 2019 October 17, 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja September 2019 September 2019 Performance
9	21 November 2019	Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors	Kinerja Oktober 2019 October 2019 Performance

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Meetings Of The Board Of Commissioners And Board Of Directors

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi harus diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2019, Direksi Perseroan telah melakukan 44 (empat puluh empat) kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Djaja Suryanto Sutandar	44	37	84
Simon Tan Kian Bing*)	23	20	87
Anthony Y Panggabean	44	41	93
Zacharia Susantadiredja	44	41	93
Njauw Vido Onadi	44	39	89
Wibowo**)	9	7	78

Catatan:

*)Simon Tan Kian Bing diberhentikan sebagai Direktur Independen Perseroan efektif sejak tanggal 15 Juli 2019.

***)Pengangkatan Wibowo akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Per posisi 31 Desember 2019, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut masih dalam proses dan beliau pada saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer

*) Simon Tan Kian Bing was dismissed as the Independent Director of the Company effective as of July 15, 2019.

**) Wibowo's appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. As of December 31, 2019, the approval of the Financial Services Authority is still in process and he currently serves as Chief Marketing Officer

Board of Directors Meeting Convention Procedures

As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meeting shall be convened periodically at least once every month and/or may be organized at any time if necessary, on the request of one or more Board of Directors members or based on written request of one or more Board of Commissioners members, or the written request from 1 (one) or more shareholders which represent 1/10 (one-tenth) of the total shares with legitimate voting rights.

Throughout 2019, the Company's Board of Directors has conducted 44 (fourty four) meetings, with the following attendance:

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama & Pemegang Saham Pengendali

Affiliates Between Members Of The Board of Directors, Board of Commissioners and Majoring & Controlling Shareholders

Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut:

The disclosure of financial and family relationships between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majoring Shareholders and Controlling Shareholders are as follows:

Tabel Hubungan Keuangan Dewan Komisaris
Table of Financial Relations of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Financial Relations							
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majoring Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner		√		√			√	√
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner		√		√		√		√
Garibaldi Thohir	Komisaris Commissioner		√		√		√		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√			√	√
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner		√		√			√	√

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama & Pemegang Saham Pengendali

Affiliates Between Members Of The Board of Directors, Board of Commissioners and Majoring & Controlling Shareholders

Tabel Hubungan Keluarga Dewan Komisaris
Table of Family Relations of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Family Relations							
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Major Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
I Nyoman Tjager	Presiden Komisaris/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner		√		√		√		√
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner		√		√		√		√
Garibaldi Thohir	Komisaris Commissioner		√		√		√		√
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√
Thilagavathy Nadason	Komisaris Commissioner		√		√		√		√

Tabel Hubungan Keuangan Direksi
Table of Financial Relations of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Financial Relations							
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majoring Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director		√		√		√		√
Zacharia Susantadiredja	Direktur I Director		√		√		√		√
Anthony Y Panggabean	Direktur I Director		√		√		√		√
Njauw Vido Onadi	Direktur I Director		√		√		√		√
Wibowo*)	Direktur I Director		√		√		√		√

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama & Pemegang Saham Pengendali

Affiliates Between Members Of The Board of Directors, Board of
Commissioners and Majoring & Controlling Shareholders

Tabel Hubungan Keluarga Direksi
Table of Family Relations of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga Family Relations							
		Dewan Komisaris Board of Commissioner		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Utama Majoring Shareholders		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur President Director		√		√		√		√
Zacharia Susantadiredja	Direktur I Director		√		√		√		√
Anthony Y Panggabean	Direktur I Director		√		√		√		√
Njauw Vido Onadi	Direktur I Director		√		√		√		√
Wibowo*)	Direktur I Director		√		√		√		√

*) Pengangkatan Wibowo akan berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Per posisi 31 Desember 2019, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut masih dalam proses dan beliau pada saat ini menjabat sebagai Chief Marketing Officer.

*) Wibowo's appointment will be effective after obtaining approval from the Financial Services Authority. As of December 31, 2019, the approval of the Financial Services Authority is still in process and he currently serves as Chief Marketing Officer.

Komite Audit

Audit Committee

Dasar Hukum

- POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/BOC-WOM/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Juni 2017.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank telah memiliki Piagam Komite Audit yang mengatur antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab, keanggotaan, prosedur kerja dan rapat dalam hal pelaksanaan kegiatan Komite Audit. Piagam Komite Audit terakhir dikiniknkan tanggal 11 Desember 2017.

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/BOC-WOM/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Juni 2017, Susunan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Name	Posisi di Komite Position in the Committee	Jabatan di Perusahaan Position in the Company	Periode Jabatan Terms of Office
Myrnie Zachraini Tamin	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	2 Juni 2017 - RUPS Tahunan 2020 June 2, 2017 - Annual GMS 2020
Setiawan Kriswanto	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	2 Juni 2017 - RUPS Tahunan 2020 June 2, 2017 - Annual GMS 2020
Patricia Marina Sugondo	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	2 Juni 2017 - RUPS Tahunan 2020 June 2, 2017 - Annual GMS 2020

Legal Basis

- POJK No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee
- POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies
- POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Financing Companies
- Board of Commissioners Decree No.001/BOC-WOM/2017 concerning the Establishment of the Audit Committee on June 2, 2017.

Audit Committee Charter

The Bank's Audit Committee has an Audit Committee Charter which regulates, among others, the duties and responsibilities, membership, work procedures and meetings regarding the implementation of the Audit Committee's activities. The Audit Committee Charter was last updated on December 11, 2017.

Structure and Membership

Based on the Board of Commissioners Decree No.001/BOC-WOM/2017 concerning the Establishment of the Audit Committee on June 2, 2017, the Audit Committee Membership Structure is as follows:

Komite Audit

Audit Committee

Myrnie Zachraini Tamin

Ketua/Chairman
55 Tahun/Years old
Warga Negara Indonesia/Indonesian Citizen

Masa Jabatan | Terms of Office

2 Juni 2017 - RUPS Tahunan 2020
June 2, 2017 - Annual GMS 2020

Dasar Pengangkatan | Appointment Basis

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BOC-WOM/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Juni 2017
Board of Commissioners Decree No. 001/BOC-WOM/2017 concerning the formation of the Audit Committee on June 2, 2017

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Tersedia dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Available at BOC Profile Section in this Annual Report

Pengalaman Kerja | Professional Experience

Tersedia dalam bagian Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini
Available at BOC Profile Section in this Annual Report

Patricia Marina Sugondo

Anggota/Pihak Independen
Member/Independent Party
52 Tahun/Years Old
Warga Negara Indonesia/Indonesian Citizen

Masa Jabatan | Terms of Office

2 Juni 2017 - RUPS Tahunan 2020
June 2, 2017 - Annual GMS 2020

Dasar Pengangkatan | Appointment Basis

Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/BOC-WOM/2017 tentang Pembentukan Komite Audit tanggal 2 Juni 2017
Board of Commissioners Decree No. 001/BOC-WOM/2017 concerning the formation of the Audit Committee on June 2, 2017

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Meraih Gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 1990
Obtained a bachelor degree in Accounting from Atmajaya Catholic University in 1990

Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Assurance and Business Advisory Services - Senior Manager (1990 - 2002)
- PT GNV Solution (previously PT GNV Consulting) (2008 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Samudera Indonesia Tbk (2009 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2010 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Surya Citra Media Tbk (2017 - sekarang)
- Anggota Komite Audit PT Sarana Media Nusantara Tbk (2018 - sekarang)
- Assurance and Business Advisory Services - Senior Manager (1990 - 2002)
- PT GNV Solution (previously PT GNV Consulting) (2008 - present)
- Audit Committee Member PT Samudera Indonesia Tbk (2009 - present)
- Audit Committee Member PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (2010 - present)
- Audit Committee Member PT Surya Citra Media Tbk (2017 - present)
- Audit Committee Member PT Sarana Media Nusantara Tbk (2018 - present)

Setiawan Kriswanto

Anggota/Pihak Independen
Member/Independent Party
59 Tahun/Years Old
Warga Negara Indonesia/Indonesian Citizen

Riwayat Pendidikan | Educational Background

Meraih Gelar Master, Manajemen Sumber Daya Manusia, Krisna Dwipana, Jakarta, 2002. Gelar Sarjana Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA), Surabaya, 1986. D4 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta 1991, dan D3 Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta 1982.

Obtained Master Degree in Human Resources Management from Krisna Dwipana, Jakarta 2002. Bachelor Degree in Accounting from Indonesia Economic Science Academy (STIESA), Surabaya 1986. D4 Accounting from State Accounting Academy (STAN), Jakarta 1991, and D3 Accounting from State Accounting Academy (STAN), Jakarta 1982.

Riwayat Pekerjaan | Professional Background

- Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP – Jawa Timur) (1982 – 1991)
 - Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Bank Dagang dan Industri (Bank BDI – Jakarta) (1991 – 1999)
 - Ketua Tim Pengelola Sementara (TPS) pada Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) – Jakarta (1999 – 2002)
 - Anggota Komite Audit Bank Danamon (2002 – 2008)
 - Anggota Komite Audit Maybank (BII) (2008 – 2012)
 - Anggota Komite Audit Bank BRI AGRO (2010 – 2015)
 - Anggota Komite Audit EXIM Bank (2013 – 2018)
 - Anggota Komite Audit CSUL Finance (2015 – 2021)
 - Anggota Komite Audit UOB Bank (2018 – 2019)
 - Anggota Komite Audit WOM Finance (2014 – 2020)
- Auditor of Financial and Development Supervisory Agency (BPKP – Jawa Timur) (1982 – 1991)
 - Head of Internal Audit Unit, Bank Dagang & Industri (Bank BDI – Jakarta) (1991 – 1999)
 - Acting Head of Management Team, Bank Restructuring Agency – Jakarta (1999 – 2002)
 - Audit Committee Member Bank Danamon (2002 – 2008)
 - Audit Committee Member Maybank (BII) (2008 – 2012)
 - Audit Committee Member Bank BRI AGRO (2010 – 2015)
 - Audit Committee Member EXIM Bank (2013 – 2018)
 - Audit Committee Member CSUL Finance (2015 – 2021)
 - Audit Committee Member UOB Bank (2018 – 2019)
 - Audit Committee Member WOM Finance (2014 – 2020)

Pengalaman Kerja | Professional Experience

- Regulasi dan Tantangan Globalisasi bagi Profesi Akuntan Manajemen, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI)
- Empowering Audit Committee: As the Ultimate Guardian of Investors Interests and Corporate Accountability, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- Kepatuhan Pajak di Era Transparansi dan Konsekuensi Hukumnya, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
- Efektifitas Oversight Dewan Komisaris dan Komite Audit: Pembelajaran dari PT. SNP Finance, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
- Regulations and Challenges of Globalization for the Management Accountant Profession, Indonesian Management Accountant Association (IAM)
- Empowering Audit Committee: As the Ultimate Guardian of Investors Interests and Corporate Accountability, Indonesian Audit Committee Association (IKAI)
- Taxes Compliance in Transparency Era and Its Legal Consequences, Indonesian Commissioners and Directors Institution (LKDI)
- Oversight Effectiveness of the Board of Commissioners and Audit Committee: Learning from PT SNP Finance, Indonesian Audit Committee Association (IKAI)

Komite Audit

Audit Committee

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit selama Tahun 2019

Untuk tahun buku 2019, Komite Audit telah menjalankan fungsinya guna membantu Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit *Audit Committee Charter*, di antaranya:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS Tahunan mengenai penunjukan Akuntan Publik (AP) yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. Rekomendasi didasarkan pula pada hasil evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan periode tahun sebelumnya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, baik audit oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun auditor ekstern dan regulator, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit ialah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan terkait lainnya dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*.
- Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP); memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan; memastikan manajemen Perseroan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP.

Audit Committee Activity Implementations in 2019

In the fiscal year 2019, the Audit Committee has carried out its functions to assist the Board of Commissioners by referring to the Audit Committee Charter, including:

- Reviewing financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners to be decided by the Annual GMS regarding the appointment of a Public Accountant (AP) based on independence, the scope of assignment and fees. Recommendations are also based on the results of an evaluation of the Implementation of the Audit Services for Annual Historical Financial Information for the previous year period.
- Monitor and evaluate the planning and implementation of audits as well as monitoring the follow up of audit results, both audits by the Internal Audit Unit (IAU) as well as external auditors and regulators, in order to assess the adequacy of internal control.

Audit Committee Duties and Responsibilities

Audit Committee's duties and responsibilities is as follows:

- Conducting a review on financial information that will be issued by the Company to the public and/or regulators, such as financial statements, annual report and other reports related to the Company's financial information.
- Conducting a review on the Company's compliance with laws and regulations in relation with the Company's business activities, including and not limited to the laws and regulations in capital market, and/ or regulations concerning good corporate governance.
- Supervising the implementation of audit and monitoring the audit findings by a Public Accountant (AP) and/or a Public Accounting Firm (KAP); ensuring the AP and/or KAP to immediately communicate the significant findings to the Company's Audit Committee to be submitted to the Company's Board of Commissioners; ensuring the management of the Company to conduct follow up on the findings of AP and/or KAP.

Komite Audit

Audit Committee

- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dengan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan berdasarkan independensi, ruang lingkup dan honorarium/imbal jasa.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan menyusun serta menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tembusan kepada Direksi Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan Audit Internal.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, dan/atau penggantian, dan/atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
- Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas Piagam Audit Internal Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan unit audit internal.
- Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
- Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Providing independent opinions in the event of dissenting opinions between the Management and the AP and/or KAP for the services provided.
- Providing the Board of Commissioners with recommendations on the appointment of a Public Accountant Firm that will provide audit service on annual financial information based on independence, scope and honorarium/rewards.
- Conducting evaluation on the implementation of audit service on annual financial information by the AP and/or KAP and preparing and submitting a report on the evaluation to the Board of Commissioners with a copy to the Board of Directors of the Company.
- Reviewing the audit performed by the Company's internal auditor as well as monitoring the follow-up conducted by the Board of Directors on the internal audit findings.
- Reviewing complaints related to the accounting process and financial reporting.
- Reviewing and providing advice on potential conflict of interests for the Board of Commissioners.
- Providing recommendations to the Board of Commissioners concerning appointment, and/ or replacement, and/or dismissal of Chairman of Internal Audit of the Company.
- Evaluating and submitting the evaluation on the Internal Audit Charter to the Company's Board of Commissioners before being approved by the Board of Commissioners.
- Conducting evaluation on the annual work plan of the internal audit unit.
- Ensuring the effectiveness of internal control system
- Ensuring the Company's management to build work culture, which encourages all employees to implement the Company's code of conduct.
- Ensuring the confidentiality of the Company's documents, data and information.
- Performing the specific duties of the Board of Commissioners of the Company submitted in writing as long as the duties are not contradictory to the prevailing laws and regulations and with the aim to assist the duties and functions of the Board of Commissioners of the Company in conducting supervision in accordance with provision of the Articles of Association of the Company and the prevailing laws and regulations.

Komite Audit

Audit Committee

Wewenang

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit Audit Internal Perseroan, fungsi yang menjalankan manajemen risiko dan AP dan/atau KAP yang memberikan jasa kepada Perseroan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan.
- Komite Audit Perseroan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Frekuensi dan Kehadiran dalam Rapat

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sedikitnya paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pelaksanaan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat *dissenting opinions*, yang ditandatangani oleh Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.

Sepanjang 2019, Komite Audit menyelenggarakan 11 (sebelas) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Myrnie Zachraini Tamin	11	11	100%
Setiawan Kriswanto	11	7	63,6%
Patricia Marina Sugondo	11	11	100%

Authorities

In performing its duties and responsibilities, the Company's Audit Committee has the following authorities:

- Accessing documents, data and information of the Company concerning employees, funds, assets and the Company's resources, which are required in the duties implementation.
- Directly communicating with the Company's employees, including the Board of Directors and Internal Audit Unit, performing the management of risk and the AP and KAP Firm which provides services to the Company in performing the Audit Committee's duties and responsibilities.
- The Audit Committee is allowed to appoint an independent party outside members of the Audit Committee to assist the duties implementation (if necessary) under the approval from the Board of Commissioners.
- Performing other authorities granted by the Board of Commissioners.

Meeting Frequency and Attendance

The Audit Committee shall hold meetings regularly, at the minimum 1 (one) time in 3 (three) months. The meeting can only be held if it is attended by more than 1/2 (one-two) of the members. The decision of the Audit Committee's meeting shall be made by consensus. The implementation of the Audit Committee's meeting is recorded in a minute, including in the event of dissenting opinions, signed by all members of the Audit Committee present in the meeting and submitted to the Board of Commissioners and all members of the Audit Committee.

Throughout 2019, the Audit Committee held 11 (eleven) meetings with the following attendance:

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran melakukan kajian serta rekomendasi mengenai kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta kesesuaiannya dengan penerapan praktik *Good Corporate Governance*. Komite ini bertanggungjawab secara langsung kepada Dewan Komisaris.

The Nomination and Remuneration Committee has a role to review and provide recommendation on the Remuneration policy and amount for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as its appropriateness with the Good Corporate Governance practices. This Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak selaku Ketua.

Nomination and Remuneration Committee Members

The Nomination and Remuneration Committee membership consists of 3 (three) members, one member is an Independent Commissioner that serves as Chairman.

Nama Name	Jabatan dalm Komite Position in the Committee	Jabatan Struktural Structural Position
Myrnie Zachraini Tamin	Ketua Chairman	Komisaris independen Independent Commissioner
Robbyanto Budiman	Wakil Ketua Vice Chairman	Wakil Presiden Komisaris Vice President Commissioner
Ekanto Wijonosunu	Anggota & Sekretaris Member & Secretary	Chief Human Capital Officer

Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas serta tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan, kriteria serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Nomination and Remuneration Committee Duties and Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee duties and responsibilities are as follows:

Related to Nomination Function:

- Develop and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding policy, criteria and procedures of appointment and/or replacement of members of the Company's Board of Commissioners and members of the Company's Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

- | | |
|---|---|
| <p>b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan suksesi atas nominasi anggota Direksi Perseroan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang Perseroan.</p> <p>c. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi Perseroan dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. <p>d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris Perseroan dan atau Direksi Perseroan, serta membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi Perseroan dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan tolak ukur yang disusun oleh Komite.</p> <p>e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai program pengembangan kemampuan Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>f. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>g. Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.</p> | <p>b. Develop and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding succession policy of the Company's Board of Directors members' nomination, which is aimed to maintain the continuity of leadership regeneration process in the Company in order to maintain business sustainability and longterm objectives of the Company.</p> <p>c. Evaluate and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners. • Performance evaluation for the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners. <p>d. Provide recommendation to the Company's Board of Commissioners on the performance assessment of the Company's Board of Directors, as well as assisting the Board of Commissioners in conducting performance assessment for members of the Company's Board of Directors and/or members of the Company's Board of Commissioners based on the benchmark defined by the Committee.</p> <p>e. Provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the competence development of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</p> <p>f. Provide recommendation regarding the candidates' members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors that fulfill the requirements to the Company's Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company.</p> <p>g. Other duties delegated by the Company's Board of Commissioners in relation to nomination function of the Company.</p> |
|---|---|

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan. Struktur remunerasi yang dimaksud ketentuan ini dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan bersifat tetap dan variabel.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Perseroan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- Hal-hal lain yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris Perseroan terkait fungsi nominasi Perseroan.

Perseroan telah memiliki pedoman Komite nominasi dan atau remunerasi yang dituangkan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 16 November 2017 oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya adalah:

- Melakukan pembahasan usulan bonus untuk Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pembahasan besaran kenaikan gaji tahunan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pembahasan usulan *self assessment* untuk Dewan Komisaris,

Related to Remuneration Function:

- Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. The remuneration structure defined in this provision can be in the form of fixed and variable salary honorarium, incentive, and/or allowances.
- Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
- Prepare and provide recommendation to the Company's Board of Commissioners regarding the remuneration amount for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of.
- Perform evaluation for at least once in a year on the remuneration structure, policy and amount that have been set in the Company.
- Other duties delegated by the Company's Board of Commissioners in relation to remuneration function of the Company.

The Company has in place the nomination and or remuneration committee guidelines that stated into the Nomination and Remuneration Committee Charter established on November 16, 2017 by the Company's Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Activities

The Nomination and Remuneration Committee has implemented the following activities:

- Discussion on bonus proposal for the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Discussion on the increase amount of annual salary of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Discussion on self-assessment proposal for the Board of Commissioners.

Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi dan Remunerasi telah 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meetings Frequency and Attendance

Throughout 2019, the Nomination and Remuneration Committee has convened 5 (five) meetings with the following attendance:

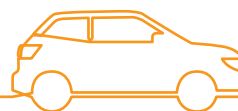
Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
Myrnie Zachraini Tamin	5	5	100
Robbyanto Budiman	5	5	100
Ekanto Wijonosunu	5	3	60
Lian Nie*	5	2	40

*Efektif tanggal 23 April 2019, Lian Nie tidak menjabat sebagai anggota dan merangkap Sekretaris Komite Nominasi & Remunerasi di gantikan oleh Ekanto Wijonosunu | Effective from April 23, 2019, Lian Nie does not serve as Member and Secretary of Nomination and Remuneration Committee and was replaced by Ekanto Wijonosunu

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting Minutes

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance	% Kehadiran % Attendance
11 Maret 2019 March 11, 2019	Besaran bonus <i>performance</i> 2018 WOM Finance WOM Finance 2018 Performance Bonus Nominal	Myrnie Zachraini Tamin Robbyanto Budiman Lian Nie *	100
12 Maret 2019 March 12, 2019	Besaran & dampak <i>Annual Increase</i> 2018 WOM Finance WOM Finance 2018 Annual Increase Nominal and Impact	Myrnie Zachraini Tamin Robbyanto Budiman Lian Nie *	100
5 Juli 2019 July 5, 2019	Penetapan Uang Pisah Direksi Board of Directors Severance Determination	Myrnie Zachraini Tamin Robbyanto Budiman Ekanto Wijonosunu	100
1 Agustus 2019 August 1, 2019	Usulan salary dan benefit calon direktur marketing Perseroan Proposed salary and benefits for the Company's marketing director candidates	Myrnie Zachraini Tamin Robbyanto Budiman Ekanto Wijonosunu	100
21 November 2019 November 21, 2019	Usulan Pergantian Komite Audit Proposed Substitution of the Audit Committee	Myrnie Zachraini Tamin Robbyanto Budiman Ekanto Wijonosunu	100



Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee

Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

Dalam rangka regenerasi jabatan-jabatan di internal perusahaan terutama jabatan-jabatan kritikal termasuk Direksi, Perseroan telah melakukan pengelolaan suksesi disetiap level organisasi untuk mempersiapkan sumber daya internal yang siap mengisi kebutuhan organisasi dalam jangka panjang.

Pengaturan mengenai suksesi ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penempatan kader yang minimal setara atau lebih baik dari karyawan yang digantikan, mencegah penurunan kapabilitas organisasi atau bahkan krisis sumber daya akibat kehilangan *key person* tanpa kesiapan pengganti, serta memastikan penguasaan pengetahuan eksklusif individu menjadi pengetahuan organisasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kapabilitas Perseroan.

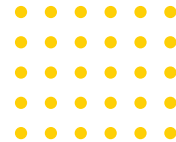
Kriteria untuk menetapkan calon suksesi Direksi adalah hasil penilaian kinerja dan rekomendasi hasil *review/assessment* kompetensi yang didalamnya termasuk kepemimpinan.

Board of Directors Succession Policy

For the regeneration of internal positions in particular the critical positions including the Board of Directors, the Company has undertaken the succession management in every organization level to prepare internal resources that are ready to support the long-term organization requirements.

This succession aims to ensure appropriateness in the candidates placements at least equal or far better than the replaced employees, prevent the declining capability of organization or even resources crises due to the lost of key persons without readiness for replacement, as well as ensuring that individual exclusive knowledge becomes the organization knowledge thereby can enhance the capabilities and ability of the Company.

The criteria to determine the Board of Directors succession candidates are the results of the performance assessment and recommendation from the competencies review/assessment results, which include the leaderships.



Komite Pemantau Risiko

Risk Oversight Committee

Pembentukan Komite Pemantau Risiko oleh Dewan Komisaris bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pembentukan komite tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Komite Pemantau Risiko memonitor proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan, guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perseroan dan pengendalian risiko yang baik.

Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman Komite Pemantau Risiko (Piagam Komite Pemantau Risiko) tanggal 21 Mei 2015, susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua: Presiden Komisaris

Wakil Ketua: Wakil Presiden Komisaris

Anggota: Komisaris, Komisaris Independen

Independensi Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan pedoman penerapan pemantau risiko, Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang Komisaris dengan Keanggotaan Pemantau Risiko bersifat Tetap dan Tidak Tetap. Anggota Tetap ialah mayoritas Komisaris, yaitu lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah anggota Komisaris, yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen dalam jangka waktu tertentu.

Keputusan Komite Pemantau Risiko

Keputusan yang tertulis dalam risalah rapat disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan tambahan yang kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya, sebelum kemudian ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua. Risalah rapat adalah hasil keputusan yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan unit kerja terkait.

The establishment of Risk Oversight Committee by the Board of Commissioners aims to support the effectiveness of its duties and responsibilities implementation. The establishment is also beneficial to improve public trust on the management of the Company. This Committee monitors the continuous improvement on policies, procedures and practices on all levels within the Company, in order to ensure the implementation of good Company management and appropriate risk control.

Risk Oversight Committee Members

Based on the Risk Oversight Committee Guidelines (Risk Oversight Committee Charter) dated May 21, 2015, the composition of Risk Oversight Committee members is as follows:

Chairman: President Commissioner

Vice Chairman: Vice President Commissioner

Member: Commissioner, Independent Commissioner

Risk Oversight Committee Independency

Based on the risk monitoring implementation guidelines, the Risk Oversight Committee is chaired by a Commissioner with Permanent and Temporary Membership. The Permanent Members are the majority of the Board of Commissioners, comprising 50% of the total members, appointed by the President Commissioner to continuously perform the authority and responsibility for a certain period of time.

Risk Oversight Committee Decisions

The decisions written in the minutes of meeting are circulated to all members to obtain additional inputs that will then be reviewed in the next meeting agenda before being signed by the Chairman/Vice Chairman. The minutes of meeting are the records of the lawful decisions that will be circulated to the relevant Board of Directors and units.

Komite Pemantau Resiko Risk Oversight Committee

Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan dan strategi terhadap manajemen risiko dalam profil risiko.
- Memantau rencana bisnis perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas informasi yang didapat dari hasil monitoring tersebut.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/luar biasa bila diperlukan. Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah. Seluruh hasil rapat Komite Pemantau Risiko juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Risk Oversight Committee Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee include:

- Evaluate the risk management policies and strategies in the risk profile.
- Monitoring the Company's business plan prior to the Board of Commissioners' approval.
- Monitoring and evaluate the implementation of the Risk Management Committee.
- Provide the Board of Commissioners with inputs on the information acquired from the monitoring results.

Meeting Frequency and Attendance

The Risk Oversight Committee holds at least 4 (four) regular meetings in a year and non-regular/extraordinary meetings if deemed necessary. A Chairman leads the meeting of Risk Oversight Committee. If the Chairman is absent, the Vice Chairman will lead the meeting.

In 2019, the Risk Oversight Committee has convened 10 (ten) meetings. All of the meetings were declared valid. All of the Risk Oversight Committee meeting results have been recorded in the minutes and well documented.

Komite Direksi

Board of Director's Committee

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan bisnis Perseroan memiliki risiko tinggi yang jika tidak dikelola dengan efektif akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam rangka mengurangi potensi risiko yang mungkin timbul, Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee/RMC) yang berfungsi untuk memfasilitasi aktifitas pemantauan serta mengevaluasi sistem manajemen risiko Perseroan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, RMC juga berperan dalam memastikan ketepatan tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi dari auditor internal, auditor eksternal serta regulator beserta tingkat efektifitas dari tindak lanjut terhadap temuan.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan pedoman Komite Manajemen Risiko (RMC Charter) tanggal 21 Mei 2015, susunan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Structures	
Ketua Chairman	Presiden Direktur President Director
Wakil Ketua Vice Chairman	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
Anggota dengan Hak Suara Members with voting rights	Direksi Board of Directors
Anggota Tanpa Hak Suara Members without voting rights	Perwakilan dari Direktorat Risiko PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) Semua Pimpinan Satu Tingkat di bawah Dewan Direksi Representative from the Risk Directorate of PT Bank Maybank Indonesia Tbk (MBI) All Leaders are a Level below the Board of Directors
Sekretaris Secretary	Departemen Enterprise Risk Management Enterprise Risk Management Department

Keputusan Komite Manajemen Risiko

Keputusan RMC diambil melalui Rapat. Keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat. Poin-poin keputusan yang diambil oleh RMC tertulis dalam risalah rapat yang kemudian disirkulasikan kepada seluruh anggota untuk mendapatkan masukan tambahan. Poin-poin putusan yang sudah disesuaikan dengan masukan tambahan kemudian dikaji terlebih dahulu pada agenda rapat berikutnya. Risalah Rapat final kemudian sebelum ditanda-tangani oleh Ketua/ Wakil Ketua. Risalah rapat adalah hasil keputusan yang sah untuk kemudian disirkulasikan kepada Direksi dan unit kerja terkait. Keputusan bersifat sah dan mengikat semua anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Apabila diperlukan maka keputusan RMC dapat ditindaklanjuti dengan Surat Kebijakan dan/atau Memorandum oleh unit kerja yang bertanggung jawab.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Company's business activities have potential high risk that may arise. To prevent this, the Board of Directors has established the Risk Management Committee (RMC) that has the functions to facilitate monitoring activities and evaluate the Company's risk management system in a sustainable manner. As such, the RMC also plays a role in ensuring the accuracy of management's response towards the findings and recommendations of internal auditor, external auditor and regulators, as well as the level of effectiveness in following up the findings.

Risk Management Committee Structure and Membership

Based on the Risk Management Committee Guidelines (RMC Charter) dated May 21, 2015, the composition of RMC members is as follows:

Risk Management Committee Decisions

The RMC's decisions are made in the Meetings. The decisions shall be taken by deliberations for consensus. Points regarding the decisions made by RMC are written in the minutes that will be circulated to all members to obtain additional input. Points that have been adjusted to the additional input will be reviewed in the next meeting agenda. The Chairman/ Vice Chairman will then sign the Final Minutes. The meeting minutes are the records of the lawful decisions that will be circulated to the relevant Board of Directors and units. The decision is lawful and binding all members, regardless of whether they attend the meeting or not. Whenever it is necessary, the RMC's decisions can be followed up by a Policy Letter and/or Memorandum made by the responsible unit.

Tugas dan Tanggungjawab Komite Manajemen Risiko

Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko meliputi:

- Menyetujui kebijakan manajemen risiko dan perubahan-perubahannya, termasuk strategi kerangka kerja, metodologi dan tools pengelolaan risiko, termasuk rencana-rencana kerja, serta memastikan penerapannya;
- Menyetujui tindakan strategis yang timbul dari peraturan eksternal yang berdampak terhadap praktik manajemen risiko;
- Menyetujui langkah-langkah perbaikan untuk masalah risiko yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Menyetujui produk pembiayaan baru dan layanannya;
- Melakukan kajian terhadap risiko Perseroan secara keseluruhan, termasuk eksposur atas kredit secara berkala, dan memastikan bahwa eksposur dikelola dengan baik;
- Menetapkan koreksi atau ratifikasi atas keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal;
- Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh tingkat organisasi.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuannya, RMC melakukan rapat rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan non-rutin/luar biasa bila diperlukan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.

Pada tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh Rapat yang dilaksanakan telah dinyatakan sah. Seluruh hasil rapat RMC juga telah dinyatakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko 2019

1. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja
 - a. Masing-masing kriteria memiliki score dari 1 s/d 5
 - b. Pilih score untuk masing-masing kriteria sesuai dengan kondisi Perseroan
 - c. Score akhir merupakan rata-rata dari kriteria yang dilakukan penilaian.
 - d. Berikut ini indikator penilaian akhir.

Risk Management Committee Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee include as follows:

- Approve the risk management policies and the amendments thereof, including the risk framework strategy, methodology and management tools, including the work plans, and ensuring their implementation;
- Approve the strategic actions arising from external regulations which affect risk management practices;
- Approve the measures taken to solve riskrelated issues that become the concern of the Financial Services Authority (OJK);
- Approve new financing products along with their services;
- Regularly assessing the Company's risks in general, including exposure to credit periodically, and ensuring that such exposure is managed properly;
- Determine the correction or ratification on business decisions deviating from the normal procedures;
- Foster risk management culture on all levels of the organization.

Meeting Frequency and Attendance

In accordance with the provision, the RMC holds a regular meeting at least 4 (four) times in a year and non-regular/extraordinary meetings whenever necessary. A Chairman leads the meeting. If the Chairman is absent, Vice Chairman will lead the meeting.

In 2018, the Risk Management Committee has convened 10 (ten) meetings. All of the meetings were declared valid. All of the RMC's meeting results have been recorded in the minutes and well documented.

Risk Management Committee Performance Assessment 2019

1. Performance assessment procedures
 - a. Each criterion has a score from 1 to 5
 - b. Choose a score for each criterion according to Company conditions
 - c. The final score is the average of the criteria to be assessed.
 - d. The following are the final assessment indicators.

Komite Direksi

Board of Director's Committee

Score Nilai	Indikator Penilaian Assessment Indicators
1	Sangat Buruk Very Poor
2	Buruk Poor
3	Cukup Baik Sufficient
4	Baik Good
5	Sangat Baik Very Good

- | | |
|--|---|
| <p>2. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko Tingkat kehadiran anggota komite manajemen risiko. Pelaksanaan penyampaian laporan kerja komite manajemen risiko. Pelaksanaan <i>Matters Arising</i>. Dokumentasi laporan kerja komite manajemen risiko. | <p>2. Criteria used in performance appraisal</p> <ol style="list-style-type: none"> The holding of Risk Management Committee meetings. The Risk Management Committee attendance level. The Risk Management Committee Work Report submission. Implementation of Arising Matters. The Risk Management Committee Work Report documentation. |
|--|---|

Kriteria Criteria	Score					Penilaian Assessment
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Rapat Komite Committee Meeting	1 kali dalam setahun 1 times a year	2 kali dalam setahun 2 times a year	4 kali dalam setahun 4 times a year	6 kali dalam setahun 6 times a year	8 kali dalam setahun 8 times a year	5
Tingkat Kehadiran Anggota Komite Committee Member Attendance	Rapat tidak dihadiri oleh Ketua dan wakil ketua komite Meeting unattended by Committee Chairman and Vice-Chairman	Ketua dan Wakil Ketua hadir 2 kali dalam setahun Chairman and Vice-Chairman attended 2 times in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 4 kali dalam setahun Chairman and Vice-Chairman attended 4 times in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 6 kali dalam setahun Chairman and Vice-Chairman attended 6 times in a year	Ketua dan Wakil Ketua hadir 8 kali dalam setahun Chairman and Vice-Chairman attended 8 times in a year	5
Pelaksanaan Penyampaian Laporan Kerja Work Report Submission	Laporan kerja disampaikan tidak tepat waktu Work report not submitted in time				Laporan kerja disampaikan tepat waktu Work report submitted in time	5

Komite Direksi Board of Director's Committee

Kriteria Criteria	Score					Penilaian Assessment
	1	2	3	4	5	
Matters Arising	Matters Arising tidak dijalankan Matters Arising not implemented		Matters Arising dijalankan sebagian Matters arising partially implemented	Seluruh Matters Arising dijalankan Matters Arising completely implemented		5
Dokumentasi Laporan Kerja Work Report Documentation	Laporan Kerja tidak terdokumentasikan Work report not documented		Laporan Kerja terdokumentasikan Work report documented			5
					Rata-rata sore Average Score	5

3. Pihak yang melakukan penilaian Direksi WOM Finance Board of Directors 3. Parties conducting the assessment WOM Finance Board of Directors

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

Pengendalian internal yang efektif dan efisien diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut dibentuk Internal Audit yang merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan yang ikut berperan aktif dalam membangun sistem pengendalian internal Perusahaan dan memastikan bahwa pengendalian internal tersebut berfungsi dengan baik dengan memperhatikan Piagam Audit Internal yang disusun oleh Perusahaan sesuai peraturan OJK.

Profil Kepala Audit Internal

Kepala Audit Internal dijabat oleh Ignatius Prasetya. Beliau menyelesaikan pendidikan Akuntansi dari STIE Perbanas, 2002. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau menjabat sebagai Internal Audit Officer di PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 – 2009), Area Operation Manager di PT Bima Multi Finance (2009 – 2014), Internal Audit Div Head di PT Bima Multi Finance (2014 – 2017), dan Procedure & Sys Dev Sub Div Head di PT WOM Finance (2017 – 2019).

SDM Audit Internal

Per 31 Desember 2019, Jumlah pegawai Internal Auditor sebanyak 33 (tiga puluh tiga), yang meliputi 1 (satu) Kepala Divisi, 5 (lima) Kepala Departemen, 9 (sembilan) Specialist, 7 (tujuh) Section Head, 10 (sepuluh) Officer dan 1 (satu) Staff.

Sertifikasi sebagai profesi audit internal

Belum ada yang mempunyai sertifikat profesi profesional internal audit.

Struktur Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal dipimpin oleh Internal Audit Division Head yang bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan secara fungsional berhubungan dengan Komite Audit. Direksi bertanggung jawab dalam merancang sistem Audit Internal untuk proses pelaporan internal, mencakup seluruh prosedur operasi standar Perseroan dan jalur pelaporan. Dalam pelaksanaannya, Direksi dibantu oleh Divisi Audit Internal, yang menjalankan fungsi independen serta memberikan laporan langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Pihak yang mengangkat dan memberhentikan Ketua Unit Audit Internal adalah Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

The effective and efficient internal control is required to ensure that the business activities are performed in accordance with the business objectives and strategy. As such, the Company established the Internal Audit, as one of the supporting pillars of the Company's Corporate Governance. The Internal Audit takes an active role in building the Company's internal control system and ensuring that the system is functioning well by taking into account the Internal Audit Charter developed by the Company according to the OJK regulations.

Profile of the Head of Internal Audit

The Head of Internal Audit is held by Ignatius Prasetya. He completed Accounting education from STIE Perbanas, 2002. Prior to joining the Company, he served as Internal Audit Officer at PT BFI Finance Indonesia Tbk (2006 - 2009), Area Operation Manager at PT Bima Multi Finance (2009-2014), Internal Audit Div Head at PT Bima Multi Finance (2014 - 2017), and Procedure & Sys Dev Sub Div Head at PT WOM Finance (2017 - 2019).

Internal Audit HR

As of 31 December 2019, the employees in the Internal Audit Division consist of 33 (thirty three) staffs that include 1 (one) Division head, 5 (five) Department heads, 9 (nine) Specialist, 7 (seven) Section Head, 10 (ten) Officer and 1 (one) Staff.

Certification as an internal audit profession

None have professional internal audit professional certificates.

Internal Audit Division Structure

The Internal Audit Division is led by an Internal Audit Division Head responsible to the President Director and has functional relations with the Audit Committee. The Board of Directors is responsible for designing an Internal Audit system for internal reporting process that includes the Company's standard operational procedures and the reporting channels. During the implementation, the Board of Directors is assisted by the Internal Audit Division that performs independent function and reports directly to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.

The party who appoints and dismisses the Head of the Internal Audit Unit is the President Director and is approved by the Board of Commissioners based on recommendations from the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Audit Internal secara umum adalah mendukung Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan operasional Perseroan. Divisi Audit Internal berfungsi sebagai "*business partner*" dan konsultan bagi Direksi dalam melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko atas kegiatan operasional Perseroan, guna tercapainya tujuan Perseroan dan GCG.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Audit Internal:

- Menyusun strategi dan rencana kerja Internal Audit dengan pendekatan risiko (*risk based approach*) yang memadai. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui oleh Presiden Direktur dan Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- Mengimplementasikan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan, termasuk penugasan audit khusus atas permintaan Presiden Direktur maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Membuat analisis, melakukan pemeriksaan, serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lain. Hal tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung *on-site audit*, pengawasan secara tidak langsung, dan pemeriksaan berkelanjutan *continuous audit*, guna mencapai misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan.
- Melakukan dan memberikan kontribusi untuk peningkatan pengendalian yang efektif dengan melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap pengendalian internal pada semua unit kegiatan di lingkungan Perseroan.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen dalam rangka penyempurnaan sistem, prosedur, anggaran, dan kebijakan.
- Membuat laporan hasil audit serta menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- Menyusun rencana sumber daya manusia Internal Audit *man power planning* dan memelihara profesionalisme Internal Audit dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman serta program sertifikasi yang memadai, melalui pendidikan yang berkesinambungan dan keterlibatan dalam kegiatan organisasi profesi.

Duties and Responsibilities

In general, the Internal Audit's duty is to support the Board of Directors in performing internal monitoring activities within all of the Company's operational activities. This Division serves as a business partner and consultant for the Board of Directors in reviewing and evaluating internal control process as well the risk management of all the Company's operational activities, in order to achieving the Company's objectives and GCG.

Duties and Responsibilities of Internal Audit Division:

- Develop the Internal Audit strategies and work plans with adequate risk-based approach. The plan has to be consistent with the Internal Audit Charter and the Company's business objectives, approved by the President Director and the Audit Committee, and reported to the Board of Commissioners.
- Implement the work plan that has been approved, including the assignment of specific audit based on the request of both the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- Develop analysis and audit, as well as assessment on the efficiency and effectiveness of finance, operations, human resources, marketing, information technology and other activities. The aforementioned are performed through on-site audit, indirect monitoring (off-site audit) and continuous audit so as to achieve the missions, goals and strategies that have been set.
- Perform and contribute to the improvement of an effective control by reviewing and evaluating the internal control in all activity units within the Company.
- Provide improvement-related suggestions and objective information on audited activities in all levels of management to refine the system, procedure, budget and policy.
- Develop report on audit results and submit to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- Monitoring, analyze and report the follow up implementation of the recommended improvements.
- Develop the Internal Audit's manpower planning and maintain its professionalism by employing knowledge, skills, experiences and adequate certification program through continuous education and involvement in the activities of professional organizations.

Unit Audit Internal

Internal Audit Unit

- Membantu pemantauan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *good corporate governance*, efektivitas manajemen risiko, dan implementasi kode etik.
- Menyusun dan memperbarui pedoman, sistem, dan prosedur kerja Internal Audit secara berkala.
- Melakukan evaluasi secara berkesinambungan atas mutu kegiatan audit *quality assurance* yang dilakukan melalui *supervise* terhadap pekerjaan Internal Auditor dan mewajibkan Internal Auditor untuk meninjau kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta memperhatikan penilaian mutu kegiatan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
- Assist the monitoring of the implementation of the Good Corporate Governance, risk management effectiveness and code of conduct.
- Regularly develop and update the Internal Audit's working guidelines, systems and procedures.
- Continuous evaluation on the quality assurance performed by supervising the works of the Internal Auditor and requiring the Auditors to review the quality of their works and duly observe the assessment on the audit quality assurance performed by external parties.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

Selama periode tahun 2019, komite audit telah menghadiri rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

Internal Audit telah melaksanakan kegiatan *assurance* terhadap unit bisnis Perseroan sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) kali pemeriksaan terdiri dari:

Activity Implementation in 2019

During the 2019 period, the audit committee attended 11 (eleven) meetings.

The Internal Audit has implemented 122 (one hundred and twenty two) audits *assurance* activity on the Company's business units, which consisted of:

No	Kategori Category	Jumlah Number
1	Cabang / Branches	68 Pemeriksaan / Audit
2	Gudang / Warehouses	29 Pemeriksaan / Audit
3	Khazanah	3 Pemeriksaan / Audit
4	Kantor Pusat / Head Office	11 Pemeriksaan / Audit
5	Teknologi Informasi / Information Technology	2 Pemeriksaan / Audit
6	Special Audit	9 Pemeriksaan / Audit

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh Manajemen Perseroan secara berkesinambungan *on going basis* yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh pejabat dan pegawai Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mampu memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Perseroan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) adalah sebuah Komisi Internasional yang dibentuk untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO menekankan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis entitas yang berkelanjutan (*on going business activities*). Untuk tujuan pelaporan manajemen kepada publik, COSO *framework* telah menjadi acuan perusahaan publik sebagai model *best practices* pengendalian internal. COSO *framework* memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien.

COSO dapat memberikan:

Cara untuk menerapkan pengendalian internal dalam setiap entitas, tanpa memperhatikan industri atau struktur legal pada setiap tingkatan dari entitas, unit operasi atau fungsi.

- Pendekatan prinsip memberikan kemudahan dan memperkenankan untuk membuat, mengimplementasikan dan melaksanakan pengendalian internal – prinsip dapat diterapkan pada tingkatan entitas, operasi dan fungsi.
- Syarat untuk sistem pengendalian internal yang efektif dengan mempertimbangkan bagaimana komponen dan prinsip tersebut ada dan berfungsi dan bagaimana komponen beroperasi secara bersamaan.
- Cara untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko dan untuk mengembangkan serta mengelola reaksi risiko secara tepat sampai dengan tingkatan yang diterima dan dengan fokus terbaik dalam pengukuran *anti-fraud*.

The Internal Control System is a mechanism of supervision process determined by the Company's Management on an on-going basis in which the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all officers and employees influence the quality of the system's design and implementation.

The Internal Control System is designed to provide adequate confidence to maintain and secure the Company's assets, ensure the accurate reports, improve compliance with the applicable provisions, reduce the impacts of financial loss, deviations including fraud, and violation of the aspect of prudence, and improve the organization effectiveness and cost efficiency.

Internal Control System Compatibility with COSO

The COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) is an International Commission established to identify the factors that cause embezzlement and make recommendation to reduce such a case. The COSO emphasizes the Internal Control as a process inseparable from the on-going business activities. For public management report, COSO framework has become the reference for the public companies as the best practice for internal control. The COSO framework enables the Company to develop an effective and efficient internal control system.

COSO can contribute:

Method to implement the internal control in every entity, regardless the industry and legal structure, in every level of entity, operation unit, or function.

- Principle approach, that provides facility and allows creating, implementing, and conducting the internal control – the principles are applicable at the entity, operational, and functional levels.
- Requirements for the effective internal control system by considering the natures of the component and principle and how the component and principle operate simultaneously.
- Method to identify and analyze the risk as well as develop and manage the risk reaction appropriately to an acceptable extent and with the best focus on the anti-fraud measurement.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

- Kesempatan untuk mengembangkan penerapan pengendalian internal laporan keuangan dan laporan lainnya untuk mencapai tujuan laporan, operasional dan kepatuhan.
- Kesempatan untuk mengurangi ketidakefektifan, pengulangan atau ketidakefisienan pengendalian yang memberikan nilai minimal dalam mengurangi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan.
- Opportunity to develop internal control on financial report and the other reports to reach the report, operation, and compliance objectives.
- Opportunity to reduce control ineffectiveness, repetition or inefficiency that contribute minimal value in minimizing the risks to achieve the Company's objectives.

Dalam mengevaluasi pengendalian internal yang dilaksanakan perusahaan, Divisi Audit Internal menggunakan COSO framework. *Framework* ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi atau kategori tujuan yang memperkenankan perusahaan untuk fokus pada aspek pengendalian internal:

1. Operasi – efektif dan efisiensi operasional perusahaan, termasuk pencapaian kinerja operasional dan keuangan serta keamanan asset dibandingkan dengan kerugian.
2. Laporan Keuangan – Laporan Keuangan dan Non-Keuangan internal dan eksternal meliputi kehandalan, ketepatan waktu, transparansi, atau syarat lainnya yang ditetapkan oleh regulator, standar yang diakui, maupun kebijakan perusahaan.
3. Kepatuhan – ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ketiga dimensi atau kriteria tujuan tersebut memiliki 5 komponen untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan, yaitu:

1. Pengendalian Lingkungan
Hal-hal yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Integritas dan nilai-nilai etika;
 - b. Kompetensi dari orang-orang yang ada di perusahaan;
 - c. Filosofi perusahaan;
 - d. Pelaksanaan tanggung jawab atas tugas yang dibebankan;
 - e. Perhatian dan bimbingan yang diberikan oleh komisi perusahaan;
2. Penaksiran Risiko
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Prediksi ataupun penaksiran risiko atas tujuan yang telah ditetapkan, hubungan-hubungan risiko tersebut kepada bagian-bagian yang ada dalam perusahaan;
 - b. Identifikasi dan analisis atas risiko yang relevan atas tujuan (*objectives*) yang telah ditetapkan;
 - c. Bentuk dasar atas penentuan bagaimana seharusnya penanganan risiko yang ada;
 - d. Mekanisme yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi risiko khusus yang tidak terlepas dari perubahan yang ada;

In evaluating the internal control implemented by the Company, the Internal Audit Division has applied COSO Framework. This framework consists of 3 (three) objective dimensions or categories that allow a company to focus on the internal control aspect, namely:

1. Operation – the company's effectiveness and efficiency, including the achievement of operational and financial performances and asset security, as compared to loss.
2. Financial Report – Internal and External Financial and Non-Financial Reports which entail reliability, punctuality, transparency, or the other requirements determined by the regulators, acknowledged standards, and Company's policy.
3. Compliance – compliance with the laws and regulations applicable.

The three objectives dimensions or criteria aforementioned have 5 components to evaluate a company's internal control, which are:

1. Control Environment
The attributes of the internal audit's concern are:
 - a. Integrity and ethical values;
 - b. Competence of the people within a company;
 - c. Corporate philosophy;
 - d. Execution of the given tasks and responsibilities;
 - e. Attention and guidance for the company's commission;
2. Risk Assessment
The attributes of the internal audit's concern are:
 - a. Risk prediction and assessment of the objectives set and the implications of the risks to the company's sections.
 - b. Identification and analysis of the risks relevant with the objectives set;
 - c. Basic form of the determination on how the risk should be managed;
 - d. Mechanism required to identify specific risks inherent in the existing changes;

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

3. **Aktivitas Pengendalian**
Atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah kebijakan dan prosedur dalam setiap aktivitas perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. **Informasi dan Komunikasi**
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Identifikasi informasi yang berhubungan, rekam dan komunikasikan dalam bentuk yang memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
 - b. Masukkan informasi yang berasal dari dalam dan dari luar perusahaan mengenai suatu kejadian, kondisi yang mungkin dibutuhkan dalam pembuatan keputusan bisnis atau bahkan laporan kepada pihak luar;
 - c. Aliran informasi yang mendukung kesuksesan pengendalian dari instruksi pada tanggung jawab manajemen sampai kepada perangkuman temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.
5. **Pengawasan**
Beberapa atribut yang menjadi perhatian audit internal adalah:
 - a. Penaksiran kinerja sistem pengendalian yang ada defisiensi atas pengendalian internal harus dilaporkan kepada top manajemen;
 - b. Kombinasi antara evaluasi terus-menerus dan evaluasi terpisah akan menjamin efektivitas sistem pengendalian internal yang dirancang.

Evaluasi Tingkat Efektivitas

Sistem Pengendalian Internal pada Perseroan dijalankan oleh Divisi Legal, Compliance and Corporate Litigation. Hal tersebut dijalankan guna memastikan tingkat efektifitas pengendalian internal Perseroan, melalui evaluasi mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem. Berbagai evaluasi tingkat efektivitas mencakup:

- **Jendela:** analisis kasus dan kerugian operasional oleh ORM yang disajikan dalam RMC (*Risk Manajemen Committee*) bersama BOD per bulan;
- **Rapat *Post Mortem*:** tinjauan antara NMP (*Network Management and Performance*) dengan BOD berdasarkan pelaksanaan rapat antar function di cabang;
- **RCSA:** tinjauan dari *Division Head* yang disetujui oleh BOD per kuartal (3 bulan) terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;

3. **Control Activities**
The attributes of the internal audit's concern are the policies and procedures in each company's activity. This is to identify the potential risks in the achievement of the objectives set.
4. **Information and Communication**
Several attributes of the internal audit's concern are:
 - a. Identification of the relevant information, record and communication in a form that allows the people in the company to take their respective responsibilities;
 - b. Input of the information from inside and outside of the company about a particular event, condition required for business decision making, or even the reports for external parties;
 - c. Flow of information that supports the success of the control; from the instructions on the responsibilities to the summarizing of the results that need further action from the management.
5. **Monitoring**
Several attributes of the internal audit's concern are:
 - a. Assessment of the existing control system performance; the deficiency in the internal control should be reported to the top management;
 - b. Combination of continuous evaluation and separated evaluation will guarantee the effectiveness of the designed internal control system.

Evaluation on Effectiveness Level

The Compliance Division manages the Internal Control System in the Company. The system is implemented to ensure the effectiveness level of the Company's internal control by utilizing independent evaluation of the policies, procedures, and system adequacy and compliance. The effectiveness level evaluations include:

- **Jendela:** case and operational loss analyses by ORM presented in the RMC with BOD monthly;
- **Post Mortem Meeting:** review between Network Management and Performance (NMP) and BOD based on inter-functional meeting organized among functions at the branches;
- **RCSA:** review by the Division Heads approved by BOD quarterly (3 months) concerning the existing risks in each function;

Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

- BCSA: tinjauan dari *Function Head* yang disetujui oleh *Branch Head* dan *Area Manager* per semester (6 bulan) terkait risiko yang ada pada fungsi masing-masing;
 - KRI: tinjauan oleh ORM dan *function* terkait atas *root cause* dan *action plan* cabang terhadap data anomali yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan yang disajikan dalam RMC bersama BOD per bulan;
 - *Caller*: tinjauan oleh ORM berdasarkan hasil verifikasi via telepon kepada konsumen WOM per bulan;
 - *Key Control Standard (KCS)*: BORC di tingkat cabang, RORC di tingkat regional dan RMC di tingkat direksi per bulan;
 - *Field Verificator*: tinjauan oleh ORM dan fungsi terkait atas pemeriksaan verifikator di lapangan yang disajikan dalam RMC bersama BOD per bulan.
- BCSA: review by Function Heads approved by Branch Head and Area Manager every semester (6 months) concerning the existing risks in each function;
 - KRI: review by ORM and related functions on the root cause and the branch's plan of action against data anomaly which may cause damages to the company, presented by BOD in RMC each month;
 - *Caller*: review by ORM based on phone-call verification to WOM customers each month;
 - *Key Control Standard (KCS)*: BORC at the branch level, RORC at the regional level, and RMC at the board of directors level monthly;
 - *Field verificator*: review by ORM and related functions on the vericator follow up in the field presented by BOD in RMC monthly;

Akuntan Publik

Public Accountant

RUPS memiliki wewenang untuk menunjuk Akuntan Independen (eksternal). Pada tahun 2019, RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) dalam rangka pelaksanaan Audit Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. Dengan biaya jasa pelaksanaan sebesar Rp608.000.000 *).

Tabel di bawah ini menginformasikan Akuntan dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan Audit Keuangan untuk Perseroan selama lima tahun terakhir serta biaya audit yang dikeluarkan:

The GMS has the authority to appoint the Independent Auditor (external). In 2019, the GMS has appointed Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Member Firm of Ernst & Young Global Limited) to carry out the Company's Financial Audit for fiscal year ended 31 December 2019. The service fee was at Rp608.000.000 *).

The following table contains the information of the Accountants and the Public Accountant Firm that provided the Financial Audit for the Company in the last five years including the respective fees:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Biaya Audit Audit Fee
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan	Rp579.400.000
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp579.400.000
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp350.000.000
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp551.800.000
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp551.800.000
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp551.800.000
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp537.500.000
Jasa Lain Selain Audit Keuangan / Other Services			
2019	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Muhammad Kurniawan	Rp189.000.000
2018	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp650.000.000
2017	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Yasir	Rp180.000.000
2016	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Daniel Setiadi Handaja	Rp180.000.000
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young)	Agung Purwanto	Rp325.000.000
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young)	Danil Setiadi Handaja	Rp170.000.000

*) Realisasi biaya audit tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp579.400.000.

*) The realization of annual audit fee of the Company for fiscal year ended on December 31, 2019 was amounted to Rp579,400,000.

Manajemen Risiko

Risk Management

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara bersama-sama membentuk struktur organisasi dengan tanggung jawab, batas kewenangan dan prinsip akuntabilitas terkait proses manajemen risiko Perseroan.

Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee/ROC*) yang membantu Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko Perseroan secara efektif dan menyeluruh. Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko (*Risk Manajemen Committee/RMC*) untuk membantu Direksi dalam rangka penerapan manajemen risiko Perseroan sehari-hari.

Konsep Three Lines of Defense

Perseroan telah menerapkan prinsip *three lines of defence* dalam pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal. Unit Kerja Bisnis sebagai lini pertama memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan risiko secara langsung. Sebagai lini kedua, Unit Kerja Manajemen Risiko yang memastikan kecukupan adanya sistem dan prosedur serta metodologi risiko yang digunakan serta Unit Kerja Audit Internal sebagai lini ketiga berperan sebagai *independent assurance*.

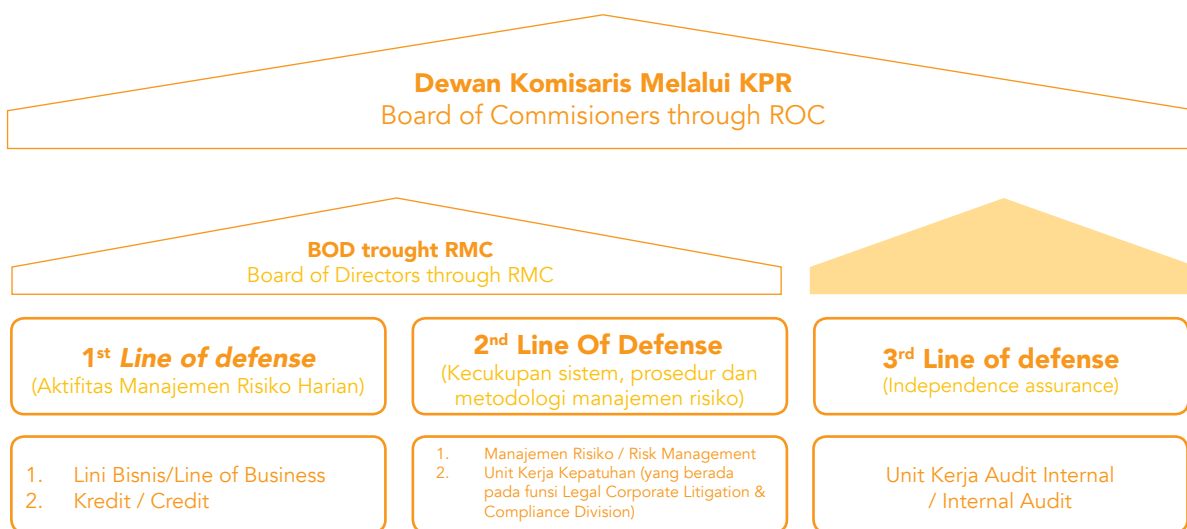
RISK MANAGEMENT APPLICATION

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors are jointly developed the organization structure with responsibility, authority limits and accountability principle related to the Company's risk management process.

The Company has in place the Risk Oversight Committee (ROC) that assist the Board of Commissioners in effective and comprehensive oversight and evaluation of the Company's risk management process. In addition, the Company has also established the Risk Management Committee (RMC) to assist the Board of Directors in implementing daily risk management in the Company.

Three Lines of Defense Concept

The Company has implemented the three lines of defense principle in its risk control. As the first line, Business Unit has direct responsibility on risk management. The Risk Management Unit as the second line ensures the adequacy of risk system, procedures and methodology that are used. The Internal Audit Unit as the third line has a role as independent assurance.



Dalam rangka manajemen risiko secara menyeluruh, Perseroan telah didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan infrastruktur yang cukup memadai. Perseroan secara berkesinambungan mengembangkan metodologi pengelolaan risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko guna mengantisipasi perkembangan bisnis pembiayaan dan perubahan lingkungan bisnis.

In a comprehensive risk management, the Company is supported by quality human resources and adequate infrastructure. To anticipate the financing business development and changes in business environment, the Company continuously develops risk management methodology, policy and procedures. The enhancement of risk culture awareness in all employees is very important.

Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan memandang bahwa peningkatan kesadaran budaya risiko sangat penting bagi seluruh karyawan. Sejalan dengan itu, peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan senantiasa diperbarui dan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan kampanye budaya risiko.

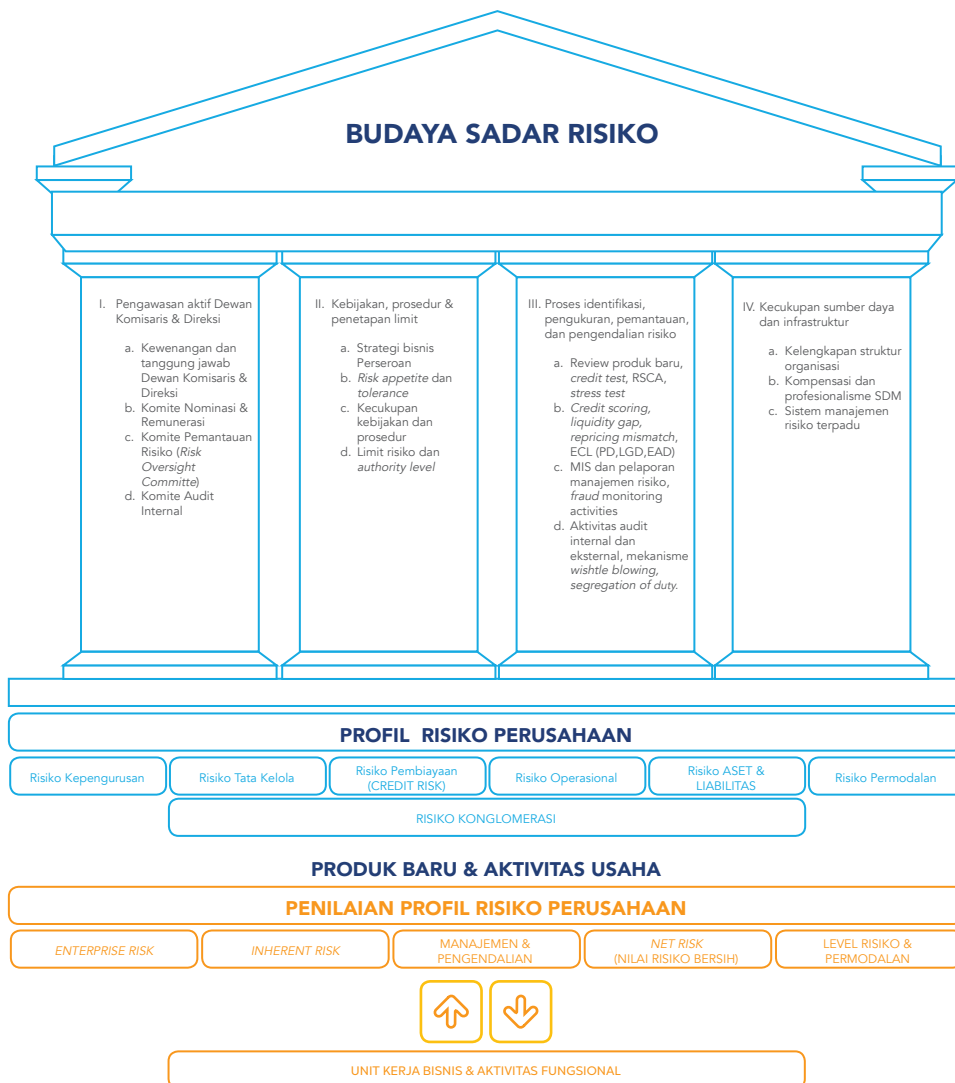
As such, the Company always updates and improves the employees' understanding and capabilities improvement through trainings and risk culture campaign.

PENGELOLAAN RISIKO UTAMA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Untuk mengakomodasi tren perusahaan pembiayaan dan pertumbuhan bisnis, pedoman manajemen risiko telah disusun dalam memastikan setiap aktivitas bisnis dikelola sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah pilar kerangka kerja manajemen risiko Perseroan:

FINANCING COMPANY CORE RISK MANAGEMENT

To accommodate the financing company business trend and growth, the Company has developed risk management guidelines in ensuring the management of business activities with prudential principle. The following is the Company's risk management framework pillars:



Manajemen Risiko

Risk Management

Perseroan memiliki strategi meminimalisasi dampak beban risiko, melalui implementasi manajemen risiko yang hati-hati dan terukur, kerugian beban risiko diupayakan seminimal mungkin agar posisi keuangan Perseroan relatif stabil.

Perseroan mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengelolaan profil risiko sebagai akibat tingkat kompetisi dan perubahan lingkungan bisnis. Perseroan telah merumuskan *risk appetite*, kebijakan & prosedur, dan penetapan batasan risiko maksimal yang dapat diambil. Perseroan memastikan semua risiko yang terjadi dapat teridentifikasi, terukur, terpantau dan dapat dikendalikan sedini mungkin secara tepat dan baik. Keberhasilan fungsi dan tugas satuan kerja manajemen risiko termasuk di dalamnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen risiko yang profesional. SDM yang unggul dan dukung infrastruktur yang baik menjadi tolok ukur keberhasilan proses penerapan manajemen risiko Perseroan.

1. Risiko Kepengurusan & Tata Kelola

Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlihat langsung atau tidak langsung dengan Perseroan. Sumber pada Risiko Tata Kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Perseroan tidak memadai, Perseroan tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan perseroan tidak menerapkan Manajemen Risiko secara memadai. Risiko Tata Kelola dapat meningkat antara lain Karena adanya investasi dari pihak lain yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.

Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Sumber Risiko Kepengurusan antara lain adalah penunjukan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak memadai, komposisi dan proporsi Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perseroan, kompetensi dan integritas Direksi dan Dewan Komisaris tidak memadai dan tidak menunjang tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, serta kepemimpinan Direksi dan Dewan Komisaris tidak baik. Risiko Kepengurusan dapat meningkat antara lain karena tidak tersedianya sistem remunerasi yang memadai bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

The Company's strategy in minimizing the impact of risk burden is implemented through prudent and measured risk management. The loss from risk burden is taken as minimum as possible to enable a relatively stable financial position.

To address competition and business environment evolution, the Company takes proactive measures in managing risk profiles. The Company has formulated the risk appetite, policy & procedures, and determined maximum risk thresholds that can be taken. The Company ensures that all risks can be identified, measured, monitored and controlled at the earliest in an accurate and proper manner. The success of risk management unit function and duties include the availability of infrastructure and human resources (HR) with professional risk management field. Excellent HR and good support of infrastructure become the benchmark of successful risk management application process in the Company.

1. Management & Governance Risk

The Governance Risk is a potential of failure in the implementation of good governance, inappropriateness of management style, control environment, and conduct of every parties that are directly or indirectly involved with the Company. The sources of Governance Risk include inadequacy of governance guidelines, improper implementation of good governance principles, and inadequacy of risk management application by the Company. The Governance Risk can be escalated among others due to the intervention of other parties that cause a failure in the implementation of good governance.

Management Risk is the risk of failure in achieving the Company's goals due to failure in maintaining the best composition of management who has high competence and integrity. Sources of Management Risk include but inadequate appointment and termination of Directors and Board of Commissioners, insufficient composition and proportion of Directors and Board of Commissioners that are not in accordance with the needs of the Company, competencies and integrity of Directors and Board of Commissioners are inadequate and do not support the duties and authority of Directors and the Board of Commissioners, and the leadership of the Directors and Board of Commissioners is not good. Management risk can increase among others due to the unavailability of an adequate remuneration system for Directors and Board of Commissioners.

Strategi Mitigasi Risiko

Peran serta aktif Dewan Komisaris / DPS (UUS) dan Dewan Direksi dalam melakukan pengawasan dan bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas usaha dan profil risiko Perseroan sesuai yang tertuang dalam *charter Risk Oversight Committee & Risk Management Committee*. Susunan Dewan Komisaris/ DPS (UUS) dan Dewan Direksi adalah profesional terbaik dalam bidangnya dan memiliki *track record* yang baik.

2. Risiko Strategi

Risiko Strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan oleh Perseroan. Risiko-risiko yang termasuk dalam jenis ini ialah risiko yang berdampak terhadap modal, pendapatan dan reputasi Perseroan, yang secara spesifik timbul akibat pelaksanaan keputusan yang tidak tepat atau akibat kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan industri, ekonomi, teknologi dan regulasi.

Strategi Mitigasi Risiko

Perseroan merumuskan strategi mitigasi risiko untuk menyeimbangkan risiko dan pendapatan dengan mempertimbangkan perubahan kondisi pasar, regulasi, dan lingkungan bisnis. Strategi mitigasi risiko strategis yang diterapkan Perseroan menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama ialah kesesuaian strategi bisnis Perseroan dengan kondisi lingkungan bisnis, parameter kedua ialah strategi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, parameter ketiga ialah posisi bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan, dan parameter keempat ialah pencapaian rencana bisnis Perseroan dalam konglomerasi keuangan.

3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan jenis risiko yang timbul dengan dampak pada kerugian finansial perusahaan pembiayaan karena debitur gagal melakukan kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan. Kegagalan dalam mengelola risiko ini dapat mengakibatkan kerugian, serta kemungkinan risiko tersebut akan menjadi semakin besar, yang kemudian berdampak negatif bagi posisi keuangan perusahaan pembiayaan.

Dalam rangka penilaian risiko pembiayaan, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Risk Mitigation Strategy

The active participation of the Board of Commissioners/ DPS (UUS) and the Board of Directors in supervising and taking full responsibility for all business activities and the Company's risk profile as stipulated in the Risk Oversight Committee & Risk Management Committee charter. The composition of the Board of Commissioners / DPS (UUS) and the Board of Directors are the best professionals in their fields and have a good track record.

2. Strategy Risk

Strategic Risk is risk that is caused by, among others, the incorrect setting and implementation of the Company's strategy, inappropriate business decision making, or the company's lack of responsiveness to external changes that result in not achieving the targets set by the Company. Risks included in this type are risks that affect the Company's capital, revenue and reputation, which specifically arise from the implementation of inappropriate decisions or due to the Company's lack of responsiveness to changes in industry, economy, technology and regulations.

Risk Mitigation Strategy

The Company formulates a risk mitigation strategy to balance risk and income by considering changes in market conditions, regulations and the business environment. The strategic risk mitigation strategy implemented by the Company uses several parameters. The first parameter is the suitability of the Company's business strategy with the conditions of the business environment, the second parameter is the Company's business strategy in the financial conglomerate, the third parameter is the Company's business position in the financial conglomerate, and the fourth parameter is the achievement of the Company's business plan in the financial conglomerate.

3. Financing Risk

The Financing Risk is a risk that may result with the financial losses impact because of a failure of debtor in carrying out its obligations to the Company. Failing in managing this risk can result in losses, as well as a possibility of greater risk, which eventually led to negative impact on the Company's financial position.

In the assessment of Financing risk, the Company strives to take the following matters into account:

Manajemen Risiko

Risk Management

- a. Komposisi portofolio pembiayaan dan tingkat konsentrasi
Diversifikasi produk pembiayaan Perseroan memainkan peran penting dalam mengurangi potensi risiko kredit yang akan timbul, terutama pada tingkat komposisi dan konsentrasi portofolio pembiayaan yang diberikan. Produk pembiayaan Perseroan diantaranya pembiayaan motor baru, pembiayaan motor bekas dan pembiayaan multiguna dengan agunan mobil atau motor. Sebaran wilayah pembiayaan yang diberikan perusahaan telah mencapai hampir seluruh pulau Jawa, Nusa Tenggara & Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Target debitur Perseroan masih didominasi oleh segmen *middle-low* dengan minimal pendapatan sesuai UMR wilayah setempat.
 - b. Strategi penyaluran pembiayaan
Upaya menjaga pertumbuhan asset pembiayaan senantiasa dilakukan oleh Perseroan selain melakukan optimalisasi portofolio produk pembiayaan pada beberapa produk unggulan yang mendatangkan tingkat keuntungan signifikan. Saat ini Perseroan dihadapkan pada tingkat persaingan yang sangat ketat di pasar sehingga perlu adanya terobosan proses penyaluran pembiayaan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
 - c. Kualitas piutang pembiayaan dan tingkat kecukupan pencadangan
Rasio NPF gross per Desember 2019 sebesar 1.88% dengan tingkat kecukupan pencadangan >1x. Secara kualitas aset pembiayaan, Perseroan masih pada taraf cukup baik dan terkendali
 - d. Faktor eksternal
Kondisi ekonomi terutama tingkat inflasi sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan Perseroan menimbang bahwa mayoritas debitur merupakan segmen *middle-low* yang sangat sensitif terhadap perubahan atau kenaikan harga barang. Penurunan kualitas aset pembiayaan terjadi dikarenakan mayoritas segmen debitur mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Perseroan.
- a. Financing portfolio and concentrations level composition.
The Company's financing products diversification plays an important role in reducing financing risk potential that may arise, in particular at the composition level and credit portfolio concentrations. The Company's financing products include new motor vehicles credit, used motor vehicles credit and multipurpose financing with car or motor vehicles as collateral. The financing coverage by the Company has reached almost all the regions of Java, Nusa Tenggara & Bali, Sumatra, Kalimantan, and Sulawesi islands. The debtors target is still dominated by middle-low segment with minimum income in accordance to local minimum wages.
 - b. Financing disbursement strategy.
The Company strives to maintain financing assets growth in addition to optimize financing product portfolio in several quality products that render significant profitability levels. The Company currently experienced a very stringent competition in the market thereby a breakthrough in lending process is necessary without eliminating prudential principle.
 - c. Financing receivables quality and appropriated adequacy level.
Gross NPF ratio as of December 2018 was 2.68% with >1x appropriated adequacy level. In terms of credit assets quality, the Company is still under acceptable and control level.
 - d. External factors
The economic conditions especially inflation level render significant impact on the Company's credit quality, considering that the majority of debtors are middle-low segment that are very sensitive towards the changes or increase price of goods. The decrease of credit assets quality is due to the decrease of capacity of middle-low segment debtors to settle their obligation to the Company.

Manajemen Risiko

Risk Management

Strategi Mitigasi Risiko

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama Perseroan. Pengelolaan risiko pembiayaan dilakukan oleh Perseroan baik secara individual maupun pada tingkat portofolio pembiayaan. Praktik pengelolaan risiko pembiayaan sehari-hari dilakukan oleh unit kerja bisnis secara terpisah dari unit kerja manajemen risiko, baik secara fungsional maupun pengorganisasiannya untuk memastikan adanya kecukupan prinsip *dual control* dan *segregation of duties*.

Perseroan memiliki budaya risiko yang cukup baik dengan memastikan adanya kecukupan kebijakan penetapan limit risiko pembiayaan yang baik, proses evaluasi risiko pembiayaan secara menyeluruh, adanya dukungan sumber daya manusia yang profesional serta kehandalan sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Perseroan.

Proses evaluasi dan peninjauan risiko pembiayaan dilakukan secara berkala oleh unit kerja bisnis bersama dengan unit kerja manajemen risiko serta dipantau secara aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tataran komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko Perseroan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, unit kerja manajemen risiko bekerja sama dengan unit kerja bisnis, senantiasa menyempurnakan kebijakan penetapan *risk appetite* yang tertuang dalam kebijakan pembiayaan sehingga pengelolaan risiko pembiayaan menjadi lebih baik serta melakukan evaluasi batasan wewenang persetujuan pembiayaan secara berkala, sehingga Perseroan memiliki tingkat pelayanan dan kompetitif yang lebih baik.

Proses persetujuan pembiayaan telah ditetapkan secara efektif sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara optimal dengan mendelegasikan wewenang persetujuan pembiayaan dari *level* kantor pusat sampai dengan kantor cabang operasional.

Risk Mitigation Strategy

The Financing Risk is the Company's main risks. The Company manages the credit risk individually as well as at the credit portfolio level. To ensure the adequacy of dual control and segregation of duties, a daily credit risk management practice is carried out by business unit separated from the risk management unit, both functionally or its organization.

The Company has sufficient risk culture by ensuring the adequacy of proper credit risk threshold policy, comprehensive financing risk evaluation process, professional human resources support, and reliable risk management information system.

Business units are periodically carried out the credit risk evaluation and examination with risk management unit, as well as actively monitored by the Board of Directors and Board of Commissioners at the Company's risk management committee and risk oversight committee levels.

To boost sound business growth and sustainable profitability with due observance to prudent principle, the risk management unit and business units are continuously refined the risk appetite policy that stated in the credit policy thereby rendering better management of financing risk. The units also periodically carried out approval authority limit evaluation, hence the Company has better services and competitive levels.

The effective credit approval process has been set, hence enabling optimum credit decision making process by delegating the credit approval authority from head office to operating branches levels.

Manajemen Risiko

Risk Management

Diagram berikut menggambarkan proses siklus pembiayaan:

The following diagram illustrates the credit cycle process:

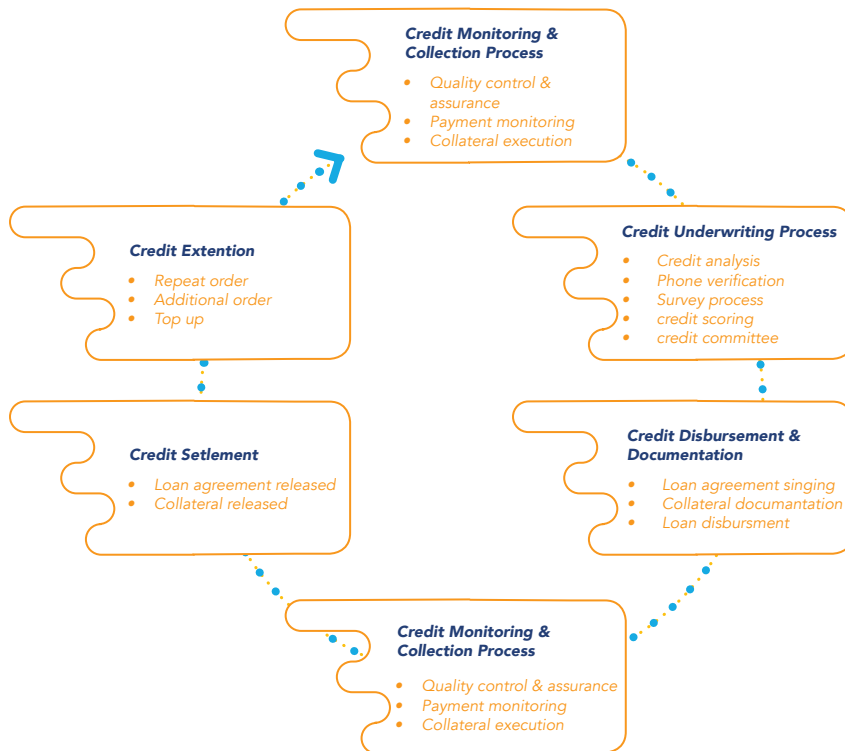


Diagram berikut menggambarkan proses persetujuan pembiayaan (*loan origination*):

The following diagram describes the loan approval process:



Note :

- Credit Committee location are both in operational branch & head office
- Approval process using both online & offline approval process

Manajemen Risiko

Risk Management

Proposal pembiayaan yang diajukan oleh kantor cabang dengan jumlah tertentu baik perorangan, maupun korporasi, dievaluasi secara independen oleh unit kerja kredit analis untuk memastikan semua risiko telah teridentifikasi dan termitigasi dengan jelas, sehingga risiko bersih dapat terukur dengan baik.

Pengajuan pembiayaan pada jumlah tertentu dapat menjadi kewenangan kantor cabang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang diterima dari kantor pusat. Wewenang persetujuan kredit yang dimiliki oleh kantor cabang ditinjau dan dievaluasi secara berkala.

Diagram berikut menggambarkan proses pemantauan & *collection* pembiayaan:



Dalam upaya mitigasi risiko pembiayaan dilakukan proses penagihan (*collection*), eksekusi agunan sampai *write off* berdasarkan pada lamanya hari tertunggak debitur melakukan pembayaran kewajiban angsuran. Prosedur peringatan tanggal jatuh tempo kewajiban sampai dengan eksekusi agunan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Unit kerja manajemen risiko melakukan aktivitas pemantauan kualitas pembiayaan secara berkala pada seluruh portofolio pembiayaan Perseroan selain melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, makro ekonomi, dan regulasi. Telaah risiko pembiayaan akan diberikan selaras dengan rekomendasi dalam bentuk tindakan preventif maupun perbaikan kebijakan untuk memitigasi kualitas pembiayaan yang memburuk.

Di sisi kebijakan, Perseroan memiliki 3 (tiga) tingkatan hirarki yang terdiri dari kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur. Hirarki tersebut dirancang untuk memberikan panduan yang lebih jelas, terstruktur dan menyeluruh untuk menciptakan konsistensi di seluruh organisasi.

The credit analyst unit independently evaluates credit proposals from branch offices with certain amount both individually and corporate. This is to ensure that all risks have been clearly identified and mitigated, hence creating clean and proper measure of risks.

The branch offices in accordance with the authority delegation may take the authority of credit proposals with certain amount from the head office. The credit approval authority of branch offices is periodically reviewed and evaluated.

The following diagram illustrates the credit monitoring & collection process:

The credit risk mitigation includes collection process, collateral execution to write off based on the length of the debtors' overdue period in paying installment obligations. The obligation due date up to the collateral execution are carried out in accordance with the applicable policies.

The risk management unit regularly monitors credit quality in the Company's entire credit portfolio in addition to conduct early detection of the possibility in the decrease of credit quality that may be caused by the changes of market conditions, macroeconomics and regulations. The credit risk analysis will be provided in line with the recommendations through preventive measures as well as improvement policies to mitigate nonperforming credit quality.

In terms of policy, the Company has in place 3 (three) hierarchy levels consisting of framework, policy and procedures. This hierarchy is designed to render clear, structured and comprehensive guidance for consistencies in the entire organizations.

Manajemen Risiko

Risk Management

Kebijakan dan prosedur secara berkala ditinjau dan diperbarui melalui komite yang relevan untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, regulasi, dan lingkungan bisnis.

Keberhasilan dalam mengelola risiko pembiayaan ini bisa dicapai dengan menerapkan siklus pembiayaan yang *prudent*, mulai dari menawarkan produk yang sesuai, mengidentifikasi target pasar yang tepat, menetapkan kriteria penerimaan risiko yang cermat, menerapkan pengendalian yang kuat dalam inisiasi kredit dan proses persetujuan kredit, mempertahankan portofolio kredit yang sehat, serta menerapkan sistem penagihan dan praktik pemulihan yang memadai.

4. Risiko Aset & Liabilitas

Risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perseroan. Dalam melakukan penilaian risiko aset dan liabilitas, Perseroan senantiasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset
Penilaian aset Perseroan yang terekspos pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar dan potensial kerugiannya. Perseroan dituntut dapat melakukan pengelolaan yang baik dalam rangka memitigasi penurunan nilai aset akibat pergerakan suku bunga dan nilai tukar tersebut.
2. Pengelolaan liabilitas
Penilaian liabilitas Perseroan yang terekspos pergerakan tingkat suku bunga, nilai tukar dan potensial kerugiannya. Perseroan dituntut dapat melakukan pengelolaan yang baik dalam rangka memitigasi kenaikan nilai liabilitas akibat pergerakan suku bunga dan nilai tukar tersebut.
3. Ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas
Posisi aset dan liabilitas yang terekspos tingkat suku bunga dan nilai tukar harus di maintain dengan baik oleh Perseroan baik secara jatuh tempo/durasi/*repricing gap* maupun *mismatch* antara posisi aset dan liabilitas (*gapping*) yang berdampak pada tingkat likuiditas Perseroan

Strategi Mitigasi Risiko

Dalam mengelola risiko aset & likuiditas, Financial Planning and Investor Relation Division bertanggung jawab untuk mengimplementasi kebijakan, metodologi pengukuran, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko aset & likuiditas, serta memantau kepatuhan terhadap pedoman-pedoman tersebut.

The policies and procedures are regularly reviewed and updated the policy and procedures to reflect the changes in the market conditions, regulations, and business environment.

The credit risk management can be achieved by applying prudent credit cycle, from appropriate product offering, proper target market identification, prudent risk acceptance criteria determination, strong control implementation in credit initiation and approval process, maintaining sound credit portfolio, as well as applying adequate collection system and recovery practices.

4. Assets & Liabilities Risk

The risk resulted from a potential of failure in the Company's assets and liabilities management, which creates funding deficiency in achieving the Company's obligations. In the assessment of assets and liabilities risk, the Company strives to take into account the following subjects:

1. Assets management
The Company's assets assessment that exposed by the fluctuation of interest rate, exchange value and losses potentials. Proper management is required by the Company to mitigate a decrease of assets value due to such fluctuations in interest rate and exchange value.
2. Liabilities management
The Company's liabilities assessment that exposed by the fluctuation of interest rate, exchange value and losses potentials. Proper management is required by the Company to mitigate a decrease of liabilities value due to such fluctuations in interest rate and exchange value.
3. Incompatibility of assets and liabilities
The Company has to maintain the assets and liabilities position exposed by the interest rate and exchange value, both in maturity/ duration/ repricing gap as well as mismatch between the assets and liabilities position (*gapping*), which impact on the Company's liquidity level.

Risk Mitigation Strategy

In the management of assets & liabilities risk, the Financial Planning and Investor Relations Division is responsible to implement the policy, methodology, monitoring, and reporting of the assets & liabilities risk exposures, as well as monitoring its compliance with such guidelines.

Manajemen Risiko

Risk Management

Secara berkala, Perseroan melakukan evaluasi dan pembaharuan yang dianggap perlu atas setiap kebijakan dan prosedur manajemen risiko aset & likuiditas, yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan regulasi terkait.

Perseroan juga melakukan pemantauan berkala terkait kondisi mismatch utamanya terkait eksposur pergerakan suku bunga di pasar dan kondisi perbedaan *re-pricing* antara aset dan liabilitas. Selain itu, *Stress Testing* juga dilakukan untuk mengevaluasi kapabilitas Perseroan dalam memenuhi kewajiban likuiditas dalam kondisi krisis.

5. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko-risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau problem eksternal yang bisa mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional umumnya dapat menimbulkan kerugian keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan (penyediaan dana), teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Perseroan telah menerapkan pengelolaan risiko operasional, yaitu proses yang mengidentifikasi secara sistematis penyebab kegagalan dalam kegiatan operasional sehari-hari secara fungsional organisasi, menilai risiko kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalisir dampak kerugian tersebut.

Strategi Mitigasi Risiko:

Upaya meningkatkan kebutuhan manajemen risiko operasional yang efektif didorong oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kerugian operasional signifikan yang dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan;
2. Regulasi yang baru dan praktik terbaik dalam Perusahaan Pembiayaan di Indonesia;
3. Perubahan yang relatif cepat dalam dunia bisnis;
4. Tumbuhnya kebutuhan akan pengukuran kinerja;
5. Perlindungan dan pengembangan terhadap nilai pemegang saham.

Dalam memberikan respon yang tepat terhadap faktor-faktor di atas, juga atas visi Perseroan untuk tetap menjaga risiko agar tetap seimbang dengan pertumbuhan bisnis, Perseroan menyadari

The Company regularly evaluates and updates necessary policy and procedures of assets & liabilities risk management, which always adapted with the latest conditions and relevant regulations.

The Company also regularly monitors the mismatch conditions in particular the exposures of interest rate fluctuation in the market and repricing differences between assets and liabilities. Moreover, the stress testing is carried out to evaluate the Company's capabilities in meeting the liquidity during crises.

5. Operational Risk

The Operational Risk is risks resulted from inadequacy and/or disfunction of internal process, human errors, system failures or external issues that may impact the Company's operations. In general the Operational risk can both directly and indirectly render the financial losses, as well as potential loss on failing in taking the opportunity of generating profitability. The Operational risk can be embedded at the Company's functional activities such as lending, information system technology and management information system, as well as human resources management.

The Company has implemented the operational risk management, which includes systematic identification on the failure of daily operations in organization functions, risk of loss assessment and taking proper measures to minimize the impact of such losses.

Risk Mitigation Strategy

The effort to enhance effective operational risk management is encouraged by the following factors:

1. Significant operational losses experienced by Financing Companies industry;
2. New regulations and best practices in Financing Companies in Indonesia;
3. Relatively fast evolution in business environment;
4. Increase needs of performance measurement;
5. Shareholders' value protection and development.

In accurately responding the above factors, as well as the Company's vision to maintain a balance risk with business growth, the Company realizes its needs to enhance the awareness of operational risk, as well as

Manajemen Risiko

Risk Management

kebutuhannya untuk meningkatkan kesadaran akan risiko operasional, serta keutuhan untuk membentuk kerangka kerja manajemen risiko operasional, kebijakan, dan prosedur yang memadai serta konsisten diterapkan di Perseroan.

Strategi manajemen risiko operasional telah diformulasikan dengan baik dan dipahami secara merata, hal ini sangat penting dalam membangun kesadaran manajemen risiko operasional di Perseroan.

Model tata kelola risiko operasional untuk Perseroan dilakukan secara formal, transparan, dan konsistensi. Model tersebut juga secara jelas menegaskan tugas dan tanggung jawab serta alur pelaporan demi terciptanya pengelolaan risiko operasional Perseroan yang berjalan secara efektif. Model tata kelola disusun dan diterapkan untuk menempatkan akuntabilitas terhadap risiko operasional yang mungkin timbul, serta pada saat yang bersamaan, memfasilitasi pemisahan tugas secara independen antara unit pengendali risiko dan fungsi Audit Internal.

Sifat dan tingkat risiko operasional dapat berubah seiring perubahan pada perilaku manusia, struktur organisasi, proses, sistem, dan faktor-faktor eksternal lain. Oleh karena itu, kajian secara terus menerus, pemantauan risiko, serta efektivitas pengendalian secara dinamis merupakan hal-hal penting yang wajib dilaksanakan dan diwujudkan guna mencapai manajemen risiko operasional yang efektif.

Untuk memfasilitasi proses ini, Perseroan telah membentuk perangkat utama risiko operasional sebagai bagian dari pengembangan manajemen risiko operasional yang efektif. Sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional, *Business Continuity Management* merupakan pendekatan yang mencakup kerangka kerja, kebijakan standar, dan prosedur dalam membangun ketahanan dan kemampuan, demi memastikan bahwa operasional Perseroan dapat dipulihkan dengan cepat apabila terjadi gangguan pada fungsi-fungsi kritis, sesuai dengan batas toleransi maksimum yang telah ditentukan.

Terkait hal tersebut, latihan simulasi krisis dan pemulihan dilakukan secara berkala untuk menguji rencana serta kesiapan terhadap krisis yang mungkin terjadi.

Kebijakan Anti Fraud

Sebagai bagian dari sinergi dalam mitigasi risiko operasional, kebijakan *Anti-Fraud* dibuat dalam rangka membangun program-program serta pengendalian *anti-fraud* yang kuat dan komprehensif. Kebijakan

the need to establish the operational risk management adequate framework, policy and procedures, which shall be consistently applied in the Company.

The operational risk management strategy has been well formulated and comprehended equally, a very important measure in building awareness of operational risk management in the Company.

The operational risk governance model for the Company is formally, transparently and consistently conducted. Such model is clearly affirmed the duties and responsibilities as well as reporting mechanisms for the creation of effective operational risk management in the Company. The governance model is developed and applied for the accountability on operational risk that may arise, and at the same time to facilitate segregation of duties independently between risk control unit and Internal Audit function.

The nature and level of operational risk can evolve in coherent with the changes of human behaviour, organization structure, process, system, and other external factors. To that end, continuous review, risk monitoring, and dynamic control effectiveness become key points that shall be implemented and realized in order to achieve effective operational risk management.

To facilitate this process, the Company has formed the operational risk main tools as part of effective operational risk management development. As part of operational risk mitigation, the Business Continuity Management serves as an approach that covers framework, standard policy, and procedures in building the defense and capabilities. This is to ensure that the Company's operations can be quickly restored in the event of disruptions at critical functions, in accordance with the set maximum tolerancy limits.

In this instance, the regular crises simulation and recovery training is conducted to examine the plan and preparedness toward the crises that may occur.

Anti Fraud Policy

As part of synergy in the operational risk mitigation, the Anti Fraud policy is developed to create strong and comprehensive anti fraud programs and control. This policy regulates the principle, strategy, and

Manajemen Risiko

Risk Management

ini mengatur prinsip, strategi, dan prosedur terkait fraud yang diimplementasikan pada setiap tingkatan yang ada di Perseroan, guna mendorong terciptanya standar integritas yang tinggi.

Strategi yang diterapkan untuk memerangi fraud didasarkan pada pencegahan, deteksi dini, investigasi, dan perbaikan yang diperlukan. Melalui kebijakan *Anti-Fraud*, Perseroan menerapkan *zero tolerance fraud* terhadap karyawan yang terbukti melakukan atau mendukung *fraud*. Pelaksanaan kebijakan *Anti-Fraud* merupakan tanggung jawab seluruh karyawan tanpa terkecuali. Kampanye *Anti-Fraud* secara terus menerus dipublikasikan kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Budaya manajemen risiko operasional yang kuat di Perseroan diwujudkan melalui program pembelajaran dan kesadaran risiko operasional yang terstruktur. Budaya manajemen risiko operasional tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik.

5.1. Risiko Operasional Lainnya

5.1.1 Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan jenis risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait kegiatan usaha Perseroan, hingga menyebabkan terbentuknya persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko ini muncul ketika reputasi Perseroan terpengaruh oleh satu atau beberapa kejadian yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, khususnya yang timbul akibat publikasi negatif tentang kegiatan bisnis atau kondisi keuangan Perseroan.

Terlepas dari kebenarannya, publikasi negatif berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Perseroan Pembiayaan. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai akibat negatif seperti tuntutan litigasi, penurunan jumlah debitur, bisnis dan/atau pendapatan Perseroan.

Strategi Mitigasi Risiko

Risiko Reputasi dijaga melalui pengelolaan seluruh risiko yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan, melalui tata kelola perusahaan yang baik dan proses manajemen risiko yang efektif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan melalui pemantauan secara aktif atas berita-berita yang beredar, informasi atas perkembangan pasar, persepsi

procedures on fraud implemented in every level of the Company, in order to create high integrity standard.

The strategy implemented to prevent fraud is based on prevention, early detection, investigation, and necessary improvements. Through the Anti Fraud policy, the Company applies zero tolerance fraud towards employees that are proven to have performed or supported fraud. The Anti Fraud policy implementation is the responsibility of entire employees without exception. The Anti Fraud campaign is continuously published to all the Company's organization levels.

Strong operational risk management culture in the Company is realized through learning program and structured operational risk awareness.

Such operational risk management culture is an inseparable part of the good corporate governance.

5.1. Other Operational Risks

5.1.1 Reputation Risk

The Reputation Risk is a risk type that among others resulted by negative publication on the Company's business activities, hence causing negative perceptions on the Company. This risk arises when the Company's reputation is influenced by one or several situations that negatively impacted the Company's reputation, specifically resulted from negative publications on the Company's business activities or financial conditions.

Regardless of the truth, negative publications have the potential to reduce public confidence in the Financing Company. This can cause various negative consequences such as litigation demands, decrease in the number of debtors, business and/or the Company's revenue.

Risk Mitigation Strategy

The Reputation Risk is maintained through all risk management that may influence the Company's reputation, by the execution of good corporate governance and effective risk management process. The Corporate Services and Communication Department carry out the Reputation Risk management through active monitoring on published

Manajemen Risiko

Risk Management

stakeholders, dan publikasi di media massa yang dikelola oleh Corporate Services and Communications Department. Keluhan konsumen yang masuk dan diterima oleh Perseroan akan ditindaklanjuti Corporate Services and Communications Department secara baik, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

5.1.2 Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan jenis risiko yang timbul karena ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Risiko hukum disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, ataupun kelemahan pertalian, seperti tidak dipenuhi syarat sah kontrak, dan lain sebagainya.

Strategi Mitigasi Risiko

Legal Department merupakan satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna memeriksa kembali validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.

Dengan strategi mitigasi dan pengelolaan risiko hukum di atas, maka kepentingan Perseroan senantiasa dapat terlindungi.

5.1.3 Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Strategi Mitigasi Risiko

Untuk Risiko Kepatuhan, Perseroan menunjuk Legal, Corporate Litigation, and Compliance Division yang terus mengkaji, memberikan saran, mengkaji ulang, dan memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur Perseroan yang terkait dengan hukum telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

news, information on market development, stakeholders' perceptions, and mass media publications. The Corporate Services and Communication Department will follow up the customers' complaint recorded and accepted by the Company properly, in accordance with the set timing.

5.1.2 Legal Risk

The Legal Risk is a risk type resulted from the Company's incapability in managing litigations that may be detrimental to the Company. The Legal risk is caused by the weakness of jurisdicitive aspect, which among others due to legal lawsuits, lack of supporting laws and regulatory, or weakness of agreements, such as lack of fulfillment of legal contract requirements, and so forth.

Risk Mitigation Strategy

The Legal Department is a unit/function in charge of legal field and carries out periodic evaluation on the contracts and agreements between the Company and other parties. This is conducted among others by re-assessment on the effectiveness of enforceability process in order to re-verify the validity of rights in such contracts and agreements.

With the above legal risk mitigation strategy and management, the Company's interests can be continually protected.

5.1.3 Compliance Risk

The Compliance Risk is a risk resulted by inadherence or incompliance in the implementation of laws and regulatory as well as other prevailing rules.

Risk Mitigation Strategy

The Company assigns the Legal Corporate Litigation, and Compliance Division to carry out Compliance Risk, by continually reviewing, providing recommendations, re-analysing, and ensuring that all of the Company's policies and procedures related to legal matters have been in compliance with the prevailing regulatory.

Manajemen Risiko

Risk Management

6. Risiko Dukungan Dana

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal pada Perseroan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga. Permodalan Perseroan menggambarkan kemampuan Perseroan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan.

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) bersumber dari kemampuan pendanaan (permodalan) yang rendah dan tambahan pendanaan (permodalan) yang lemah.

Strategi Mitigasi Risiko

Dalam aktivitas usaha pembiayaan, Perseroan dihadapkan pada potensi terjadinya kredit macet, kenaikan suku bunga pinjaman yang berdampak pada penurunan tingkat pendapatan bunga bersih dan kondisi likuiditas *cash flow* Perseroan dalam memenuhi kewajiban pihak kreditur. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan strategi sumber pendanaan baik dari modal sendiri, pinjaman Bank, maupun akses pasar modal maupun pasar uang. Saat ini, profil sumber pendanaan Perseroan masih didominasi oleh pinjaman Bank sebesar >60% dan sisanya penerbitan surat utang. Saat ini, kondisi permodalan Perseroan dirasa sangat baik dan cukup untuk meng-cover potensi kerugian akan terjadi dan telah sesuai dengan ketentuan minimal modal regulator.

Profil Risiko

Profil Risiko Perseroan per Desember 2019 ialah sebagai berikut:

No.	Jenis Risiko Risk Types	Nilai Risik (NR) Risk Value	Bobot Weight	Nilai Risiko Bersih Net Risk Value
1	Kepengurusan Management	1,06	10%	0,13
2	Tata Kelola Governance	1,25	15%	0,37
3	Strategis Strategic	1,24	10%	0,24
	3.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,30		
	3.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,19		
4	Operasional Operational	1,30	20%	0,57
	4.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,45		
	4.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,15		

6. Capital Risk

The Capital Risk is a risk resulted by insufficiency of funds/capital in the Company, including lack of funds/capital injection access to address losses or unforeseen funds/capital needs. The Company's capital reflects the Company's capability in taking unexpected losses resulted from the Company's assets and liabilities management.

The Capital Risk derives from low capital capability and weak capital injection.

Risk Mitigation Strategy

In financing business activities, the Company may address the potential of non-performing loans, increase of loan interest rate that impact on the decrease of net interest income and cash flow liquidity conditions in meeting the obligations of creditors. To that end, the Company has prepared capital resources strategy from own capital, Bank loans, as well as capital market access including money market. Currently, the Company's capital profile is still dominated by Bank loans at >60% and the balance came from bonds issuance. Currently, the Company's capital conditions is considered very good and sufficient to cover losses potential and has been in accordance with the minimum capital limits by the regulators.

Risk Profile

The Company's Risk Profile as of December 2019 is as follows:

Manajemen Risiko

Risk Management

No.	Jenis Risiko Risk Types	Nilai Risik (NR) Risk Value	Bobot Weight	Nilai Risiko Bersih Net Risk Value
5	Aset & Liabilitas Assets & Liabilities	1,13	15%	0,24
	5.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,08		
	5.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,17		
6	Pembiayaan Credit	1,26	30%	0,76
	6.1 Risiko Bawaan Inherent Risk	1,30		
	6.2 Manajemen & Pengendalian Management & Control	1,22		
			100%	2,31
Total Nilai Risiko Bersih (G) / Total Net Risk Value (G)				1,23
Dukungan Dana (Permodalan) / Funding (Capital)				
a.	Kemampuan Permodalan / Capital Capability	1,25	50%	1,22
b.	Tambahan Permodalan / Capital Injection	1,19	50%	0,99
			100%	2,21
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (I) / Total Funding Risk Value (I)				1,22
Bobot Nilai Risiko Bersih dan Nilai Risiko Dukungan Dana/ Weight of Net Risk Value and Funding Risk Value				2/3 : 1/3
Nilai Risiko Keseluruhan / Overall Risk Value				1,23
Tingkat Risiko / Risk Level				Sedang Rendah Low Moderate

Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik perusahaan menjalankan tata kelola manajemen risiko sebagai berikut:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

- Dewan Komisaris memiliki pemahaman yang baik dan senantiasa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pengelolaan risiko perusahaan, pengawasan atas audit internal dan eksternal termasuk hasil temuannya serta memastikan pengungkapan informasi yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan risiko sehari-hari termasuk melakukan formulasi dan eksekusi rencana bisnis (anggaran), pencapaian anggaran, pengaturan kebijakan, pengelolaan dan pemantauan risiko serta sumber daya perusahaan. Sasaran dan strategi perusahaan tercantum dalam anggaran perusahaan dimana dalam penyusunannya telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko.

Implementation of Corporate Risk Management Activities in 2019

Throughout 2019, the company carries out risk management governance as part good governance implementation as follows:

a. Active supervision by the Board of Commissioners, Directors and DPS

- The Board of Commissioners has a good understanding and always carries out a supervisory function on the performance and risk management of the company, oversees internal and external audits including the findings and ensures timely disclosure of information in accordance with applicable regulations.
- The Board of Directors is responsible for day-to-day risk management including formulating and executing business plans (budgets), achieving the budget, managing policies, managing and monitoring risks and company resources. The company's goals and strategies are listed in the company's budget which in its preparation has considered internal and external factors including the company's ability to manage risk.

Manajemen Risiko

Risk Management

- Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan supervisi atas segala aktivitas usaha pembiayaan syariah perusahaan. Anggota DPS bertindak sebagai penasehat dan konsultan perusahaan bagi Direksi dan Unit Usaha Syariah perusahaan. DPS bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam hal aktivitas pengawasan dan pengelolaan risiko perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi terlibat aktif dalam *Risk Oversight Committee* (ROC) dan *Risk Management Committee* (RMC) dengan frekuensi pertemuan masing-masing minimal empat kali setahun.

- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko**
Perusahaan telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko (PPMR) termasuk penetapan batas wewenang memutuskan. Kebijakan tersebut dirasa telah cukup meng-cover semua jenis risiko perusahaan dalam kerangka sebagai Perusahaan Pembiayaan. Penetapan limit risiko diantaranya tertuang dalam anggaran parameter operasional perusahaan per segmen produk pembiayaan. Kecukupan kebijakan, prosedur dan limit risiko tersebut secara berkala dan terus menerus dilakukan *review* dan penyempurnaan menyesuaikan arah bisnis serta kondisi perubahan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat risiko perusahaan.
- c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko**
Perusahaan telah mengimplementasikan *Credit Scoring, Risk Control & Self Assessment, Key Risk Indicator* dan *Loss Even Database* dalam hal upaya identifikasi dan pengukuran tingkat risiko kredit dan risiko operasional. Pemantauan risiko dilakukan secara bulanan melalui *Portfolio Management Report* dan *Operasional Risk Dashboard* termasuk didalamnya proses pemantauan *Risk appetite* perusahaan. Satuan kerja *Risk Management* secara berkelanjutan memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko perusahaan.
- d. Sistem informasi manajemen risiko**
Ketersediaan sistem informasi yang memadai merupakan faktor penunjang utama dalam rangka proses manajemen risiko secara komprehensif. Pendeteksian tingkat risiko secara dini akan sangat berguna dalam hal menekan potensi kerugian perusahaan yang akan terjadi serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat

- Sharia Supervisory Board (DPS) supervises all business activities of sharia financing. DPS members act as corporate advisors and consultants to the Directors and Sharia Business Units of the company. DPS is independent and formed by the National Sharia Board (DSN).

In terms of company risk monitoring and management activities, the Board of Commissioners and Directors are actively involved in the Risk Oversight Committee (ROC) and Risk Management Committee (RMC) with a frequency of meeting at least four times a year.

- b. Adequacy of policies, procedures and determination of risk limits**
The company has a risk management policy set out in the Guidelines for the Implementation of Risk Management (PPMR), including setting limits on decision authority. The policy is considered to have covered all types of company risk in the framework of a Financing Company. The determination of risk limits includes the budget for operational parameters of the company per segment of financing products. The adequacy of these policies, procedures and risk limits is periodically and continuously reviewed and refined to adjust the business direction and the changing conditions of internal and external factors that affect the level of risk of the company.
- c. The process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk**
The Company has implemented Credit Scoring, Risk Control & Self Assessment, Key Risk Indicators and Loss Even Database in terms of identifying and measuring the level of credit risk and operational risk. Risk monitoring is carried out monthly through the Portfolio Management Report and Operational Risk Dashboard including the company's Risk appetite monitoring process. The Risk Management work unit on an ongoing basis ensures the adequacy of the company's risk identification, measurement, monitoring and control processes.
- d. Risk management information system**
The availability of an adequate information system is a major supporting factor in the framework of a comprehensive risk management process. Early detection of the level of risk will be very useful in terms of reducing the potential loss of the company that will occur and decision making can be done quickly and accurately in an effort to mitigate the risk process. The

Manajemen Risiko

Risk Management

dalam upaya proses mitigasi risiko. Perusahaan sangat concern akan pentingnya sistem informasi manajemen risiko yang baik sehingga upaya menyempurnakan dilakukan secara berkelanjutan.

- e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Sistem pengendalian internal dinilai cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko. Secara struktur organisasi, proses pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Proses *review* oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala dengan cakupan aspek pemeriksaan yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil audit menjadi salah satu dasar penyempurnaan kebijakan perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2020

Pada tahun 2020, perusahaan kembali akan membuat langkah perbaikan dengan berpedoman tahun sebelumnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Memperbaiki kualitas penerapan manajemen risiko, terutama pada sisi kecukupan kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Menyempurnakan Laporan Profil Risiko Perusahaan, terkait risiko yang melekat pada kegiatan usaha (*inherent risk*) Perusahaan dan kualitas penerapan manajemen risiko.
- Mempertahankan nilai komposit profil risiko Perusahaan di tahun 2019 yang berada ditingkat "Low" versi penilaian profil risiko perbankan yang disesuaikan terhadap anak Perusahaan (bank) dan tingkat "Sedang Rendah" versi penilaian profil risiko LJKNB.
- Penguatan sistem informasi manajemen risiko terutama implementasi *core system* baru, membangun data *warehouse* dan sistem pelaporan/*monitoring* yang handal guna menunjang peningkatan kinerja Perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis serta penguatan pada proses pemantauan risiko Perusahaan yang lebih komprehensif.
- Fokus pada pengembangan SDM yang berintegritas tinggi dan memiliki kualitas serta kompetensi yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi Perusahaan (*people at the core*). Perbaikan proses rekrutmen, program pelatihan yang baik dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

company is very concerned about the importance of a good risk management information system so that improvement efforts are carried out on an ongoing basis.

- e. A comprehensive internal control system
The internal control system is considered quite effective in supporting the implementation of risk management. Structurally, the internal control process is carried out by the Internal Audit Work Unit which ensures that all transactions are carried out in accordance with applicable policies and procedures. The review process by the Internal Audit Work Unit on a regular basis with the scope of the audit aspects that have been predetermined. Audit results become one of the bases for improving company policy.

Implementation of Corporate Risk Management in 2020

In 2020, the company will again make corrective steps based on the previous year which can be explained as follows:

- Improve the quality of risk management implementation, especially in terms of the adequacy of policies and procedures, the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks, and risk management information systems.
- Improve the Company's Risk Profile Report, related to risks inherent to the Company's business activities (*inherent risk*) and the quality of risk management implementation.
- Maintaining the composite value of the Company's risk profile in 2019 at the "Low" version of the assessment of the banking risk profile adjusted for the subsidiary (bank) and the "Medium Low" version of the LJKNB risk profile assessment.
- Strengthening the risk management information system, especially the implementation of a new core system, building a data warehouse and a reliable reporting/*monitoring* system to support the Company's performance enhancement in conducting the business activities as well as strengthening the Company risk monitoring activities that are more comprehensive.
- Focus on developing high integrity human resources with quality and competence that can support the achievement of the Company's vision and mission (*people at the core*). Improvement of the recruitment process, good training programs and availability of adequate supporting infrastructure.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan Publik dengan pemangku Kepentingan, serta memastikan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan diwajibkan untuk memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

Profil Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Profil Direksi atas nama Zacharia Susantadiredja.

Beliau berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, masyarakat, dan institusi-institusi terkait lainnya. Beliau memonitor kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal dan memastikan pengurus Perseroan memahami perubahan dan implikasinya.

DASAR HUKUM PENUNJUKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Zacharia Susantadiredja, ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 1546/DIR/IV/2015 tanggal 29 April 2015. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan BEI melalui surat No. 1547/DIR/IV/2015 tanggal 29 April 2015, serta dimuat dalam situs web Perseroan www.wom.co.id serta situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2015.

PERIODE JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan penunjukan di atas, Zacharia Susantadiredja menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan efektif dengan berlandaskan surat keputusan Direksi tersebut.

Pursuant to the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies, the function of Corporate Secretary is ensuring effective communication between Public Companies and Stakeholders, and to ensure that the Issuers or Public Companies continuously comply with the prevailing laws and regulations. The Corporate Secretary is established to enhance the implementation of corporate.

CORPORATE SECRETARY PROFILE

The Corporate Secretary Profile can be found in The Board of Directors Profile, Zacharia Susantadiredja.

He serves as a liaison between the Company and the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, the public, and other related institutions. He monitors the Company's compliance with capital market rules and regulations and ensures that the Company's management understands the changes and their implications.

LEGAL BASIS FOR APPOINTMENT OF CORPORATE SECRETARY

Zacharia Susantadiredja, was appointed as Corporate Secretary through the Decree of the Board of Directors No. 1546/DIR/IV/2015 April 29, 2015. The appointment and appointment of the Corporate Secretary has been reported to the OJK and IDX via letter No. 1547/DIR/IV/2015 April 29, 2015, and was posted on the Company's website www.wom.co.id and the Indonesia Stock Exchange website on April 29, 2015.

TERM OF OFFICE OF THE CORPORATE SECRETARY

Based on the appointment above, Zacharia Susantadiredja has served as an effective Corporate Secretary based on the Directors' decision letter.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2019

EDUCATION AND TRAINING OF CORPORATE SECRETARY 2019

No.	Tanggal Dates	Pendidikan & Pelatihan Education & Training
1.	26 November 2019	Seminar Nasional "Peluang dan Tantangan Tahun 2020" National Seminar "Opportunities and Challenges in 2020"
2.	25 Juli 2019 July 25, 2019	Seminar Nasional "Industri Pembiayaan Di Tengah Gejolak Politik dan Ekonomi" National Seminar "Financing Industry Amidst Political and Economical Turmoil"

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Direksi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan Perseoran terhadap undang-undang, ketentuan dan prosedur serta peraturan yang berdampak pada Direksi dan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan saran kepada Direksi mengenai tugas dan kewajiban mereka untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam efek, benturan kepentingan dalam transaksi yang melibatkan Perseroan, larangan dalam transaksi efek dan larangan pengungkapan informasi yang dapat mempengaruhi harga.

Adapun tugas lain Sekretaris Perusahaan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web.
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Corporate Secretary is responsible to provide advice to the Board of Directors regarding the issues related to the Company's compliance with regulatory, rules and procedures as well as regulations that may impact the Board of Directors, and corporate governance best practices. The Corporate Secretary is responsible to provide input to the Board of Directors on their duties and obligations for the disclosure of their interests in the securities, conflict of interests that involve the Company, prohibition in securities transactions and prohibition in disclosure that may affect pricing.

The Corporate Secretary duties are as follows:

1. Monitoring the Capital Market developments, particularly the applicable regulations.
2. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of the Company's Good Corporate Governance, including:
 - Disclosure of information to the public, including the information availability at the Website.
 - Submission of reports to OJK
 - Organization and documentation of the GMS
 - Organization and documentation of the Board of Directors' and/or the Board of Commissioners' meetings
 - Organization of the Company's orientation program for the Board of Directors and/or the Board of Commissioners

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

3. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2019

1. Mengikuti Perkembangan Peraturan Pasar Modal serta memberikan masukan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris khususnya terkait dengan dikeluarkannya peraturan baru dari otoritas Pasar Modal maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan yang diselenggarakan 12 Maret 2019 serta RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan 12 Maret 2019 dan 10 Oktober 2019 dan mendokumentasikan risalah rapat, akta-akta RUPS beserta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPS.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi.
4. Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikan risalah-risalah Rapat tersebut.
5. Mengkaji *website* Perusahaan dan memberikan input informasi yang harus diungkapkan kepada publik.
6. Menyelenggarakan Paparan Publik pada 6 November 2019, guna memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada publik berdasarkan keputusan Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E.
7. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan menyediakan informasi pada *website*, dan melaporkan kepada Bursa Efek Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan setiap informasi yang material yang diperkirakan dapat mempengaruhi pemodal atau harga efek di Bursa.

3. As a liaison between the Company and Shareholders, OJK, and other Stakeholders.

BRIEF REPORT ON THE CORPORATE SECRETARY FUNCTION IMPLEMENTATION IN 2019

1. Keeping up with the Capital Market Regulations Development as well as provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners specifically related to new regulations from the Capital Market regulators or the Financial Services Authority.
2. Organized the Annual GMS held on March 12, 2019, as well as Extraordinary GMS held on March 12, 2019 and October 10, 2019, and documents the meeting minutes, GMS deeds, and other matters related to the organization of GMS.
3. Organized and attended the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
4. Prepared and documented the Meeting Minutes of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings.
5. Reviewed the Company's *website* and uploaded information disclosure to the public.
6. Organized Public Expose on 21 November 2018, in order to meet the requirements of information disclosure to the public pursuant to the decree of Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 regarding the Regulation No. I-E.
7. Carried out information disclosure to the public by providing information at the *website*, and reported every material information to Bursa Efek Indonesia and the Financial Services Authority, which are predicted may influence the investors or securities pricing at the stock exchange.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

HUBUNGAN DENGAN INVESTOR

Bagi Perseroan, terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan investor, regulator dan para pemangku kepentingan lainnya merupakan kewajiban yang mutlak jika hendak tumbuh berkelanjutan dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Dalam rangka memenuhi prinsip Perseroan yang mudah dan transparan, Perseroan telah membentuk divisi yang secara khusus mengelola hal-hal terkait hubungan investor, yaitu Divisi Finansial Planning and Investor Relation. Perseroan secara berkala merilis laporan keuangan melalui situs resmi www.wom.co.id. Pada situs www.wom.co.id Perseroan juga menyediakan materi terkait kinerja bisnis perseroan yang dapat dilihat dan diunduh oleh calon investor.

Selain mempublikasikan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui situs resmi, Perseroan juga memfasilitasi berbagai layanan informasi terkait investor, di antaranya melalui pertemuan secara langsung, konferensi telepon, korespondensi melalui surat elektronik, serta kunjungan langsung. Korespondensi melalui surat elektronik dapat dilakukan melalui alamat corporate_secretary@wom.co.id.

Sebagai bagian dari kewajiban Perseroan sebagai perusahaan Publik, Perseroan telah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 6 November 2019. Public Expose ini dihadiri oleh pemegang saham, analis saham dan perwakilan Bank-Bank yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Perseroan.

INVESTOR RELATIONS

For the Company, maintaining good relationships between the Company and investors, the regulator and other stakeholders is an obligation in achieving sustainable growth and making appropriate decisions. To actualize the Company's principles, easy and transparent, the Company has established a division with special duties to manage all investor-relation-related issues, namely the Financial Planning and Investor Relation Division. The Company periodically releases financial statements through its official website: www.wom.co.id. On www.wom.co.id, the Company also provides materials related to its business performance that can be viewed and downloaded by potential investors.

Aside from publishing information required through the Company's official site, the Company also facilitates a variety of investor-related information services, among others, direct meeting, teleconference, email correspondence and direct visit. Email correspondence can be submitted to corporate_secretary@wom.co.id.

As part of the Company's responsibilities as a public company, the Company had carried out a Public Expose on November 6, 2019. The Public Expose was attended by shareholders, stock analysts and the representatives of banks having cooperation agreement with the Company.

Perkara Hukum

Litigation Case

Sepanjang 2019, Perseroan terlibat dalam 28 (dua puluh delapan) perkara dalam kedudukannya sebagai Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon, Pelapor baik dalam Perkara Hubungan Industrial (perburuhan), Perkara Perdata, Perkara Pidana, serta Perpajakan, yang terdiri dari: 19 (*sembilan belas*) perkara Hubungan Industrial, 6 (*enam*) perkara Perdata, 3 (*tiga*) perkara Pidana, dan 0 (*Nol*) perkara Pajak.

Adapun perincian perkara hukum yang dihadapi Perseroan sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Throughout 2019, the Company was involved in 28 (twenty eight) cases in its position as the Plaintiff, Defendant, Appellant, Appellee, Whistleblowers in Industrial Relations Case (labor), Civil Cases, Criminal Cases, as well as Taxes, which consists of: 19 (nineteen) Industrial Relations cases, 6 (six) Civil cases, 3 (three) Criminal case, and 0 (zero) Tax case.

The following are the details of the Company's legal cases during 2019:

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
1	Perkara antara Hendri Syahputra ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 366/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Case between Hendri Syahputra ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 366 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Mdn in the Industrial Relations Court at the Medan District Court	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
2	Perkara antara Hotman Simanjuntak ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Tpg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Case between Hotman Simanjuntak ("Plaintiff") and the Company ("Defendant") with Case Number 12 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Tpg in the Industrial Relations Court at the Tanjung Pinang District Court	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
3	Perkara antara Dody Maryusandi ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 39/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Dody Maryusandi ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 39 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Pbr in the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
4	Perkara antara Eka Saputra ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 43/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Eka Saputra ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 43 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Pbr at the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>

Perkara Hukum

Litigation Case

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuit	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
5	Perkara antara Jimmy Wahyudi ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 109/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya <i>Case between Jimmy Wahyudi ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 109 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Sby at the Industrial Relations Court at the Surabaya District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
6	Perkara antara RADIUS Sitanggung, SE ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 240/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan <i>Case between RADIUS Sitanggung, SE ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 240 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Mdn in the Industrial Relations Court at the Medan District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
7	Perkara antara Lady Khristanti Sitanggung, SE ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 128/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya <i>Case between Lady Khristanti Sitanggung, SE ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 128 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Sby at the Industrial Relations Court at the Surabaya District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
8	Perkara antara Nur Aidawati ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 34/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang <i>Case between Nur Aidawati ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 34 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Smg at the Industrial Relations Court at the Semarang District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
9	Perkara antara Iskak Munawar ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 242/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung <i>Case between Iskak Munawar ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 242 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Bdg at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
10	Perkara antara Muhammad Kadri ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 286/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan <i>Case between Muhammad Kadri ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 286 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Mdn in the Industrial Relations Court at the Medan District Court</i>	Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>

Perkara Hukum Litigation Case

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
11	<p>Perkara antara Anjas Sinurat, SE ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 285/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan</p> <p><i>Case between Anjas Sinurat, SE ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 285 / Pdt.Sus-PHI / 2018 / PN.Mdn in the Industrial Relations Court at the Medan District Court</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>
12	<p>Perkara antara Galik Abdi Setyawarman,ST ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang</p> <p><i>Case between Galik Abdi Setyawarman, ST ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 16 / Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN.Plg at the Industrial Relations Court at the Palembang District Court</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>
13	<p>Perkara antara Syamsul Huda ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Dps di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar</p> <p><i>Case between Syamsul Huda ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 9 / Pdt.Sus.PHI / 2019 / PN.Dps at the Industrial Relations Court at the Denpasar District Court</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>
14	<p>Perkara antara Rano Aditia Putra ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 48/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang</p> <p><i>Case between Rano Aditia Putra ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 48 / Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN.Plg at the Industrial Relations Court at the Palembang District Court</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>
15	<p>Perkara antara R. Irwan Kurniawan ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 195/pdt.sus-PHI/2019/pn bdg di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung.</p> <p><i>Case between R. Irwan Kurniawan ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 195 / pdt.sus-PHI / 2019 / pn bdg in the Industrial Relations Court at the Bandung District Court.</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>
16	<p>Perkara antara Delvi Putranda ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 83/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru</p> <p><i>Case between Delvi Putranda ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 83 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Pbr at the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court</i></p>	<p>Proses Kasasi <i>Cassation Appeal Process</i></p>	<p>Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i></p>

Perkara Hukum

Litigation Case

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
17	Perkara antara Anil Dewen ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 96/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Anil Dewen ("Plaintiff") and the Company ("Defendant") with Case Number 96 / Pdt.Sus-PHI / 2017 / PN.Pbr at the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court	Proses Kasasi Cassation Appeal Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.
18	Perkara antara Robiana Andi ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 63/Pdt.Sus.PHI/2018/PN.BDG di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Case between Robiana Andi ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 63 / Pdt.Sus.PHI / 2018 / PN.BDG at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court	Proses Kasasi Cassation Appeal Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.
19	Perkara antara Edi Handoko Lumbangaol ("Penggugat") melawan Perseroan ("Tergugat") dengan Nomor Perkara 9/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Case between Edi Handoko Lumbangaol ("Plaintiff") against the Company ("Defendant") with Case Number 9 / Pdt.Sus.PHI / 2016 / PN.Pbr in the Industrial Relations Court at the Pekanbaru District Court	Proses Kasasi Cassation Appeal Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.
20	Perkara Perdata No. 225/Pdt.G/2018/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Dwimoko Bardiyanto (Nasabah) melalui kuasa hukum Law Firm MK & Colleague terhadap perseroan Civil Case No. 225 / Pdt.G / 2018 / PN.Skt in the Surakarta District Court regarding a Lawsuit Against the Law filed by Dwimoko Bardiyanto (Customer) through the attorney of the Law Firm MK & Colleague against the company	Proses Kasasi Cassation Appeal Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.
21	Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2019/PN.Mlg di Pengadilan Negeri Malang perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Drs. H. Yasin (Non-Nasabah) melalui kuasa hukum Budhi Ariyanto, SH. terhadap perseroan. Civil Case No. 34 / Pdt.G / 2019 / PN.Mlg in Malang District Court regarding Lawsuit Against the Law filed by Drs. H. Yasin (Non-Customer) through legal counsel Budhi Ariyanto, SH. towards the company.	Proses Pengadilan Negeri Malang Malang District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.
22	Perkara Perdata No. 71/Pdt.G/2019/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Yusuf Nurhadi (Non-Nasabah) melalui kuasa hukum Yogi Pajar Suprayogi Partner's terhadap perseroan. Civil Case No. 71 / Pdt.G / 2019 / PN.Plg at the Palembang District Court regarding Laws Against Legal Proposals filed by Yusuf Nurhadi (Non-Customer) through Yogi Pajar Suprayogi Partner's legal counsel against the company.	Proses Pengadilan Negeri Palembang Palembang District Court Process	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. Has no material impact on the Company's financial condition.

Perkara Hukum Litigation Case

No.	Pokok Perkara/Gugatan Lawsuits	Status Perkara/Gugatan Lawsuit Status	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on the Company
23	Perkara Perdata No. 164/pdt.G/2019/pn.Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Andri Yuanda Putra (Nasabah) melalui kuasa hukum Eny Setiawati, S.H, C.P.L & partners terhadap perseroan. <i>Civil Case No. 164 / pdt.G / 2019 / pn.Byw in the Banyuwangi District Court regarding Laws Against Legal Proposals filed by Andri Yuanda Putra (Customer) through the legal counsel of Eny Setiawati, S.H, C.P.L & partners towards the company.</i>	Proses Pengadilan Negeri Banyuwangi <i>Banyuwangi District Court Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
24	Perkara Perdata No. 185/pdt.G/2019/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Jefryon (Nasabah) melalui Kantor Hukum Publik & Privat terhadap perseroan. <i>Civil Case No. 185 / pdt.G / 2019 / PN.Plg at the Palembang District Court regarding Lawsuit Against Laws filed by Jefryon (Customer) through the Public & Private Law Offices against the company.</i>	Proses Pengadilan Negeri Palembang <i>Palembang District Court Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
25	Perkara Perdata No. 185/pdt.G/2019/PN.Plg di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Dippu Sahala Simanjuntak (Nasabah) melalui Kantor Hukum Law Office "Muhammad Raja & Associates terhadap perseroan. <i>Civil Case No. 185 / pdt.G / 2019 / PN.Plg in the Lubuk Pakam District Court regarding Laws Against Legal Proposals filed by Dippu Sahala Simanjuntak (Customer) through the Law Office "Muhammad Raja & Associates Law Offices against the company.</i>	Proses Pengadilan Negeri Lubuk Pakam <i>Lubuk Pakam District Court Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
26	Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan surat tanda penerimaan laporan No. STTPLP/B-22/X/2019/RES LAHAT/SEKTA LAHAT di Kepolisian Sektor Kota dengan terlapor Randy Irawan yang merupakan karyawan Perseroan. <i>The General Crimes Case is based on the letter of receipt of the report No. STTPLP / B-22 / X / 2019 / RES LAHAT / SEKTA LAHAT in the City Sector Police with reported Randy Irawan who is a Company employee.</i>	P-21	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
27	Perkara Tindak Pidana Umum No. 2255/Pid.B/2019/PN Tng di Pengadilan Negeri Tangerang dengan terdakwa Sariul Hirka yang merupakan karyawan Perseron. <i>Case for General Crimes No. 2255 / Pid.B / 2019 / PN Tng in the Tangerang District Court with defendant Sariul Hirka who is a Company employee.</i>	Proses Pengadilan Negeri Tangerang <i>Tangerang District Court Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>
28	Perkara Tindak Pidana Umum No. 1945/Pid.B/2019/PN Plg di Pengadilan Negeri Palembang dengan terdakwa Fadly yang merupakan karyawan Perseron. <i>Case for General Crimes No. 1945 / Pid.B / 2019 / PN Plg in Palembang District Court with defendant Fadly who is a Company employee.</i>	Proses Pengadilan Negeri Palembang <i>Palembang District Court Process</i>	Tidak berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perusahaan. <i>Has no material impact on the Company's financial condition.</i>

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Selama tahun 2019 Perseroan memperoleh 1 (satu) sanksi administratif, yaitu keterlambatan penyampaian Laporan debitur dan koreksi Laporan debitur bulan Mei 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan yang tidak material dan yang tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan maupun sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan karena kelalaian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

There were 1 (one) administrative sanctions during 2019, which are materials from the relevant regulators that may influence the Company's business continuity, or administrative sanctions rendered to members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners due to the negligence of members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

Informasi mengenai produk dan layanan, kegiatan, aksi korporasi, dan lain-lain disajikan melalui website Perseroan, yaitu <http://www.wom.co.id>. Pelanggan juga bisa mendapatkan informasi yang terperinci dengan menghubungi call center Perseroan dengan nomor akses +628041123888 atau menghubungi kantor layanan terdekat.

The information on products and services, events, corporate actions and others is also presented in the Company's website, <http://www.wom.co.id>. The customers can also obtain detailed information by contacting the Company's call center at +628041123888 or by contacting the Company's nearest service offices.

Tidak hanya bagi pelanggan, kemudahan akses informasi juga diberikan kepada investor dan calon investor, yaitu dengan menghubungi *Investor Relations* Perseroan melalui alamat surat elektronik corporate_secretary@wom.co.id.

Furthermore, investors and potential investors can also contact the Company's Investor Relations via email corporate_secretary@wom.co.id to access information.

Selain itu, Perseroan juga melakukan keterbukaan informasi terkait fakta material atau hal-hal lain telah ditentukan oleh peraturan terkait melalui surat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia. Keterbukaan Informasi kemudian juga dapat diakses oleh public melalui www.idxnet.co.id.

Moreover, the Company also discloses information related to the material facts or other matters specified by the relevant regulations through a correspondence with OJK and the Indonesia Stock Exchange. The disclosure of Information can also be accessed by the public through www.idxnet.co.id.

Sebagai bagian dari penyediaan Informasi bagi *stakeholder*, pada tahun 2019, perseroan telah mengeluarkan siaran pers, antara lain:

As part of its actions in providing information for the stakeholders, the Company had issued 968 press releases in 2019.

Selama tahun 2019, Perseroan telah melaksanakan korespondensi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta otoritas terkait lainnya, antara lain:

Throughout 2019, the Company has published the correspondence with the Financial Services Authority and Bursa Efek Indonesia as well as other relevant regulators, as follows:

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

SIARAN PERS | PRESS RELEASE

No	Tanggal Date	Judul Release Release Title
1	05 Januari January 2019	WOM Finance Salurkan Bantuan untuk Korban Tsunami Banten WOM Finance Distributes Aid for Banten Tsunami Victims
2	14 Januari January 2019	WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan Bogor Branch WOM Finance Arrests Crime Perpetrator
3	20 Februari February 2019	Kinerja WOM Finance Tahun 2018, Laba Bersih Naik 19% Kinerja WOM Finance Tahun 2018, Laba Bersih Naik 19%
4	28 Februari February 2019	WOM Finance Sarapan Sehat Bersama Anak-Anak Penderita Thalassaemia WOM Finance 2018 Performance, Net Income Increase 19%
5	08 Maret March 2019	WOM Finance Hibur Anak-Anak Penyintas Kanker Di Rumah Singgah YKAKI WOM Finance Entertain Cancer Child Survivors at YKAKI Shelter
6	12 Maret March 2019	RUPS WOM Finance Setujui Pembagian Dividen WOM Finance GMS Approve Dividend Distribution
7	16 Maret March 2019	HUT ke 37, WOM Finance Ajak Anak Berkebutuhan Khusus Nonton Bareng 37th Anniversary, WOM Finance Invites Children with Special Needs to Watch Movies Together
8	23 Maret March 2019	Puncak HUT ke-37, WOM Finance Renovasi Ruang Terbuka Hijau Peak of the 37th Anniversary, WOM Finance Renovates Green Open Spaces
9	23 Maret March 2019	Puncak HUT ke-37, WOM Finance Resmikan Rumah Hidroponik Peak of the 37th Anniversary, WOM Finance Inaugurates Hydroponic House
10	13 April 2019	WOM Finance Gali Bakat Anak Berkebutuhan Khusus di Bandung WOM Finance Explores Talents of Children with Special Needs in Bandung
11	30 April 2019	WOM Finance Edukasi Pendidikan Seks Untuk Anak Jalanan WOM Finance Sex Education for Street-Kids
12	08 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Balaraja Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Balaraja
13	09 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Mauk Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Mauk
14	10 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Bekasi Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Bekasi
15	11 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Mataram Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Mataram
16	13 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Denpasar Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Denpasar
17	13 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Lampung Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Lampung
18	15 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Jombang Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Jombang
19	15 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Jambi Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Jambi
20	17 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Jakarta Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Jakarta
21	18 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Cianjur Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Cianjur
22	18 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebajikan di Pekanbaru Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Pekanbaru

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

SIARAN PERS | PRESS RELEASE

No	Tanggal Date	Judul Release Release Title
23	18 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Gorontalo Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Gorontalo
24	20 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Tasikmalaya Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Tasikmalaya
25	20 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Batam Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Batam
26	21 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Cimahi Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Cimahi
27	21 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Solo Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Solo
28	21 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Lubuk Linggau Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Linggau
29	22 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Semarang Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Semarang
30	24 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Tegal Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Tegal
31	24 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Balikpapan Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Balikpapan
32	25 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Medan Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Medan
33	28 Mei May 2019	Sambut Bulan Suci Ramadhan 1440 H, WOM Finance Berbagi Kebaikan di Palu Welcoming the Holy Month of Ramadhan 1440 H, WOM Finance Shares Kindness in Palu
34	06 Juli July 2019	WOM Finance Nonton Bareng Bersama Anak Yatim WOM Finance Watches Movies Together with Orphans
35	10 Juli July 2019	Perkuat Layanan, WOM Finance Regional Sumbagsel dan Cabang Palembang Pindah Gedung Strengthen Services, Sumbagsel and Palembang WOM Finance Regional Branch Move to New Buildings
36	12 Juli July 2019	WOM Finance Gelar Seminar KDRT di Kalijodo WOM Finance Holds Domestic Violence Seminar at Kalijodo
37	15 Juli July 2019	Kinerja Kuartal I 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 2019 1st Quarter Performance
38	26 Juli July 2019	WOM Finance Selenggarakan Undian Berhadiah "WOMBASTIS" WOM Finance Holds "WOMBASTIS" Lucky Draw
39	28 Juli July 2019	WOM Finance Nonton Bareng Bersama Anak Yatim WOM Finance Watches Movies Together with Orphans
40	31 Juli July 2019	Optimalkan Dana CSR, WOM Finance Jalin Sinergi dengan Dompot Dhuafa Optimizing CSR Funds, WOM Finance Establishes Synergy with Dompot Dhuafa
41	01 Agustus August 2019	WOM Finance Bagikan Kaki dan Tangan Palsu Untuk Masyarakat Kurang Mampu WOM Finance Distributes False Legs and Arms to the Underprivileged
42	09 Agustus August 2019	Menyambut HUT RI, WOM Finance Bagikan 250 Paket Sembako Welcoming Indonesian Independence Day, WOM Finance Distributed 250 Grocery Packages
43	19 Agustus August 2019	Klarifikasi WOM Finance Jenazah Bukan Karyawan WOM Finance WOM Finance Clarification, Deceased Body is Not of a WOM Finance Employee
44	21 Agustus August 2019	WOM Finance Dorong Literasi Bagi Penyintas Thallasaemia WOM Finance Encourages Literacy for Thallasaemia Survivors

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

SIARAN PERS | PRESS RELEASE

No	Tanggal Date	Judul Release Release Title
45	04 September 2019	Relokasi Kantor, WOM Finance Optimis Kinerja Makin Positif Office Relocation, WOM Finance Optimistic of More Positive Performance
46	19 September 2019	Sasar UKM, WOM Finance Gelar Seminar Literasi Keuangan Targeting SMEs, WOM Finance Holds a Financial Literacy Seminar
47	19 September 2019	Pertahankan Komitmen, WOM Finance Raih Infobank Multifinance Award 2019 Maintains Commitment, WOM Finance Wins 2019 Infobank Multifinance Award
48	09 Oktober October 2019	Klarifikasi WOM Finance Rawamangun Rawamangun WOM Finance Clarification
49	10 Oktober October 2019	RUPSLB WOM Finance; "Penggantian Susunan Direksi Perseroan dan Kantor Akuntan Publik" WOM Finance EGMS; "Change of the Company's Board of Directors Composition and Public Accounting Firm"
50	10 Oktober October 2019	Meraih Prestasi Baik, WOM Finance Raih 2 Penghargaan Di Indonesia Multifinance Company of the Year 2019 Achieving Good Performance, WOM Finance Wins 2 Awards at the 2019 Multifinance Company of the Year
51	30 Oktober October 2019	WOM Finance Jadi Salah Satu Emiten Terbaik Versi Forbes 2019 WOM Finance is One of Forbes' 2019's Best Issuers
52	06 November 2019	WOM Finance Catatkan Laba Bersih Rp 156 miliar Selama 9 Bulan di tahun 2019 WOM Finance Records Rp156 billion Net Profit for 9 Months in 2019
53	27 November 2019	WOM Finance Raih 2 Penghargaan Dalam Top Digital Award 2019 WOM Finance Wins 2 Awards in 2019 Top Digital Award
54	05 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Wonosobo Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Wonosobo
55	10 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Tangerang Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Tangerang
56	11 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Purwakarta Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Purwakarta
57	11 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Baturaja Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Baturaja
58	12 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Ciledug Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Wonosobo
59	12 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Pekanbaru Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Pekanbaru
60	13 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Bogor Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Bogor
61	13 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Semarang Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Semarang
62	14 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Medan Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Medan

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

SIARAN PERS | PRESS RELEASE

No	Tanggal Date	Judul Release Release Title
63	16 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Madiun Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Madiun
64	16 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Makassar Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Makassar
65	18 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Sidoarjo Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Sidoarjo
66	20 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Metro Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Metro
67	20 Desember December 2019	Menebar Kasih, WOM Finance Natalan Bersama Anak-Anak Disabilitas di Bontang Spreading the Love, WOM Finance Celebrates Christmas with Children with Disabilities in Bontang

OJK | FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
1	002/I/CS/2019	15 Januari 1 January 2019	OJK	Laporan Realisasi Penawaran Umum Terbatas ("PUT I") kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Report on Realization of Limited Public Offering ("PUT I") to the Company's Shareholders in the context of Issuance of Pre-emptive Rights ("Rights")
2	003/I/CS/2019	15 Januari 1 January 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I, II, III, IV, V Obligasi WOM Finance Tahun 2016, 2017 dan 2018 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering II Phase I, II, III, IV, V of WOM Finance Bonds in 2016, 2017 and 2018
3	004/I/CS/2019	15 Januari 1 January 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Obligasi WOM Finance Tahun 2018 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering III Phase I of WOM Finance Bonds 2018
4	005/I/CS/2019	24 Januari 1 January 2019	OJK	Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan RUPS PT. Wahana Ottomitra Multiartha Announcement of the plan for holding the PT Wahana Ottomitra Multiartha GMS
5	006/I/CS/2019	29 Januari 1 January 2019	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Tahunan Pendidikan Dan Pelatihan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun Anggaran 2019 Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Annual Education and Training Annual Plan Report 2019
6	007/I/CS/2019	30 Januari 1 January 2019	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's Annual Business Plan Report
7	009/I/CS/2019	01 Februari 1 February 2019	OJK	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Announcement of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

OJK | FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
8	010/I/CS/2019	01 Februari I February 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Advertisement Evidence of Announcement of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
9	019/II/CS/2019	15 Februari I February 2019	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Des 2018 Submission of Annual Financial Statements Period 31 Dec 2018
10	020/II/CS/2019	15 Februari I February 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan di Media untuk laporan Keuangan Tahunan Periode 31 Desember 2018 Submitting Evidence of Advertising in the Media for the Annual Financial Report for the 31 December 2018 Period
11	024/II/CS/2019	18 Februari I February 2019	OJK	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 Submission of 2018 Annual Report
12	025/II/CS/2019	18 Februari I February 2019	OJK	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Invitation to the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
13	026/II/CS/2019	18 Februari I February 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan "Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Ads Proof "Invitation of Annual and Extraordinary GMS" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
14	030/II/CS/2019	22 Februari I February 2019	OJK	Tanggapan atas surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-40/NB.1/2019 tentang Permintaan Daftar Pemegang Saham sampai dengan <i>Ultimate Shareholder/Beneficial Owner</i> Perusahaan Pembiayaan Response to the Financial Services Authority (OJK) letter No. S-40 / NB.1 / 2019 regarding Requests for Register of Shareholders to the Ultimate Shareholder / Beneficial Owner of the Financing Company
15	031/II/CS/2019	25 Februari I February 2019	OJK	Perbaikan atas Surat No. 024/II/CS/2019 tentang Penyampaian Laporan Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Tahun Buku 2018 Correction to Letter No. 024 / II / CS / 2019 concerning Submission of Annual Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Fiscal Year 2018
16	032/II/CS/2019	25 Februari I February 2019	OJK	Tanggapan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-98/NB.22/2019 tentang Pemberitahuan terkait Rencana Bisnis Tahunan 2019 Response to Financial Services Authority Letter No. S-98 / NB.22 / 2019 concerning Notifications relating to the 2019 Annual Business Plan
17	074/III/CS/2019	06 Maret I March 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I Obligasi WOM Finance Tahun 2018 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering III Phase I of WOM Finance Bonds 2018
18	0350/III/DIR-WOM/2019	14 Maret I March 2019	OJK	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Implementation and Result Report of Annual and Extraordinary GMS PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
19	0351/III/DIR-WOM/2019	14 Maret I March 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan "Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Advertisement Evidence "Results of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
20	0352/III/DIR-WOM/2019	14 Maret I March 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
21	0361/III/DIR-WOM/2019	14 Maret I March 2019	OJK	Jadwal Dividen Dividend Schedule

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

OJK | FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
22	079/IV/CS/2019	05 April 2019	OJK	Penyampaian Realisasi pencapaian target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total pendanaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the achievement of the net outstanding target Principal to the total funding of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
23	085/IV/CS/2019	10 April 2019	OJK	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Minutes of Annual & Extraordinary General Meeting of Shareholders and Summary of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
24	086/IV/CS/2019	16 April 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
25	090/IV/CS/2019	29 April 2019	OJK	Penyampaian Lap. Keuangan Triwulan I Periode 31 Maret 2019 PT. Wahana Ottomitra Multiartha Submission of Quarter I Financial Statements for March 31, 2019 PT. Wahana Ottomitra Multiartha
26	091/IV/CS/2019	06 Mei I May 2019	OJK	Penyampaian Realisasi pencapaian target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total pendanaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the achievement of the net outstanding target Principal to the total funding of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
27	0642/IV/DIR-WOM/2019	13 Mei I May 2019	OJK	Surat Untuk Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019 Letter for Additional Information on WOM Finance Phase II Sustainable Bonds III Sustainable Public Offering 2019
28	0735/VI/DIR-WOM/2019	10 Juni I June 2019	OJK	Untuk Penyampaian Real.pencapaian target rasio saldo piutang Mei 2019 For Submission of Realization of the achievement of the target of May 2019 receivable balance ratio
29	101/VI/CS/2019	18 Juni I June 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
30	105/VI/CS/2019	24 Juni I June 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
31	110/VII/CS/2019	12 Juli I July 2019	OJK	Laporan Realisasi Penawaran Umum Terbatas ("PUT I") kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") Report on Realization of Limited Public Offering ("PUT I") to the Company's Shareholders in the context of Issuance of Pre-emptive Rights ("Rights")
32	111/VII/CS/2019	12 Juli I July 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II, III, IV, V Obligasi WOM Finance Tahun 2017 dan 2018 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering II Phase II, III, IV, V of 2017 and 2018 WOM Finance Bonds
33	112/VII/CS/2019	12 Juli I July 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I dan II Obligasi WOM Finance Tahun 2018 dan 2019 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering III Phase I and II of WOM Finance Bonds in 2018 and 2019
34	114/VII/CS/2019	18 Juli I July 2019	OJK	Penjelasan atas surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-771/PM.221/2019 tentang Penelaahan atas Laporan Tahunan 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Explanation of the Financial Services Authority (OJK) letter No. S-771 / PM.221 / 2019 concerning Review of the 2018 Annual Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

OJK | FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
35	119/VII/CS/2019	30 Juli July 2019	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>) Submission of Semi-Annual Financial Statements for 30 June 2019 period PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>)
36	121/VII/CS/2019	30 Juli July 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan di Media untuk Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juli 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>) Submitting Evidence of Media Advertisements for the 30 July 2019 Semi Annual Financial Report of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>)
37	122/VII/CS/2019	31 Juli July 2019	OJK	Untuk Tanggapan RESOJK Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan For RESOJK Responses to Financing Company Business Plans
38	123/VIII/CS/2019	05 Agustus August 2019	OJK	Penyampaian Realisasi pencapaian target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total pendanaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the achievement of the net outstanding target Principal to the total funding of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
39	131/VIII/CS/2019	27 Agustus August 2019	OJK	Pemberitahuan Rencana RUPSLB Notice of EGMS Plan
40	133/IX/CS/2019	03 September 2019	OJK	Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
41	134/IX/CS/2019	03 September 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Advertisement Evidence Announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
42	1126/IX/DIR-WOM/2019	05 September 2019	OJK	Untuk Penyampaian <i>Real</i> .pencapaian target rasio saldo piutang Agustus 2019 For Submission of Realization of the achievement of the target receivable balance ratio in August 2019
43	1143/IX/DIR-WOM/2019	10 September 2019	OJK	Pemberitahuan Pemberhentian Sementara Anggota Direksi PT. Wahana Ottomitra Multiartha Notification of Temporary Dismissal of Directors of PT. Wahana Ottomitra Multiartha
44	138/IX/CS/2019	18 September 2019	OJK	Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
45	139/IX/CS/2019	18 September 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Advertisement Evidence of an Extraordinary General Meeting of Shareholders' Call for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
46	1289/X/DIR-WOM/2019	04 Oktober October 2019	OJK	Untuk Penyampaian <i>Real</i> .pencapaian target rasio saldo piutang September 2019 For Submission of Real. Achievement of the target of the balance of accounts receivable September 2019
47	181/X/CS/2019	8 Oktober October 2019	OJK	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap II Obligasi WOM Finance Tahun 2019 Realization Report on the Use of Funds from Sustainable Public Offering III Phase II of WOM Finance Bonds in 2019
48	183/X/CS/2019	14 Oktober October 2019	OJK	Laporan Pelaksanaan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Implementation Report and Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

OJK | FINANCIAL SERVICE AUTHORITY

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
49	184/X/CS/2019	14 Oktober 1 October 2019	OJK	Penyampaian Bukti Iklan " Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Advertisement Evidence "Extraordinary General Meeting of Shareholders" PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
50	185/X/CS/2019	14 Oktober 1 October 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
51	186/X/CS/2019	14 Oktober 1 October 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts
52	189/X/CS/2019	21 Oktober 1 October 2019	OJK	Perubahan Susunan Direksi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Changes in the Composition of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Board of Directors
53	223/X/CS/2019	30 Oktober 1 October 2019	OJK	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III periode 30 September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>) Submission of Quarter III Financial Statements for 30 September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>)
54	231/XI/CS/2019	05 November 2019	OJK	Penyampaian Realisasi pencapaian target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total pendanaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of the achievement of the net outstanding target Principal to the total funding of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
55	233/XI/CS/2019	07 November 2019	OJK	Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders and Summary of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
56	242/XI/CS/2019	29 November 2019	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Sustainable Finance Action Plan Report PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
57	244/XII/CS/2019	2 Desember 1 December 2019	OJK	Penyampaian Laporan Rencana Bisnis Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Annual Business Plan Report PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
58	248/XII/CS/2019	4 Desember 1 December 2019	OJK	Penyampaian Realisasi pencapaian target rasio Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) neto terhadap total pendanaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Realization of ratio target achievement of (<i>Outstanding Principal</i>) net to total financing PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
59	252/XII/CS/2019	27 Desember 1 December 2019	OJK	Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Report on Information Disclosure or Material Facts

Bursa Efek Indonesia (BEI)

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
1	001/I/CS/2019	08 Januari 1 January 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Desember 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of December 2018 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Akses Informasi & Data Perusahaan

Information Access & Company Data

Bursa Efek Indonesia (BEI)

No	No Surat Letter Number	Tanggal Date	Kepada To	Perihal about
2	016/II/CS/2019	11 Februari February 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Januari 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of January 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
3	076/III/CS/2019	11 Maret March 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Februari 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of February 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
4	084/IV/CS/2019	10 April 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per maret 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Register of Securities Holders per March 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
5	097/VI/CS/2019	12 Juni June 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per mei 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Register of Securities Holders per May 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
6	107/VII/CS/2019	05 Juli July 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juni 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of June 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
7	120/VIII/CS/2019	30 Juli July 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Periode 30 Juni 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>) Submission of Semi-Annual Financial Statements for 30 June 2019 period PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>)
8	125/VIII/CS/2019	06 Agustus August 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per Juni 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of June 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
9	136/IX/CS/2019	08 September 2019	Bursa Stock Exchange	Laporan bulanan registrasi pemegang efek per agustus 2019 Monthly report of registration of securities holders per August 2019
10	180/X/CS/2019	08 Oktober October 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
11	190/X/CS/2019	22 Oktober October 2019	Bursa Stock Exchange	Rencana Penyelenggaraan Public Expose Tahunan Annual Public Expose Implementation Plan
12	224/X/CS/2019	30 Oktober October 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III periode 30 September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>) Submission of Quarter III Financial Statements for 30 September 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (<i>Unaudited</i>)
13	229/X/CS/2019	31 Oktober October 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian materi Public Expose Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's Annual Public Expose material
14	235/XI/CS/2019	08 November 2019	Bursa Stock Exchange	Laporan Registrasi Efek Per Oktober 2019 Securities Registration Report As of October 2019
15	236/XI/CS/2019	11 November 2019	Bursa Stock Exchange	Laporan Pelaksanaan Public Expose Tahunan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Annual Public Expose Report
16	249/XII/CS/2019	04 Desember December 2019	Bursa Stock Exchange	Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per November 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Submission of Monthly Report on Securities Holder Registration as of November 2019 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Kode Etik

Code of Conduct

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika tertinggi dalam hal kejujuran, integritas dan profesional dalam berbisnis. Oleh karena itu, Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang disusun Perseroan memberikan pedoman standar perilaku minimum yang diharapkan untuk dipatuhi oleh segenap karyawan termasuk jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite-Komite Perseroan yang dibentuk.

Pokok-Pokok Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang berlaku di Perseroan meliputi beberapa bagian, yaitu:

1. Nilai-nilai Dasar (*Core Values*) yang berisi nilai-nilai budaya di Perseroan yang diharapkan dapat diterapkan menjadi etos kerja seluruh pihak yang bekerja di Perseroan.
2. Komitmen Atas Kode etik dan Pedoman Tingkah Laku, yang berisi pernyataan persetujuan dari seluruh pihak yang bekerja di Perseroan untuk berkomitmen atas Kode Etik dan pedoman Tingkah Laku Perseroan.
3. Standar-standar (norma-norma) tingkah laku dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang terdiri atas:
 - a. Tanggungjawab kepada Perseroan, yang memuat:
 - Standar Etika;
 - Kebijakan dan strategi perusahaan;
 - Bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
 - Bekerja dengan memberikan karya terbaik;
 - Menggunakan dan menjaga aset Perseroan;
 - Menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme;
 - Penggunaan media sosial;
 - Kebijakan untuk pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).
 - b. Tanggungjawab di tempat kerja, yang memuat:
 - Praktik penggunaan tenaga kerja secara adil dan jujur;
 - Menjaga hubungan baik antar personil Perseroan;
 - Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja;
 - Sopan santun berpakaian di lingkungan kerja Perseroan;
 - Pekerjaan di luar Perseroan atau kepentingan bisnis eksternal;
 - Budaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
 - c. Etika Mewakili Perseroan dan Berinteraksi Dengan Pihak Luar, yang memuat:
 - Perlakuan yang adil;
 - Dasar kerjasama dengan pemasok (*vendor*);
 - Pernyataan kepada publik atau massa;
 - Hadiah dan hiburan;
 - Menjaga pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*).

In realizing its vision and mission, the Company committed to implement its business in accordance with the highest ethical standard in terms of honesty, integrity and professionalism in business. To that end, the Company's Code of Conduct provides the minimum conduct guidelines that expected to be obeyed by all employees including the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and the Committees.

Code of Conducts Key Points

The applicable Code of Conduct in the Company covers several parts, which are:

1. Core values containing the Company's corporate culture that expected to be implemented as work ethics of all the Company's employees.
2. Code of Conduct commitment, containing approval statements from all the Company's employees to render its commitment toward the Company's Code of Conduct.
3. Standards of behavior (norms) within the Code of Conduct, which consist of:
 - a. Responsibility to the Company, which covers:
 - Ethical Standard;
 - Company's policies and strategy;
 - Act in good faith, honest and professional;
 - Work with best performance;
 - Use and maintain the Company's assets
 - Refuse money laundering and terrorism funding;
 - Usage of social media;
 - Whistleblowing system policy
 - b. Responsibility at work place, which covers:
 - Fair and honest practices of manpower usage;
 - Maintain good relations between the Company's personnel;
 - Maintain occupational health and safety;
 - Decent way of clothing in the Company's work place;
 - External works or external business interests;
 - Corporate social responsibility culture.
 - c. Ethics in Representing the Company and Interacting with External Parties, which covers:
 - Fair treatment;
 - Cooperation base with vendors;
 - Public or mass statements;
 - Presents and entertainment;
 - Maintain the segregation of duties.

- d. Kerahasiaan
 - e. Investasi dan Kegiatan Luar, yang memuat:
 - Perdagangan orang dalam (insider trading);
 - Mengelola benturan kepentingan.
 - f. Kepatuhan
 - g. Sanksi
4. Pernyataan Komitmen Pribadi

- d. Confidentiality
 - e. Investment and External Activities, which covers:
 - Insider trading;
 - Conflict of interests handling.
 - f. Compliance
 - g. Sanctions
4. Personal Commitment Statement.

Pemberlakuan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan berlaku untuk seluruh insan di Perseroan, yang mencakup atas:

- Segenap karyawan Perseroan;
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- Anggota Komite-Komite Perseroan yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan.

Code of Conduct Enforcements

The Company's Code of Conduct is applicable for all of the Company's employees, which covers:

- The Company's entire employees;
- Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; and
- The Company's established Committees and accountable to the Company's Board of Directors or Board of Commissioners.

Penyebarluasan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Untuk memudahkan akses Personil Perseroan, buku Kode etik dan Pedoman Tingkah Laku juga dibuat dalam bentuk digital dan telah diunggah dan dapat diakses di sistem informasi berupa portal internal Perseroan.

Code of Conduct Disseminations

For the accessibility to the Company's employees, the Code of Conduct book is produced digitally and has been uploaded for access in information system in a form of the Company's internal portal.

Sanksi dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Atas Personil Perseroan dalam tingkatan apapun, apabila jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, Perseroan akan mengeluarkan sanksi sesuai dengan tingkatan sanksi dalam ketentuan internal Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Code of Conduct Sanctions

In the event that any employees of the Company are proven violated the Code of Conduct that may cause disciplinary actions, the Company shall impose the sanctions in accordance with the sanction levels stated in the Company's internal rules and/or prevailing regulatory.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Perseroan dapat juga merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang dapat berisiko dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata atas Personil Perseroan dan/atau Perseroan.

The violations on the Company's Code of Conduct may also in a form of breaching of the legal rules that may risk of being subjected to criminal and civil sanctions on the Company's employees and/or the Company.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Beserta Sanksi yang Diberikan Pada Tahun 2019

Selama tahun 2019, Perseroan telah menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku dengan rekapitulasi penerapan sanksi sebagai berikut:

Total Violations of Code of Conduct and Sanctions during 2019

During 2019, the Company has settled the violations cases on Code of Conduct with the following sanctions recapitulation:

No	Jenis Sanksi Sanction Types	Jumlah Sanksi yang diberikan Number of Snctions Given
1	Kinerja Work Performance	466
2	Etos Kerja Work Ethics	69
3	Peraturan Perusahaan Company Regulation	469

Budaya Kerja Perusahaan

Corporate Culture

Budaya kerja yang diterapkan pada perusahaan ialah nilai-nilai yang terdiri atas *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence, & Efficiency* serta *Relationship Building* (TIGER). Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh seluruh perusahaan di bawah Maybank Group. Nilai-nilai TIGER dijabarkan sebagai berikut:

T:

Teamwork (Bekerjasama sebagai sebuah tim yang dilandasi rasa saling menghargai, percaya dan menghormati)

- Saling percaya dan saling menghargai
- Berkomunikasi secara terbuka
- Menjaga sinergi

I:

Integrity (Berperilaku jujur, menjaga etika dan profesionalisme)

- Berperilaku konsisten sesuai etika dan norma
- Melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan

G:

Growth (Berhasrat untuk terus menerus melakukan perbaikan dan inovasi serta pengembangan diri)

- Perbaikan dan pembelajaran terus menerus
- Inovasi (kreatif, berpikir jauh ke depan/visioner yang dapat memberikan nilai tambah)
- Proaktif
- Menunjukkan dorongan untuk berprestasi

E:

Excellent & Efficiency (Berkomitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik, bekerja dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan)

- Berorientasi pada pelayanan
- Bekerja dengan cepat dan tepat
- Mengutamakan efisiensi

R:

Relationship Building (Berusaha untuk membangun dan memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan)

- Membangun jaringan yang luas
- Memelihara relasi
- Membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan para pemangku kepentingan

The corporate culture applied in the Company comprises values of *Teamwork, Integrity, Growth, Excellence, Efficiency and Relationship Building* (TIGER). These values are applied in all companies under the Maybank Group. TIGER is explained as follow:

T:

Teamwork (Working as a team based on tolerance, mutual trust and respect)

- Trust and respect each other
- Communicate openly
- Maintain the synergy

I:

Integrity (Being honest, keeping good ethics and professionalism)

- Behave in accordance with ethics and norms
- Conduct accountable actions

G:

Growth (Having desire to generate continuous improvement, innovation and self-development)

- Improve and learn continuously
- Innovate (being creative, forward-looking/visionary to create additional value)
- Proactive
- Demonstrate motivation to excel

E:

Excellent & Efficiency (Committed to generating the best performance, working fast and properly to give satisfying services)

- Service-oriented
- Work fast and properly
- Prioritize efficiency

R:

Relationship Building (Striving to build and maintain good and beneficial relationships)

- Build vast network
- Maintain relationship
- Build a good relationship with colleagues and the stakeholders

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris & Direksi

Policy of Diversity of The Board of Commissioners & Board of Directors Composition

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan didasarkan pada berbagai latar belakang yang berbeda, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan serta pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

The diversity policy of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors is based on different age, educational background and experience required in performing their duties and responsibilities.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi tercermin pada tabel dibawah ini.

The diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition is shown in the table below:

Nama Name	Jenis Kelamin Sex	Jenjang Pendidikan Education	Usia Age	Pengalaman Experience
I Nyoman Tjager	Laki-laki Male	Doktoral Doctor	Terlampir dalam profil Shown in Profile	
Robbyanto Budiman	Laki-laki Male	Master		
Garibaldi Thohir	Laki-laki Male	Master		
Myrnie Zachraini Tamin	Perempuan Female	Master		
Thilagavathy Nadason	Perempuan Female	Sarjana Bachelor		

Nama Name	Jenis Kelamin Sex	Jenjang Pendidikan Education	Usia Age	Pengalaman Sex
Djaja Suryanto Sutandar	Laki-laki Male	Sarjana Bachelor	Terlampir dalam profil Shown in Profile	
Zacharia Susantadiredja	Laki-laki Male	Sarjana Bachelor		
Anthony Y. Panggabean	Laki-laki Male	Sarjana Bachelor		
Njauw Vido Onadi	Laki-laki Male	Master		

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya untuk memantau dan memitigasi risiko fraud melalui penerapan 4 pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memantau dan mengendalikan fraud pada pilar deteksi, Perseroan menyediakan kebijakan *whistleblowing system* sebagai sarana laporan pengaduan *fraud* dari seluruh karyawan Perseroan baik di cabang, *business unit* maupun kantor pusat, hasil temuan Internal Audit dan *Anti Fraud* serta dari pihak eksternal kepada Presiden Direktur dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud.

Whistleblowing System sebagai salah satu program Strategi *Anti Fraud* yang bertujuan untuk:

1. Mendeteksi kejahatan *fraud* atau indikasi *fraud* melalui laporan pengaduan yang dapat disampaikan dengan mencantumkan secara jelas identitasnya, untuk selanjutnya dapat dilakukan proses investigasi ataupun tindakan tindak lanjut.
2. Mendorong *awareness* atau kepedulian seluruh karyawan untuk turut serta menjaga unit kerjanya dari kerugian akibat *fraud* sehingga kualitas pengawasan lebih baik dan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) karyawan menjadi lebih tinggi.
3. Meningkatkan reputasi perusahaan khususnya dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan meningkatkan citra perusahaan karena memiliki kelengkapan perangkat *anti fraud* yang memadai.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Perseroan menyediakan fasilitas penyampaian laporan pelanggaran baik yang masih berupa dugaan maupun telah terbukti terjadi melalui email Jendela (jendela@wom.co.id). Laporan yang diterima akan diproses sesuai dengan kebijakan SOP dan peraturan lainnya yang berlaku di Perseroan.

Indikasi *fraud* atau *fraud* dapat disampaikan oleh pelapor (*risk owner*) melalui mekanisme sebagai berikut:

1. *Risk owner* mengirimkan laporan ke email Jendela (jendela@wom.co.id).

Pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 35 / POJK.05 / 2018 concerning Financing Business Financing Company, the Company has conducted monitoring and mitigation of fraud risk through the following 4 (four) pillars:

1. Prevention
2. Detection
3. Investigation, Reporting and Sanction
4. Monitoring, Evaluation and Follow Up

In the effort to monitoring and control the fraud at detection pillar, the Company provides the whistleblowing system policy as a fraud reporting facility from the entire employess of Company at branches, business units and head office. Including finding results of Internal Audit and Quality Assurance & Litigation (QAL) as well as from external parties to the President Director, by emphasizing on whistleblowing disclosures to enhance the effectiveness of fraud control system implementation.

The Whistleblowing System as one of Anti Fraud Strategy programs, aims to:

1. Detect fraud crimes or fraud indications through whistleblowing report that can be submitted with clear identity, for further investigation process or follow up.
2. Bolster the awareness or engagement of all employees to participate and maintain their work units from any loss due to fraud thereby creating better oversight quality and higher sense of belonging within the employees.
3. Enhance the corporate reputation specifically in the context of Good Corporate Governance, which will improve the corporate image, resulted from the adequate anti fraud tools completeness.

Whistleblowing Mechanism

The Company provides the whistleblowing reporting mechanism for both under presumption or has been proven to occur through email facility Jendela (jendela@wom.co.id). The incoming reportings will be processed according to the SOP policy and other prevailing regulations at the Company.

Fraud Indications or fraud can be submitted by the risk owner through the following mechanisms:

1. Risk owners submit the report to email Jendela (jendela@wom.co.id).

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

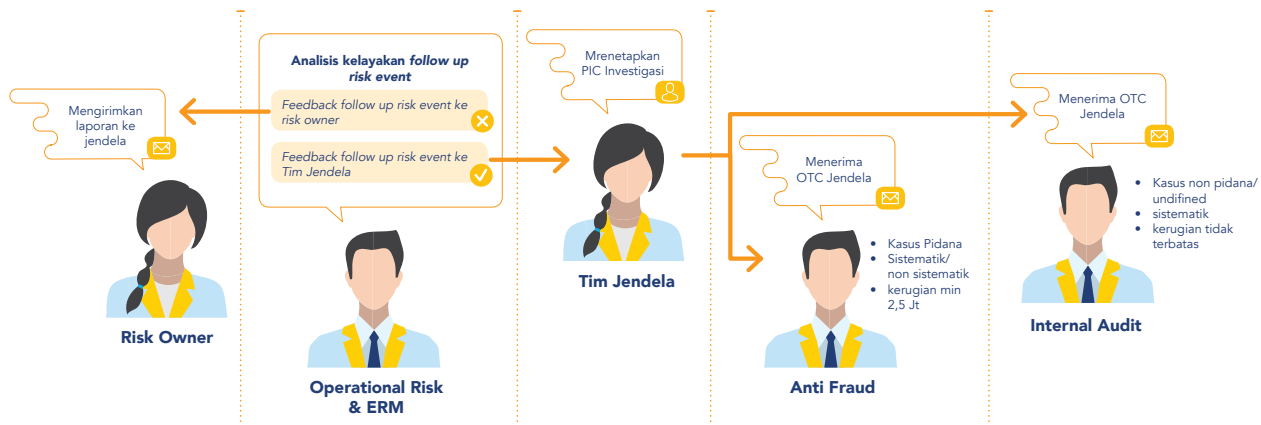
- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Operational Risk & Enterprise Risk Management (OR & ERM) akan menerima email Jendela kemudian melakukan analisis kelayakan <i>follow up risk event</i> dan mendiskusikan pembagian tanggung jawab <i>follow up risk event</i> ke Tim Jendela. 3. Jika hasil analisis kelayakan <i>follow up risk event</i>, laporan tidak memenuhi standar kelayakan, maka <i>risk owner</i> akan mendapatkan <i>feedback follow up risk event</i>. 4. Jika hasil analisis kelayakan <i>follow up risk event</i>, laporan memenuhi standar kelayakan maka Tim Jendela akan menentukan Penanggung Jawab Investigasi berdasarkan analisis <i>risk event</i>, kategori kasus dan nilai kerugian yang ditimbulkan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. The Operational Risk & Enterprise Risk Management (OR & ERM) will receive the email Jendela, then will analyse the qualification on the follow up risk event and to discuss the segregation of responsibilities for the follow up risk event to the Jendela Team. 3. If the qualification analysis result of the follow up risk event, in which the report does not meet the qualification standard, then the risk owner will receive the feedback of follow up risk event. 4. If the qualification analysis result of the follow up risk event, in which the report has met the qualification standard, then the Jendela Team will determine the Investigation PIC based on the risk event analysis, cases category and loss value that occurred. |
|---|---|

No	PIC Investigasi PIC of the Investigation	Analisis Risk Event Risk Event Analysis	Kategori Kasus Case Category	Nilai Kerugian Loss Value
1	Internal Audit	Sistematik Systematic	Non pidana Non Criminal Undefined	Tidak dibatasi Unlimited
2	Anti Fraud	Sistematik Non Sistematik	Pidana Criminal	Sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000 At least Rp2.500.000

a.	Sistematik	: Insiden yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan atau ada keterlibatan lintas fungsi, minimal melibatkan satu karyawan level Head dan berulang tanpa bisa teridentifikasi oleh risk owner.
b.	Non Sistematik	: Insiden yang dilakukan oleh paling banyak dua orang dalam satu unit kerja dimana pelaku berada pada level staf dan atau supervisor.
c.	Non Pidana	: Kasus yang tidak berkaitan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara namun melanggar peraturan perusahaan, kode etik karyawan atau norma.
d.	Pidana	: Kasus yang berkaitan dengan hukum yang ditetapkan Negara yang ditunjukkan dengan adanya bukti awal yang memadai.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Bagan Penyampaian Laporan Pelanggaran Whistleblowing Report Submission Diagram



Perlindungan Bagi Whistleblower

Setiap pelapor akan diberikan jaminan perlindungan dari Perseroan sebagai berikut:

1. Email Jendela hanya bisa diakses oleh Direksi, Chief Human Capital, Anti Fraud Division Head, Internal Audit Division Head dan Risk Management Division Head. Keterbatasan akses terhadap *email* ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan informasi/laporan berikut pelaporannya.
2. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor (nama, alamat, nomor telepon, email dan unit kerja), serta memberikan perlindungan kepada pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama atau sepanjang pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadakan atau dilaporkan.
3. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk perusahaan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan dan fakta penyimpangan.
4. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh perusahaan dalam proses terkait dengan pelaporan dan pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Protection for Whistleblowers

Every whistleblowers (risk owners) will be given protection from Company, as follows:

1. Email Jendela can only be accessed by the Board of Directors, Chief Human Capital, Anti Fraud Division Head, Internal Audit Division Head and Risk Management Division Head. The access limitation of this email functioning to maintain confidentiality of information/ reports including the risk owners.
2. The Company guarantees the confidentiality of risk owners' identity (name, address, telephon number, email and work unit), as well as provides protection for the risk owners from any form of threats, intimidations, or unpleasant acts from any parties, to the extent or so long as the risk owners can maintain the confidentiality of the claimed or reported cases.
3. This protection shall also apply to the officers appointed by the Company in doing the investigations, verifications or parties that provides relevant information on the whistleblowing and violations facts.
4. The parties obtained authorities by the Company in the process related to reporting and whistleblowing, which violates the principle of confidentiality, will be given sanctions in accordance with the prevailing rules and regulations in the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan yang berasal dari *whistleblower* yang masuk ke email Jendela (jendela@wom.co.id) akan dilakukan analisa oleh OR & ERM Department untuk menentukan pihak yang akan menangani pengaduan tersebut.
2. Laporan pengaduan yang perlu ditindaklanjuti akan ditransfer kasusnya secara resmi atau *Officially Transferred Case* (OTC) melalui *email* ke Internal Audit atau *Anti Fraud* sesuai dengan kategori kasusnya.
3. Pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim Internal Audit atau *Anti Fraud*, meliputi proses investigasi *root cause*, penyusunan kronologis insiden, *action plan*, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku (baik sanksi perusahaan maupun sanksi hukum).

Pihak yang Mengelola Pengaduan

1. Divisi Risk Management merupakan unit kerja yang mengelola seluruh laporan pengaduan dari pelapor (*risk owner*).
2. Divisi Internal Audit merupakan unit kerja yang mengelola laporan pengaduan yang diterima dari *Risk Management* (sudah di-OTC dan merupakan kasus non-pidana atau *undifined*). Jika diperlukan, Internal Audit akan melakukan investigasi lebih lanjut pada laporan yang diterima.
3. Divisi Anti Fraud merupakan unit kerja yang mengelola laporan pengaduan yang diterima dari Risk Management (sudah di-OTC dan merupakan kasus pidana). Jika diperlukan, *Anti Fraud* akan melakukan investigasi lebih lanjut pada laporan yang diterima.

Complaint Handling

1. The complaints from the whistleblowers received by email Jendela (jendela@wom.co.id) will be analyzed by the OR & ERM Department to determine the party that will handle such complaints.
2. The complaint reports that require a follow up will be officially transferred the case (OTC) through email to the Internal Audit or Anti Fraud in accordance with its cases category.
3. The complaints will be followed up by Internal Audit or Anti Fraud team, covering the process of root cause investigation, incident chronology development, action plan up to sanctions to the suspect (both company's sanctions or legal sanctions).

Complaint Management

1. The Risk Management Unit is a work unit managing all whistleblowing reports from the risk owners.
2. The Internal Audit Unit is a work unit managing the incoming whistleblowing reports from the Risk Management (already OTC and a non-criminal cases or undefined). If required, the Internal Audit will investigate the incoming reports further.
3. The Anti Fraud Division is a work unit managing the incoming whistleblowing reports from the Risk Management (already OTC and a criminal cases). If required, the QAL will investigate the incoming reports further.

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir
Number of complaints received and processed in the last fiscal year

Region	Jumlah Kasus Number of Cases	Actual Loss	Potensial Loss
Kantor Pusat Head Office	3	104,829,828	-
Regional Jakarta-Tangerang-Serang	3	21,352,500	56,215,000
Regional Jawa Barat	3	-	21,573,500
Regional Jawa Tengah	4	-	58,680,867
Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara	10	4,755,923	10,694,465
Regional Sumatera Bagian Utara	13	156,519,399	38,777,000
Regional Sumatera Bagian Selatan	15	65,977,629	111,439,333
Regional Kalimantan Sulawesi	4	44,178,539	71,316,743
Grand Total	55	397,613,818	368,696,908

Berdasarkan tipe Kasus
Based on Case Types

Tipe Kasus	Status Kasus Case Status	TOTAL
Litigation	Belum Lapor Not Reported	3
	Proses Lapor Polisi Police Reporting Process	1
	Proses Pemeriksaan Saksi Pelapor Reporting Witness Examination Process	1
	Proses Pemeriksaan Saksi Terlapor Defendant Witness Examination Process	6
	Proses Pemeriksaan Saksi Internal Internal Witness Examination Process	5
	Proses Pemeriksaan Saksi Eksternal External Witness Examination Process	5
	Proses Penangkapan Tersangka Suspect Arresting Process	2
	Penahanan Tersangka Suspect Detention	2
	Proses P21 (Kejaksaan) P21 Process (Region Attorney Office)	1
	Proses Sidang Trial Process	2
	Vonis Verdict	6
	Dpo	1
	Case Closed (Litigation)	2
Litigation Total		37
Non Litigation	Case Closed (Non Litigation)	4
	-	14
Non Litigation Total		18
Grand Total		55

Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System

Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku terakhir Sanctions follow-up on complaints that have been processed in the last financial year

Kasus yang masuk ranah pengadilan dan telah diselesaikan diproses
Cases that reached the court stages and have been processed

Kejadian Incident Name	Fungsi Function	Status Kasus Case Status	Total
Pengubahan Suku Cadang Change Spare Part	Collection	Case Closed (Non Litigation)	1
Aplikasi Penipuan Fraud Apps	Marketing Mobilku	Case Closed (Non Litigation)	2
		Proses Sidang Trial Process	1
Penjualan Jaminan secara Ilegal Illegal Collateral Selling	Remedial	Vonis Verdict	1
		Case Closed (Litigation)	1
Penggelapan Angsuran Lapping Installment	Collection	Case Closed (Non Litigation)	1
		Proses P21 (Kejaksaan)	1
		Proses Sidang Trial Process	1
		Vonis Verdict	4
Penggelapan Unit Lapping Unit	Collection	Vonis Verdict	1
Pencurian Thievery	External	Case Closed (Litigation)	1
Grand Total			15